

**PENGARUH KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA
TERHADAP LINGKUNGAN FISIK
KOTA PEKANBARU**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Kota
Universitas Diponegoro Semarang**

Oleh :

**DEVITA SARI
L4D002010**



**MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
2 0 0 3**

**PENGARUH KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA
TERHADAP LINGKUNGAN FISIK
KOTA PEKANBARU**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

**DEVITA SARI
L4D002010**

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft: 2418 /T /MTPK /C1

Tgl. : 8 Mei 2004

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 24 September 2003

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 24 September 2003

Pembimbing Pendamping :


Ir. WISNU PRADOTO, MT

Pembimbing Utama :


Ir. BAMBANG SETIOKO, M.Eng



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Ir. SUGIONO SOETOMO, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, September 2003

DEVITA SARI
L4D002010

.....Katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanyaah orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran,

(Az Zumar, 9)

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu ?

Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu.

Yang memberatkan punggungmu.

Dan Kami tinggikan bagimu sebutan namamu.

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.

Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q. Al Insyrah : 5)

Semua ini kupersembahkan kepada
Papa & Mama yang tercinta,
Suamiku terkasih Tengku Firdaus dan
permata hatiku Tengku Muhammad Farras Firdaus
serta adik-adikku tersayang (Ihsan, Zakki dan Andis)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul "Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan Fisik Kota Pekanbaru". Tulisan ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan mata kuliah Tesis pada Program Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keberadaan pedagang kaki lima terhadap lingkungan fisik dan masyarakat Kota Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Ketua Project CPCO – *Capacity Building in Urban Infrastructure Management*, yang telah memberikan beasiswa untuk studi ini.
2. Bapak Drs. H. Herman Abdullah, MM. selaku Walikota Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan Studi di Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, Msc. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Prof. DR. Ir. Sugiono Soetomo, DEA. selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro
5. Bapak Ir. Bambang Setioko, M.Eng. dan Bapak Wisnu Pradoto, MSP selaku Dosen Mentor dan Co-mentor, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis.
6. Bapak Ir. Hadi Wahyono, MA. selaku Dosen Pembahas, yang telah memberikan masukan-masukan guna lebih sempurnanya tulisan ini.
7. Bapak Samsul Ma'rif, SP, MT. selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berguna dalam penyempurnaan tulisan ini.
8. Dosen-dosen pengajar pada Program Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro.
9. Papa dan mama tercinta serta adik-adikku, Ihsan, Zaki, Andis atas dukungan dan doanya.
10. Suamiku terkasih Tengku Firdaus dan permata hatiku Tengku Muhammad Farras, yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan tulisan ini
11. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya tulisan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna lebih sempurnanya tulisan ini.

Semarang, Januari 2003

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Sasaran Penelitian	7
1.3.3. Manfaat Penelitian	7
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	8
1.5.1. Ruang lingkup Substansial.....	8
1.5.2. Ruang Lingkup Spasial	8
1.5. Kerangka Pikir Penelitian.....	9
1.6. Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Penelitian	14
1.6.1. Pendekatan Penelitian	14
1.6.2. Metode Pelaksanaan Penelitian	16
1.6.2.1. Kebutuhan Data	16
1.6.2.2. Teknik Pengumpulan Data	17
1.6.2.3. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	18
1.6.2.4. Teknik Sampling	19
1.6.2.5. Teknik Analisis Data.....	22
1.7. Sistematika Penulisan.	25
 BAB II. PEDAGANG KAKI LIMA DAN KAIDAH PENATAAN LINGKUNGAN	 28
2.1. Pedagang Kaki Lima	28
2.1.1. Pengertian dan Ciri Pedagang kaki Lima	28
2.1.2. Pelaku Pedagang Kaki Lima	30
2.1.3. Hubungan Sektor Informal dan Pedagang Kaki lima ..	31
2.2. Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima.....	32
2.2.1. Jenis Barang Dagangan Pedagang Kaki Lima.....	32
2.2.2. Sarana Fisik Aktivitas Pedagang Kaki Lima.....	33
2.2.3. Pola Sebaran Padagang Kaki Lima.....	34
1. Pola Sebaran Mengelompok (Focus Agglomeration)	34
2. Pola Sebaran Memanjang (linier Concentration)....	35

2.2.4. Pola Pelayanan Pedagang Kaki Lima.....	35
1.Fungsi Pelayanan.....	35
2.Skala Pelayanan.....	36
3.Sifat Pelayanan.....	36
4.Waktu Pelayanan Pedagang Kaki Lima.....	37
2.2.5. Ruang Aktifitas Pedagang Kaki Lima.....	38
2.3. Elemen Fisik Lingkungan	40
2.3.1. Tata gung lahan	41
2.3.2. Bentuk dan Masa Bangunan	42
2.3.3. Sirkulasi dan Parkir.....	44
2.3.4. Ruang Terbuka	45
2.3.5. Jalur Pejalan kaki (pedestrian).....	45
2.4. Pedagang kaki Lima Dalam Rencana Tata Ruang.....	47
2.5. Rangkuman Kajian Teori.....	48
2.6. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional	53
2.6.1.Identifikasi Variabel	53
2.6.2.Definisi Operasional	54

BAB III. GAMBARAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU

3.1. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru	58
3.2. Peran dan Fungsi Kota Pekanbaru	59
3.3. Kebijakan Pengembangan Tata Ruang Kota	61
3.4 Kependudukan.....	63
3.5.Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru.....	68
3.5.1. Perkembangan dan Penyebaran Lokasi PKL di Kota Pekanbaru	68
3.5.2. Karakteristik Lokasi Studi	69
3.6.Karakteristik Lokasi Studi	73
3.7.Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap PKL	83

BAB IV. ANALISIS PENGARUH KEBERADAAN PKL TERHADAP LINGKUNGAN FISIK DAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU.....

4.1.Identifikasi Karakteristik Aktivitas PKL di Kota Pekanbaru.....	85
4.1.1.Jenis Dagangan	85
4.1.2.Sarana Fisik Aktivitas PKL	87
4.1.3.Pola Penyebaran PKL	89
4.1.4.Waktu Aktivitas PKL	90
4.1.5.Jenis Ruang Aktivitas PKL	91
4.1.6.Luas Ruang Aktivitas PKL	92
4.1.7.Perlakuan PKL terhadap Ruang Aktivitas	93
4.2. Identifikasi Karakteristik Elemen Fisik Lingkungan	95
4.2.1. Tata Guna Lahan	95
4.2.2. Bentuk dan Massa Bangunan	96
4.2.3. Sirkulasi dan Parkir	97
4.2.4. Ruang Aktivitas	98

4.2. Analisis Hubungan antara Perilaku Aktivitas PKL dengan Elemen Fisik Lingkungan	99
4.3. Analisis Pengaruh Keberadaan PKL terhadap Lingkungan Fisik Kota Pekanbaru	107
4.3.1. Pengaruh terhadap Elemen Fisik Lingkungan	107
4.3.1.1. Tata Guna Lahan	107
4.3.1.2. Bentuk dan Massa Bangunan	116
4.3.1.2. Ruang Aktivitas PKL	120
1. Trotoir	120
2. Jalan dan Parkir	123
3. Ruang lainnya	128
4.3.2. Pengaruh terhadap Masyarakat Kota Pekanbaru	129
4.4.2.1. Persepsi masyarakat terhadap Gangguan yang Ditimbulkan oleh Keberadaan PKL	129
4.4.2.2. Persepsi Masyarakat terhadap Manfaat Keberadaan PKL	132
4.4.2.3. Persepsi Masyarakat dan PKL terhadap Penataan PKL	133
 BAB V. PENUTUP	
5.1. Temuan Penelitian	135
5.2. Kesimpulan	140
5.3. Rekomendasi	141
 DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN	147

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	: Kebutuhan Data dan Metode Analisis	15
Tabel I.2.	: Jumlah Sampel Berdasarkan Lokasi	21
Tabel II.1	: Standar Besaran Trotoar (Departemen Pekerjaan Umum) ...	46
Tabel II.2	: Karakteristik Pedestrian	47
Tabel II.3	: Karakteristik Aktivitas PKL	49
Tabel II.4	: Ringkasan Teori Tentang Faktor-Faktor Yang Akan Diteliti	51
Tabel III.1	: Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Periode Tahun 1992 - 2002	64
Tabel III.2	: Kepadatan Penduduk di kota Pekanbaru	65
Tabel III.3	: Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Suku Bangsa	66
Tabel III.4	: Komposisi Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Mata Pencarian (Umur 15 Tahun Ke atas)	67
Tabel III.4	: Jumlah Pedagang Kaki Lima Tahun 1997 – 2001	69
Tabel IV.1	: Jenis Dagangan PKL	86
Tabel IV.2.	: Sarana Fisik Aktivitas PKL	87
Tabel IV.3	: Pola Pengelompokan PKL	90
Tabel IV.4	: Lama Waktu Aktivitas PKL	91
Tabel IV.5	: Jenis Ruang Aktivitas PKL	92
Tabel IV.6	: Luas Ruang Aktivitas PKL	93
Tabel IV.7	: Cara Penyimpanan Sarana Fisik Aktivitas	93
Tabel IV.8.	: Kondisi Tata Guna Lahan	95
Tabel IV.9.	: Kondisi Bentuk dan Massa Bangunan	96
Tabel IV.10.	: Kondisi Sirkulasi dan Parkir	97
Tabel IV.11.	: Kondisi Ruang Aktivitas PKL	100
Tabel IV.12.	: Hubungan Perilaku PKL dengan elemen fisik lingkungan ..	95
Tabel IV.13.	: Persepsi Masyarakat terhadap Keberadaan PKL	129
Tabel IV.14.	: Persepsi Masyarakat terhadap Gangguan Karakteristik Aktivitas PKL	130

Tabel IV.15. : Persepsi Masyarakat terhadap Karakteristik Aktivitas PK	131
Tabel IV.16. : Persepsi Masyarakat terhadap Ruang Aktivitas PKL	131
Tabel IV.17. : Persepsi Masyarakat terhadap Manfaat Keberadaan PKL ...	129
Tabel IV.18. : Preferensi Masyarakat dan PKL terhadap Penataan PKL ...	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Peta Wilayah Penelitian.....	11
Gambar 1.2	: Kerangka Pikir Penelitian.....	12
Gambar 2.1	: Pola Penyebaran Mengelompok (Focus Agglomeration)...	35
Gambar 2.2	: Pola Penyebaran Memanjang (Linear Concentration).....	35
Gambar 3.1	: Peta Wilayah Administrasi Kota Pekanbaru	60
Gambar 3.2	: Peta Wilayah Pengembangan Kota Pekanbaru	62
Gambar 3.3	: Diagram Batang Perkembangan Penduduk Kota Pekanbaru	64
Gambar 3.4	: Diagram Komposisi Penduduk Menurut Suku Bangsa	66
Gambar 3.5	: Diagram Komposisi Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Mata Pencarian	68
Gambar 3.6	: Diagram Batang Perkembangan Jumlah PKL	70
Gambar 3.7	: Pedagang Kaki Lima yang Beraktivitas pada Trotoar dan bahu jalan	71
Gambar 3.8	: PKL yang berdagang di emperan toko dan trotoir	71
Gambar 3.9	: PKL yang beraktivitas di sekitar Pasar Cik Puan Jl. Tuanku Tambusai	72
Gambar 3.10	: Tenda-tenda yang ditinggalkan begitu saja setelah beraktifitas	73
Gambar 3.11	: Peta Wilayah Studi	80
Gambar 3.12	: Aktivitas PKL pada Lokasi Penelitian	81
Gambar 3.12	: Aktivitas PKL pada Lokasi Studi	82
Gambar 4.1.	: Gambar dan Sketsa Pemanfaatan Ruang oleh PKL pada Kawasan Perdagangan Jalan Tuanku Tambusai	110
Gambar 4.2.	: Gambar dan Sketsa Pemanfaatan Ruang oleh PKL pada Kawasan Perdagangan Jalan Agus Salim	111
Gambar 4.3.	: Gambar dan Sketsa Pemanfaatan Ruang oleh PKL pada Kawasan Perkantoran	113
Gambar 4.4.	: Gambar dan Sketsa Pemanfaatan Ruang oleh PKL pada	

	Kawasan pendidikan	115
Gambar 4.5.	: Keberadaan Sarana Fisik Aktivitas PKL terhadap Bangunan Formal yang Ada di Sekitarnya	117
Gambar 4.6	: Intervensi Aktivitas PKL pada pada Trotoir yang Mengganggu Sirkulasi Pejalan Kaki	122
Gambar 4.7	: Gambar dan Sketsa Trotoir dan Jalan dengan Adanya PKL	126
Gambar 4.8	: Gambar dan Sketsa Kondisi Parkir dengan Adanya PKL pada Jalan Tuanku Tambusai	127

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Kuesioner	148.
Lampiran B : Pengkodean Jawaban Kuesioner	154
Lampiran C : Hasil Kuesioner PKL	160
Lampiran D : Hasil Kuesioner Masyarakat	163
Lampiran E : Analisis Cross Tabulation	164

ABSTRAK

Pertumbuhan kota-kota di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran sektor informal, yang secara integral telah merasuk dalam setiap kegiatan kehidupan perkotaan. Gejala dualisme ini menjadi warna khas dari kehidupan perkotaan dan kondisi ini terjadi hampir di semua kawasan lingkungan fungsional kota. Keberadaan sektor informal tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan, dimana ketidakseimbangan pembangunan desa dan kota, menarik arus urbanisasi ke kota. Hal ini menyebabkan pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang tidak sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja. Dalam situasi inilah para pencari kerja lari ke sektor informal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu usaha sektor informal adalah pedagang kaki lima (PKL). Dalam perkembangannya PKL menghadapkan pemerintah pada kondisi yang dilematis, disatu sisi keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja, sedangkan dilain pihak keberadaan PKL yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang telah menjadi beban bagi kota. PKL beraktivitas pada ruang-ruang publik kota tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga terjadinya distorsi fungsi dari ruang tersebut. Pada akhirnya kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota dalam menciptakan keserasian lingkungan kota sering kali tidak sejalan dengan apa yang telah direncanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap PKL yang beraktivitas pada lingkungan Kota Pekanbaru untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari keberadaan PKL terhadap lingkungan fisik dan masyarakat Kota Pekanbaru.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksplanatory, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat analisis distribusi frekuensi dan cross tabulation, serta didukung oleh analisis deskriptif kualitatif. Sampel dari penelitian meliputi PKL di Kota Pekanbaru dan masyarakat Kota Pekanbaru.

Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa didapat temuan penelitian yaitu terdapat hubungan antara perilaku aktivitas PKL dengan elemen fisik lingkungan yang menunjukkan bahwa perilaku aktivitas PKL berpengaruh terhadap elemen fisik lingkungan. Dari hasil analisis diketahui bahwa keberadaan pedagang kaki lima memberikan pengaruh negatif terhadap elemen-elemen fisik lingkungan Kota Pekanbaru. Sedangkan terhadap masyarakat keberadaan PKL selain memberikan pengaruh negatif juga memberikan manfaat terhadap masyarakat.

Dari hasil temuan penelitian di atas disimpulkan bahwa keberadaan PKL yang memanfaatkan ruang-ruang publik kota telah menimbulkan pengaruh negatif, yang diakibatkan oleh faktor perilaku aktivitas PKL dan aturan-aturan dalam pengelolaan PKL yang belum terlaksana secara optimal. Namun bagi masyarakat selain sisi negatif juga telah memberikan sisi positif. Dari hasil analisis dan kesimpulan dibuat suatu rekomendasi untuk studi lanjutan yang berkaitan dengan aktivitas PKL di perkotaan.

ABSTRACT

Towns growth in Indonesia can't detachable from informal sector attendance, what integrally have incoming each; every activity of urban life. This symptom dualisme become typical colour from life of urban and this condition happened almost in all functional environment area of town. Informal sector existence can't be discharged from development process, where imbalance of development of countryside and town, drawing urbanization current to town. This matter cause growth sum up labor force which don't in line with of employment. In situation of this is all searcher work to take to informal sector in fulfilling requirement live its.

One of informal sector effort is the street vendor. It's in growth is the street vendor confront government at condition which dilematis, one of his existence side earn to create employment, while on the other hand existence of the street vendor which is not reckoned in the plan the planology have come to burden for town. The strrt vendor have activity at public spaces of town without bothering public interest, of the happening of distrosi function from the space. In the end structur physical of a period of/to and the town space in creating environmental compatibility of town frequently do not in line with what have been planned.

This research aim to to know to conduct study to the street vendor which have activity at environment of Pekanbaru city for know influence generated from existence of the steer vendor to environmental physical and urban community of Pekanbaru city.

Used by research is descriptive of eksplanatory, while used by analysis technique is quantitative descriptive by using ata analyse distbusi of frequency and cross tabulation, and also be supported by descriptive analysis qualitative. Qualitative. Sampel from research cover PKL in Pekanbaru City and Urban Community of Pekanbaru.

Pursuant to analysis done by that in earning the research finding that is there are relation of between behavior of activity PKL with element of environment physical indicating that behavior of activity PKL have an effect on to environmental physical element. From result analyse known that by existence of merchant of cloister have an effect on negativity to environmental physical elements of Pekanbaru City. Then to society of existence the street vendor of besides giving negative influence also give benefit to society.

From result of above research finding concluded by that existence of the street vendor Exploiting public spaces of town have generated negativity influence, what resulted by a behavioral factor of activity of the street vendor and orders of about the street vendor which uncommitt in an optimal fashion. But for society of besides negative side have also given positive side. From result analyse and the conclusion made by an recommendation for the continuation study of related to activity street vendor in urban.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Balakang Penelitian

Keberadaan sektor informal tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan. Menurut Effendi (1995: 73) ada dua pemikiran yang berkembang dalam memahami kaitan antara pembangunan dan sektor informal. Pertama pemikiran yang menekankan bahwa kehadiran sektor informal sebagai gejala transisi dalam proses pembangunan di negara sedang berkembang. Pandangan ini berpendapat bahwa sektor informal berangsur-angsur akan berkembang menjadi sektor formal seiring dengan meningkatnya pembangunan. Kedua, pemikiran yang berpendapat bahwa kehadiran sektor informal merupakan gejala adanya ketidakseimbangan pembangunan. Dimana kehadiran sektor informal dipandang sebagai akibat kebijaksanaan pembangunan yang dalam banyak hal lebih menitikberatkan pada sektor modern (perkotaan) atau industri, dari pada sektor tradisional (pertanian).

Ketidakseimbangan pembangunan desa dan kota ini, menyebabkan terjadinya arus migrasi dari desa ke kota. Dikota segalanya serba ada dan tersedia, menjadi daya tarik bagi orang untuk datang ke kota dengan harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Sesuai hasil penelitian P.Todaro dan Jerry Silkird (dalam Marning dan Effendi, 1996: 10) bahwa orang-orang desa yang miskin "didorong" pindah ke kota karena masalah kemandekan atau berkurangnya kesempatan kerja di desa, dan pada saat yang sama tertarik oleh harapan untuk mendapat pekerjaan yang lebih layak dan berpenghasilan tinggi.

Arus urbanisasi yang terus berlangsung menyebabkan pesatnya pertumbuhan penduduk kota, dimana pertumbuhan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja (Ramli, 1992). Rendahnya tingkat pendidikan dan tidak adanya keahlian yang mendukung menyebabkan hanya sebagian kecil dari pencari kerja

yang dapat diterima pada sektor formal. Pada situasi inilah ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang bagi pencari kerja dan kaum marjinal (Manning dan Effendi, 1985: 03).

Pertumbuhan kota di Indonesia pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kehadiran sektor informal, yang secara integral telah merasuk dalam setiap kegiatan kehidupan perkotaan. Bila ditinjau dari aspek fisik kota, dualisme ini terjadi pada pembauran pola dan struktur rancang kota, seperti yang dikatakan Sujarto (1981: 86), gejala dualisme terlihat pada pola dan struktur kota-kota di Indonesia. Gejala dualisme ini juga menjadi warna khas dari kehidupan perkotaan yang terjadi hampir di semua kawasan lingkungan fungsional kota, seperti pada kawasan komersial, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan perumahan, kawasan rekreasi dan lainnya (Satrawan dalam Tatanan, 1990: 31).

Sektor informal di bidang ekonomi yang muncul dan menjadi fenomena di perkotaan adalah pedagang kaki lima. Kurang matangnya perencanaan dan pengawasan pembangunan pada seluruh bagian kota, menyebabkan sektor ini berkembang sendiri secara spontan, dalam arti tidak terencana dan liar. Selain itu dalam proses perencanaan tata ruang kota keberadaan dan peruntukkan ruang bagi sektor informal dalam hal ini PKL tidak direncanakan secara tegas seperti layaknya sektor formal. Pada akhirnya PKL tumbuh dengan memanfaatkan ruang publik kota yang dianggap strategis seperti pada trotoar, taman, bahu jalan, di atas saluran, emperan toko, yang mengakibatkan ruang publik tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh penggunanya sesuai dengan fungsinya.

Fenomena pedagang kaki lima melanda hampir semua kota-kota besar di Indonesia, seperti di Kota Yogyakarta pada Pusat Perdagangan Malioboro, pedagang kaki lima beraktivitas di sepanjang koridor pertokoan (*arcade*). Perancangan ruang *arcade* di

kawasan Malioboro ini merupakan contoh ruang aktivitas pejalan kaki yang beratap, tetapi pada kenyataannya ruang tersebut tidak optimal fungsinya sebagai ruang bagi pejalan kaki karena adanya intervensi dari pedagang kaki lima. Namun demikian keberadaan pedagang kaki lima di Malioboro ini sangat mendukung fungsi kegiatan utama sebagai pusat perdagangan dan menjadi identitas bagi kawasan.

Fenomena pedagang kaki lima juga terjadi di Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Propinsi Riau. Sebagai ibukota propinsi Kota Pekanbaru sekaligus menjadi pintu gerbang bagi daerah disekitarnya, predikat ini mendorong Kota Pekanbaru terus meningkatkan keberadaannya sebagai pusat pembangunan, pusat pendidikan serta pusat perindustrian dan perdagangan. Potensi yang dimiliki Kota Pekanbaru tersebut menjadi magnet penarik arus urbanisasi dari daerah maupun propinsi disekitarnya. Hal ini tercermin dari komposisi penduduk Kota Pekanbaru, dimana 70 % dari jumlah penduduknya adalah kaum pendatang. Keterbatasan lapangan pekerjaan di sektor formal akhirnya melahirkan kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor informal diantaranya pedagang kaki lima.

Jumlah pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru terus meningkat setiap tahunnya, ini dapat dilihat dari jumlah pedagang kaki lima yang beraktivitas di sekitar beberapa lokasi pasar di Kota Pekanbaru. Pada tahun 1997 tercatat 1.030 pedagang, yang meningkat menjadi 1.460 pada tahun 1998, dan pada tahun 2001 terdapat 1730 pedagang (sumber Dinas Pasar Kota Pekanbaru). Pada tahun 2002 jumlah pedagang kaki lima mencapai 6166 unit pedagang yang tersebar di beberapa lokasi di Kota Pekanbaru (Sumber: hasil penelitian Dewi. M tahun 2002). Peningkatan jumlah pedagang kaki lima tanpa diiringi dengan pengendalian dan pengelolaan yang baik menimbulkan permasalahan bagi kota, karena dalam beraktivitas pedagang kurang memperhatikan masalah K3 ataupun kepentingan umum pada ruang yang ditempatinya.

Di Kota Pekanbaru PKL dapat terlihat mulai dari pusat kota hingga jalan-jalan di pinggiran kota. Mereka tidak hanya beraktivitas di lokasi-lokasi pusat perdagangan tetapi juga di lokasi pusat aktivitas masyarakat lainnya seperti pada kawasan perkantoran, pendidikan dan permukiman. Seperti pada jalan Jenderal Sudirman, jalan Tuanku Tambusai, Jalan Ahmad Yani, Jalan Tuanku Tambusai dan beberapa lokasi lainnya. Dalam beraktivitas pedagang menempati ruang-ruang publik seperti trotoir, emperan toko dan pelataran parkir. Di beberapa lokasi pedagang kaki lima memanfaatkan sebagian badan jalan seperti pada jalan Alamuddin Syah dan jalan Teratai yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan, bahkan di jalan Agus Salim pedagang telah memenuhi ruas jalan tersebut, sehingga tidak lagi dapat dilalui oleh kendaraan. Melihat dari realita tersebut, keberadaan PKL yang menempati ruang-ruang publik kota akhirnya menimbulkan benturan atau konflik kepentingan antara kepentingan publik (warga kota) dan kepentingan sektor informal PKL.

Kondisi tersebut semakin memprihatinkan oleh sarana perdagangan yang digunakan seperti tenda atau gerobak yang tidak teratur dan kurang terjaga kebersihannya, sehingga gambaran kota Pekanbaru sebagai “KOTA BERTUAH”, BERSih, Tertib, Usaha bersama, Aman dan Harmonis tidak terwujud. Kenyataan ini terjadi seiring dengan perkembangan pembangunan kota dimana perkembangan sektor formal terus diikuti oleh perkembangan sektor informal sebagai aktivitas pendukungnya.

Dalam menyikapi permasalahan ini Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan peraturan berkenaan dengan penataan pedagang kaki lima, yaitu Peraturan Daerah No. 11 tahun 2001, tentang pembinaan dan penataan pedagang kaki lima. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran pedagang karena tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya sosialisasi dari

peraturan tersebut dan penerapan sanksi hukum yang tidak tegas bagi pedagang yang melakukan pelanggaran. Sehingga peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan atau diimplementasikan secara optimal. Selain itu kelemahan dari kebijakan tersebut adalah belum ditetapkan secara tegas ruang bagi aktivitas pedagang kaki lima, dan tidak adanya acuan atau pedoman tatanan fisik yang lebih detail.

Melihat dari perkembangan sosial dan ekonomi Kota Pekanbaru yang tidak dapat dengan dipisahkan dari perkembangan sektor informal PKL, maka sudah selayaknya dalam proses perencanaan tata ruang kota, Pemerintah Kota Pekanbaru mempertimbangkan keberadaan sektor informal dalam hal ini pedagang kaki lima. Apalagi keberadaan PKL tidak hanya berdampak negatif tapi telah memberikan jalan keluar bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran dan menjadi penyelamat disaat krisis ekonomi. Dengan peran PKL seperti yang disebutkan di atas pada akhirnya memunculkan eksternalitas lingkungan yang berpengaruh terhadap lingkungan baik secara fisik maupun sosial. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan tanpa adanya pengendalian dari pihak pengelola kota, karena bukan tidak mungkin akan berpengaruh lebih jauh lagi terhadap aspek-aspek kehidupan perkotaan.

Untuk itu perlu kiranya dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan pedagang kaki lima terhadap lingkungan fisik dan masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga dapat menjadi acuan dalam penataan pedagang kaki lima dan pengendalian perkembangan suatu kawasan selanjutnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru terus berkembang dan menjadi alternatif dalam mengatasi masalah perekonomian masyarakat. Mereka hadir tidak hanya pada kawasan perdagangan tetapi juga pada ruang aktivitas kota lainnya seperti pada kawasan perkantoran, pendidikan dan permukiman. Tidak adanya peruntukan ruang bagi PKL menyebabkan mereka memanfaatkan ruang-ruang publik kota seperti trotoir, emperan toko, pelataran parkir bahkan sampai ke badan jalan dalam beraktivitas. Akhirnya ruang publik tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena terjadi benturan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor informal. atau terjadi distorsi fungsi dari ruang publik tersebut.
2. Permasalahan ini muncul karena kepentingan sektor informal belum terakomodasi dalam rencana tata ruang kota, menyebabkan tidak tersedianya peruntukan ruang bagi aktivitas PKL.
3. Belum adanya kebijakan dan aturan yang tepat dan implementatif, baik secara fisik maupun non fisik dalam hal penataan PKL. Kebijakan atau aturan yang ada belum secara tegas menetapkan ruang dan tempat yang efektif bagi PKL sehingga kesesuaian tatanan fisik massa dan ruang kota dalam menciptakan keserasian lingkungan kota tidak lagi sejalan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan di atas dirumuskan pertanyaan penelitian (*question reseach*) sebagai berikut, “Bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan PKL terhadap lingkungan fisik dan masyarakat Kota Pekanbaru”.

1.3 Tujuan , Sasaran dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah melakukan kajian terhadap pedagang kaki lima yang beraktivitas di lingkungan Kota Pekanbaru, untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan pedagang kaki lima terhadap lingkungan fisik dan masyarakat Kota Pekanbaru.

1.3.2. Sasaran Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan di atas, maka disusun sasaran penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik pedagang kaki lima yang meliputi jenis dagangan, sarana fisik aktivitas, pola sebaran PKL, waktu aktivitas, jenis ruang, luas ruang, dan cara penyimpanan sarana fisik aktivitas.
2. Mengidentifikasi elemen-elemen fisik lingkungan yang meliputi tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka sebagai ruang aktivitas PKL, dan pedestrian.
3. Mengkaji hubungan karakteristik PKL dengan elemen fisik lingkungan yang meliputi tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka sebagai ruang aktivitas PKL, dan pedestrian.
4. Mengkaji persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL.
5. Mengetahui pengaruh dari keberadaan pedagang kaki lima terhadap lingkungan fisik dan masyarakat Kota Pekanbaru

1.3.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan dibidang pembangunan kota, khususnya masalah keberadaan pedagang kaki lima pada ruang-ruang publik kota. Selanjutnya studi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun arahan perencanaan dan perancangan oleh pelaku pembangunan.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1. Ruang Lingkup Substansial

Pada penelitian ini ruang lingkup materi yang dibahas dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian terhadap PKL, yang dibatasi hanya pada PKL yang beraktivitas pada lingkungan fungsional Kota Pekanbaru yaitu pada kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan dan permukiman yang merupakan kawasan yang terdapat aktivitas PKLnya. Dimana materi yang akan dibahas adalah menyangkut identifikasi dari karakteristik aktivitas PKL. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik aktivitas pedagang kaki lima.
2. Kajian terhadap lingkungan fisik yang meliputi elemen-elemen fisik lingkungan yang ada kaitannya dengan keberadaan PKL, yang menggunakan kriteria dasar *urban design*.
3. Penelitian terhadap persepsi masyarakat tentang keberadaan PKL. Kajian ini dilakukan karena masyarakat adalah pengguna dari ruang-ruang yang dimanfaatkan oleh PKL, sehingga pengaruh terhadap lingkungan fisik akan berpengaruh langsung kepada masyarakat.

1.4.2. Ruang Lingkup Spasial

Secara spasial wilayah penelitian dibatasi pada wilayah administrasi Kota Pekanbaru dengan luas 632,26 Ha, yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dengan jumlah penduduk 684.274 jiwa. Peta wilayah penelitian dapat dilihat pada gambar 1.1. Adapun batas-batas administrasi Kota Pekanbaru, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, sebelah Timur dan Barat wilayah berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru tersebar di beberapa lokasi. Pada penelitian ini lokasi yang akan diamati meliputi lingkungan kawasan fungsional kota yang akan mewakili dari setiap jenis ruang aktivitas.

- Kawasan perdagangan dan jasa (komersial), adalah jalan Tuanku Tambusai dan jalan Agus Salim.
- Kawasan perkantoran, adalah jalan Jenderal Sudirman dan jalan Pepaya.
- kawasan permukiman, dan kawasan pendidikan. Adalah pada jalan KH. Ahmad Dahlan dan jalan Kaharudin Nasution.

1.5. Kerangka Pikir Penelitian

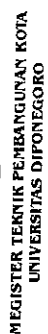
Fenomena pedagang kaki lima terjadi hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia begitu juga di Pekanbaru. Dalam kondisi keterbatasan ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor formal, sektor informal dalam hal ini pedagang kaki lima menjadi pilihan masyarakat dalam mengatasi masalah ekonominya.

Keberadaan pedagang kaki lima disatu sisi memberikan alternatif peluang bagi masyarakat dalam mengatasi masalah ekonomi, namun disisi lain keberadaan pedagang kaki lima yang belum diperhitungkan dalam rencana tata ruang kota telah menimbulkan

permasalahan bagi kota. Pedagang kaki lima menempati ruang-ruang publik yang bukan peruntukannya dalam beraktivitas seperti pada trotoar, bahu jalan, pelataran toko dan lain sebagainya atau dalam arti kata telah keluar dari apa yang telah direncanakan oleh pemerintah dalam rencana tata ruang kota. Hal ini dapat dimengerti karena masih kurangnya pengawasan dari aparat, kurangnya disiplin dari PKL itu sendiri, serta kebijakan atau aturan yang ada belum secara detail mengatur keberadaan dari PKL pada ruang-ruang kota baik secara fisik maupun non fisik.

Dalam mencapai tujuan penelitian pertama perlu ditetapkan sasaran penelitian yaitu diidentifikasi gambaran umum karakteristik aktivitas pedagang kaki lima yang meliputi jenis dagangan, sarana fisik aktivitas, pola sebaran, waktu berdagang, lokasi PKL, jenis ruang, luas ruang yang digunakan, dan perlakuan PKL terhadap sarana usahanya, untuk mengetahui pola perilaku pedagang dalam beraktivitas. Kemudian dilanjutkan dengan mengkaji keberadaan pedagang kaki lima terhadap elemen-elemen fisik lingkungan dan masyarakat Kota Pekanbaru.






Langkah kedua, dilakukan analisis data baik analisis spasial maupun sustansial dengan alat analisis tabulasi silang (*cross tab*) sebagai alat bantu untuk menampilkan frekuensi dari masing-masing variabel yang dikaitkan satu sama lain. Selain itu juga menganalisis secara deskriptif kualitatif. Untuk mendukung analisis, maka dilakukan kajian literatur terhadap teori-teori yang berkaitan dengan PKL dan lingkungan fisik. Hasil akhir berupa temuan penelitian, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi studi lanjutan yang dapat dilaksanakan. Adapun diagram kerangka pikir dan kerangka analisis dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.2. dan gambar 1.3. berikut.



**PENGARUH KEBERADAAN PEDAGANG
KAKI LIMA TERHADAP TATANAN
FISIK LINGKUNGAN KOTA PEKANBARU**

PETA ADMINISTRASI

LEGENDA:

- | | |
|---|-----------------|
|  | Batas Kotamadia |
|  | Batas Kecamatan |
|  | Jalan Aspal |
|  | Sungai |
|  | Wilayah Studi |

UPT-PUSTAK-UNDIP

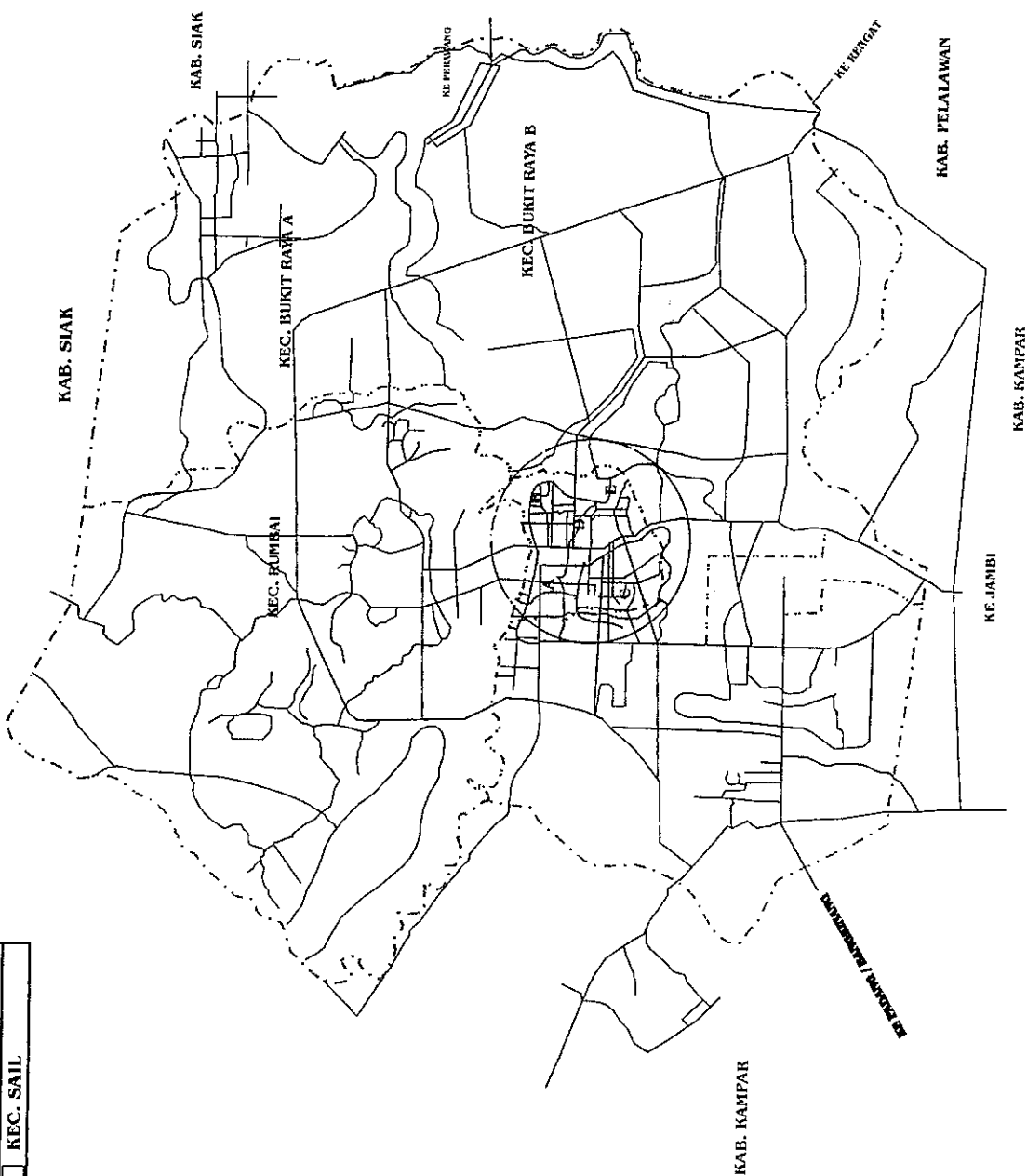
UTARA



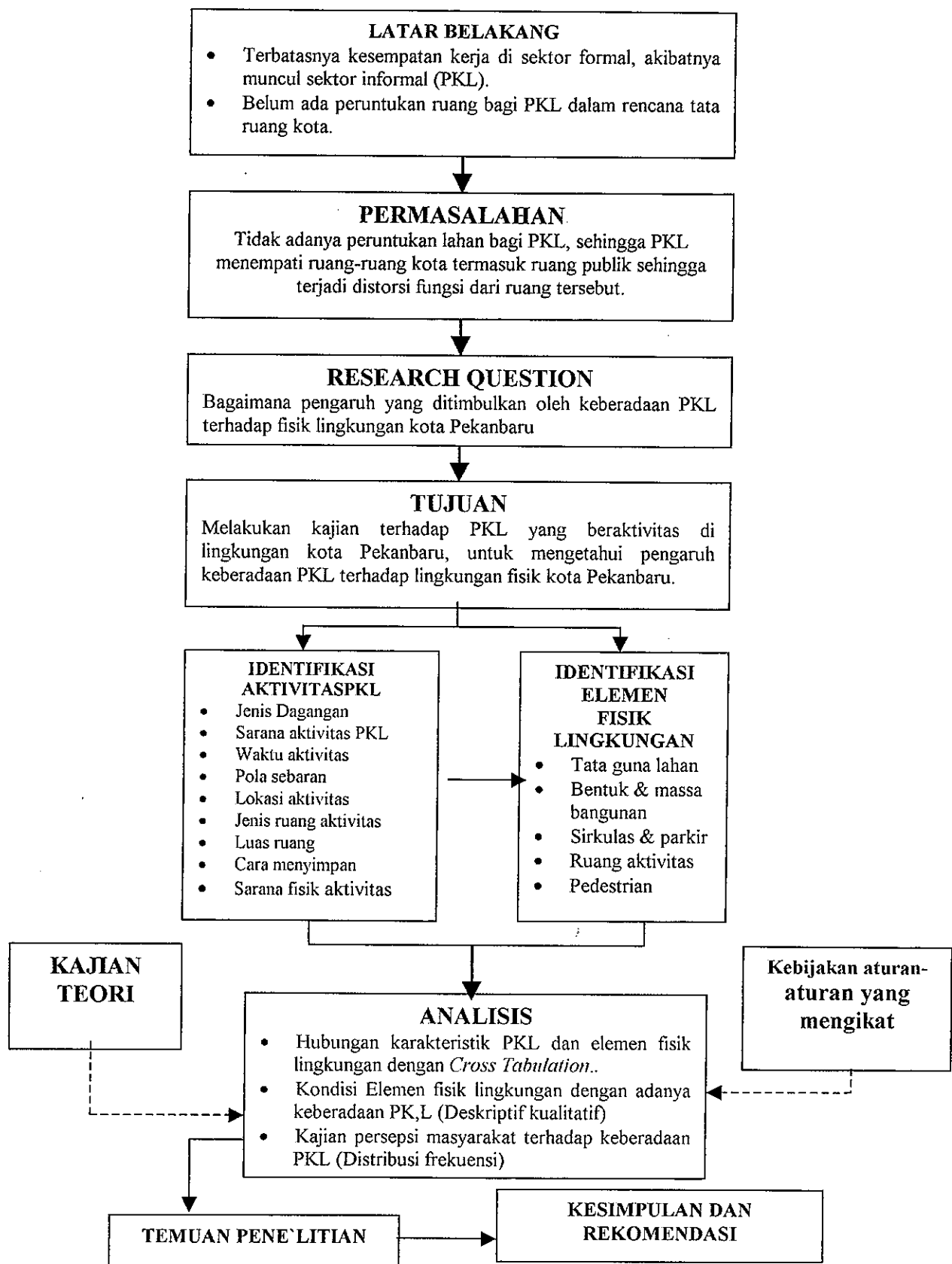
SKALA PETA

0 1,45 2,90 4,35
Skala 1:143000

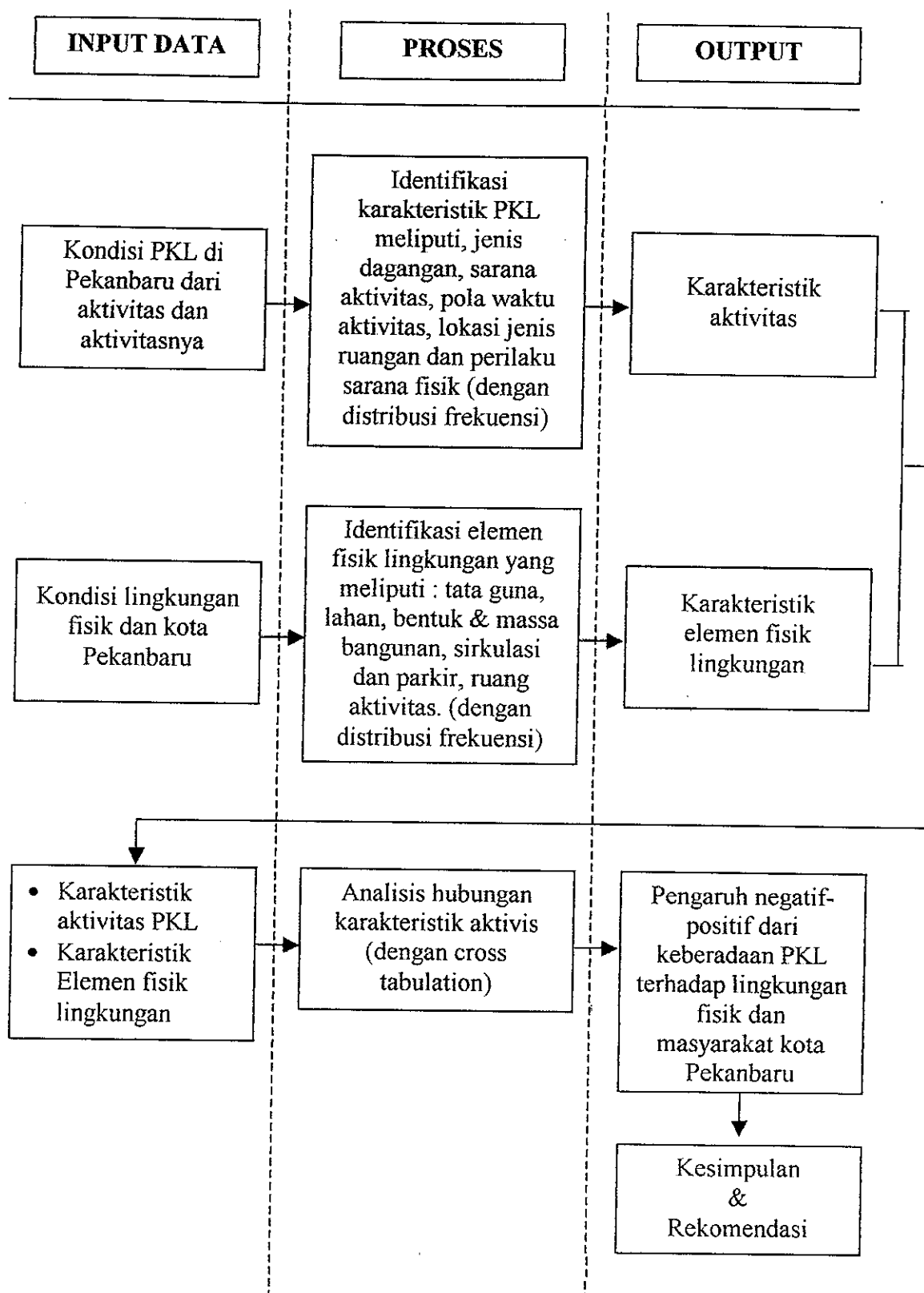
**SUMBER
PEMERINTAH KOTA
PEKANBARU**



A	KEC. SENAPELAN
B	KEC. LIMAPULUH
C	KEC. SUKAJADI
D	KEC. PEKAN BARU
E	KEC. SAIL



GAMBAR 1.2.
DIAGRAM ALUR PIKIR PENELITIAN



GAMBAR 1.3
KERANGKA ANALISIS

1.6. Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survai jenis “*explanatory*”, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, serta dilaksanakan dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner/wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 1989:33).

Pendekatan yang digunakan dalam mencapai tujuan dari penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai karakteristik aktivitas pedagang kaki lima, intensitas gangguan yang ditimbulkan oleh keberadaan PKL, serta gambaran mengenai preferensi masyarakat terhadap keberadaan pedagang kaki lima. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kondisi lingkungan fisik kawasan studi, serta sebagai pendukung dalam menganalisis pengaruh keberadaan pedagang kaki lima terhadap lingkungan fisik kota Pekanbaru dikaitkan dengan karakteristik aktivitas PKL. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini.

TABEL I.1.
KEBUTUHAN DATA, SUMBER DATA, DAN TEKNIK ANALISIS.

No	Tujuan	Sasaran	Variabel/Data	Indikator	Teknik Analisis	Sumber dan Perolehan data
1.	Untuk mengetahui perilaku PKL dalam beraktivitas dan memanfaatkan ruang	Identifikasi Karakteristik PKL	Karakteristik PKL.	<ul style="list-style-type: none"> Jenis barang dagangan Bentuk sarana fisik aktivitas Pola sebaran Waktu berdagang Lokasi PKL Jenis ruang Luas ruang Cara penyimpanan sarana fisik aktivitas 	Deskriptif dengan Frekuensi kuantitatif Distribusi	Data primer dengan observasi lapangan dan kuesioner
2.	Untuk mengetahui karakteristik lingkungan fisik Kota Pekanbaru	Identifikasi elemen lingkungan fisik Kota Pekanbaru	Elemen lingkungan fisik	<ul style="list-style-type: none"> Tata guna lahan Bentuk dan massa bangunan Sirkulasi dan parkir Ruang terbuka Pedestrian Tanda-tanda 	Deskriptif kualitatif	Data primer dan skunder, dengan observasi lapangan
3.	Untuk mengetahui pengaruh keberadaan PKL terhadap lingkungan fisik, baik pengaruh positif dan negatif	Kajian perilaku PKL terhadap lingkungan fisik Kota Pekanbaru.	<ul style="list-style-type: none"> Elemen lingkungan: Karakteristik Aktivitas PKL Keamanan kenyamanan masyarakat dan	<ul style="list-style-type: none"> Ruang aktivitas jenis dagangan Sarana Aktivitas Waktu aktivitas 	Deskriptif dengan <i>cross tabulation</i> Dan deskriptif kualitatif kuantitatif Deskriptif dengan distribusi frekuensi kuantitatif	Data primer dan skunder dengan observasi lapangan dan kuesioner.

1.6.2. Metode Pelaksanaan Studi

Metode pelaksanaan studi meliputi kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, teknik sampling dan teknik analisis data.

1.6.2.1. Kebutuhan Data

Dalam memenuhi kebutuhan data untuk studi ini, maka dilakukan pengumpulan data terhadap objek yang akan diteliti dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan atau permasalahan di kawasan penelitian. data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya/responden dengan cara menyebarkan kuesioner atau melakukan wawancara langsung dengan panduan kuesioner. Adapun hal-hal yang ditanyakan dalam kuesioner adalah yang berkaitan dengan sasaran dari studi ini, yaitu mengidentifikasi karakteristik setiap objek studi untuk mencapai tujuan studi.

Penyebaran kuesioner atau wawancara dilakukan kepada sampel yang menjadi objek studi, yaitu:

1. Pedagang kaki lima yang beraktivitas di Kota Pekanbaru. Pedagang kaki lima yang dimaksud disini adalah pedagang yang berjualan di tempat umum seperti di trotoar, pinggir/bahu/badan jalan, dan di emperan toko pada kawasan fungsional kota seperti pada kawasan perdagangan jasa (komersil), kawasan perkantoran, kawasan permukiman, kawasan pendidikan, serta kawasan wisata pinggiran Sungai Siak. Untuk mengetahui karakteristik pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru.
2. Masyarakat baik sebagai konsumen pedagang kaki lima maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi aktivitas pedagang kaki lima yang terdiri dari pemilik toko,

kantor atau rumah di sekitar lokasi. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL.

3. Penentu Kebijakan yaitu pihak pemerintah Kota Pekanbaru yang diwakili Dinas Pasar selaku penanggung jawab pengelolaan PKL di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, misalnya dengan menyalin atau mengutip data dalam bentuk sudah jadi. Data sekunder diperoleh dari referensi dan informasi yang telah didokumentasi oleh dinas/kantor/instansi terkait, diantaranya berupa gambaran wilayah Kota Pekanbaru dan peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pedagang kaki lima.

1.6.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran kuesioner atau wawancara langsung dengan responden. Pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka. Pertanyaan terbuka berisi pertanyaan yang dapat dijawab secara bebas oleh responden, sedangkan pertanyaan tertutup berisi daftar pertanyaan dimana responden sudah diarahkan memilih alternatif jawaban yang telah ditentukan oleh peneliti.
2. Observasi/pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi pedagang kaki lima dan kondisi lingkungan fisik Kota Pekanbaru. Selain ditulis secara deskriptif hasil observasi juga direkam dengan kamera berupa foto-foto.
4. Dokumentasi, merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan

tersebut. Misalnya jumlah pedagang kaki lima, jumlah penduduk serta kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pedagang kaki lima yang dapat diperoleh dari instansi yang terkait.

1.6.2.3. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data primer yang telah dikumpulkan baik melalui wawancara dan observasi masih merupakan data mentah. Untuk dapat digunakan lebih lanjut data-data tersebut memerlukan suatu pengolahan dan penyajian data yang baik. Adapun langkah yang akan dilakukan dalam teknik pengolahan dan penyajian data ini adalah sebagai berikut:

1. Mengedit (*editing*), pada langkah ini dilakukan pemeriksaan terhadap data-data yang masuk apakah terdapat kekeliruan dalam pengisian atau kurang lengkap, palsu, tidak cocok dan lain sebagainya.
2. Memberi tanda (*coding*), pada langkah ini dilakukan pemberian tanda simbol ataupun kode pada setiap data yang termasuk dalam kelompok yang sama, dimana tanda dapat berupa huruf atau angka.
3. Pentabelan (*tabulating*), pada langkah ini data-data dimasukkan ke dalam tabel-tabel yang telah ditentukan, mengatur angka-angka kemudian menghitungnya. Pada studi ini penyajian data dibuat dalam bentuk tabel distribusi frekwensi, tabel silang, gambar dan grafik. Sedangkan data sekunder telah disajikan secara sistematis, sehingga tidak diperlukan pengolahan lebih lanjut.

1.6.2.4. Teknik Sampling.

Keterbatasan waktu, biaya dan tenaga dalam pelaksanaan studi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian terhadap keseluruhan individu yang membentuk populasi kawasan studi. Untuk mendapatkan kebenaran empiris sesuai fakta di lapangan, studi ini memanfaatkan suatu teknik pengumpulan data primer yang disebut dengan teknik sampling. Dimana akan dilakukan penelitian terhadap sejumlah sampel yang berasal dari populasi yang bersangkutan, yang dapat mewakili fakta yang sebenarnya di lapangan.

Populasi yang akan diteliti adalah pedagang kaki lima dan masyarakat di sekitar kawasan studi. Agar Sampel yang diambil cukup representatif untuk dapat mewakili keseluruhan populasi, maka dipilih cara untuk mendapatkan sampel yang baik. Menurut Mantra dan Kasto (dalam Singarimbun dan Effendi, 1989: 149) pengambilan sampel yang ideal memiliki sifat-sifat yaitu:

- Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti
- Dapat menentukan presisi dari hasil penelitian
- Sederhana hingga mudah dilaksanakan
- Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya.

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan terhadap beberapa objek studi yaitu:

1. Pedagang Kaki Lima

Dalam pelaksanaan studi ini teknik sampling yang digunakan terhadap sampel pedagang kaki lima adalah “teknik random proporsional berlapis” (*stratified proportionate random sampling*). Pada teknik ini, sampel dipilih berdasarkan strata, dengan menetapkan jumlah sampel pada setiap stratumnya (Kartono, 1996). Lokasi Pedagang kaki lima yang

diambil berdasarkan fungsi dari kawasan tersebut, yaitu kawasan perdagangan dan jasa (komersil), kawasan perkantoran, kawasan permukiman, kawasan pendidikan, perbedaan fungsi kawasan dianggap sebagai perbedaan stratumnya . Adapun lokasi yang akan dipilih sebagai responden adalah:

- Untuk kawasan perdagangan dan jasa adalah pada kawasan perdagangan dan jasa Jalan Tuanku Tambusai, dan Jalan Agus Salim dimana pada ruas jalan ini terdapat beberapa departemen store, plaza, pasar tradisional, terminal dan kompleks pertokoan.
- Untuk kawasan perkantoran, yaitu pada jalan Sudirman dan jalan Pepaya, dimana pada jalan ini tidak murni sebagai kawasan perkantoran tetapi bercampur dengan kegiatan perdagangan dan jasa.
- Untuk kawasan pendidikan dan permukiman, dipilih pada jalan Ahmad Dahlan dan Kampus UIR (Universitas Islam Riau).

Menurut Singarimbun (1995: 37) bahwa jumlah sampel dalam penelitian deskriptif adalah antara 5-10% dari jumlah populasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, serta karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka jumlah sampel PKL yang diambil adalah sebanyak $\pm 10\%$ dari jumlah populasi yang diambil secara proporsional dari setiap lokasi yang telah ditentukan. Jumlah sampel di setiap lokasi dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut.

TABEL 1.2.
JUMLAH SAMPEL BERDASARKAN LOKASI

NO	Aktivitas Lingkungan	LOKASI	JUMLAH POPULASI	JUMLAH SAMPEL
1.	Perdagangan dan jasa	Jl. Tuanku Tambusai	210	21
		Jl. Agus Salim	204	20
2.	Perkantoran	Jl. Sudirman	320	32
		Jl. Pepaya	89	9
3.	Pendidikan dan	Jl. KH. Ahmad Dahlan	117	12
	Permukiman	Jl. Kaharudin Nasution (Sekitar Kampus UIR)	63	6
TOTAL			1003	100

Sumber : *Assosiasi pedagang kaki lima dan hasil analisis penulis, 2003*

2. Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat Kota Pekanbaru secara umum sebagai konsumen pengguna jasa pedagang kaki lima, yang terdiri dari masyarakat di sekitar lokasi pedagang kaki lima (pemilik toko/kantor/rumah) yang beraktivitas dan masyarakat yang melakukan transaksi dengan pedagang kaki lima. Pengambilan sampel untuk populasi ini dilakukan dengan teknik "*Accidental Sampling*". Dimana menurut Suhartono (2000:62) pada teknik sampling ini orang yang diambil sebagai sampel adalah merkan yang kebetulan ditemukan, atau mudah ditemui' atau dijangkau. Nawawi (2001: 156), dalam teknik ini peneliti mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui, yang termasuk dalam kriteria populasi penelitian.

Jumlah populasi masyarakat diasumsikan sebagai jumlah penduduk Kota Pekanbaru, sedangkan jumlah sampel ditentukan juga dengan rumus Slovin (dalam Umar, 2001: 78) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = Derajat kecermatan (ditetapkan 10%, sebagai prosentase angka kesalahan)

(Sumber : Umar, 2001: 78)

Dimana nilai N merupakan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yaitu 684.274 jiwa, jadi jumlah sampel adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= 684.274 / 684.274 (0,1)^2 + 1 \\ &= 100 \text{ responden.} \end{aligned}$$

3. Pemerintah Kota Pekanbaru

Dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru diwakili oleh Kepala Dinas Pasar, selaku pejabat yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan PKL.

1.6.2.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan dalam studi ini adalah analisis kualitatif yang didukung oleh analisis kuantitatif

1. Analisis Kualitatif

Analisa kualitatif digunakan dengan tujuan untuk menganalisis keadaan objek studi melalui penjelasan-penjelasan yang logis didasarkan atas teori-teori yang relevan. Metode ini juga diperlukan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di wilayah studi, yaitu gambaran yang tidak bisa dijelaskan dengan angka-angka ataupun dengan hitungan-hitungan. Penekanan analisis ini adalah pada ketajaman dan kepekaan berpikir dalam

mengkaji suatu permasalahan ataupun kecenderungan yang terjadi di lapangan. Analisis dilakukan dengan alat bantu berupa data-data yang didapat dari instansi terkait.

Analisa kualitatif ini juga digunakan untuk mendiskripsikan pendapat (prefrensi) masyarakat dan membuat komparasi yang meliputi:

- a. Deskriptif, yaitu melalui uraian-uraian, pengertian-pengertian maupun penjelasan-penjelasan, baik terhadap komponen analisis yang terukur atau yang bersifat tidak terukur, berdasarkan jawaban dari konsumen yang kemudian diranking dengan tabel dan dicari prosentasinya.
- b. Komparatif, yaitu menganalisis dengan membandingkan antara hasil dari pengamatan studi dengan teori agar diketahui hal-hal yang berhubungan dengan eksisting.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunakan untuk memperjelas hasil analisis dengan bantuan tabel distribusi frekuensi dan analisis tabulasi silang (*cross tabulation*). Analisis distribusi frekuensi digunakan untuk menggambarkan aktivitas pedagang kaki lima, juga persepsi dan preferensi mereka terhadap ruang aktivitasnya, serta persepsi dan preferensi masyarakat terhadap aktivitas pedagang kaki lima pada suatu ruang.

Analisis tabulasi silang (*cross tabulation*) digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara variabel-variabel penelitian sehingga dapat diketahui hubungan antara variabel tersebut. Analisis dikerjakan secara bertahap, mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a) Membuat interpretasi data dengan cara membuat pengelompokan data atau kategorisasi.

Kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan sementara dari hasil diskusi antar data pada setiap data.

- b) Menguji keterkaitan antara variabel-variabel yang berasal dari dua faktor yang terkait, yaitu keterkaitan antara faktor perubah tanggapan (*independent factors*) dengan faktor perubahan penjasar (*dependent factors*). Perhitungan tabulasi silang dilakukan dengan menyusun beberapa variabel kedalam suatu matriks.

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan lainnya dilakukan uji statistik *chi square* (χ^2). Dalam penelitian ini tingkat signifikasi (*signicant level*) yang dipakai adalah 0,05, dengan kemungkinan kesalahan sebesar 5% tidak akan berpengaruh banyak terhadap penerapan teori karena hasil penelitian ini tidak bersifat aplikatif. Apabila χ^2 hasil uji statistik pearson lebih besar dari pada harga titik kritis pada tabel *Chi-Square* (hasil perhitungan signifikan kurang dari 0,05), maka hipotesa (H_0) yang menyatakan antara tidak bersifat aplikatif. Apabila χ^2 hasil uji statistik Pearson lebih besar dari pada harga titik kritis pada tabel *Chi-Square* (hasil perhitungan signifikan kurang dari 0,05), maka hipotesa (H_0) yang menyatakan antara variabel yang diuji tidak ada hubungan, ditolak. Berarti ada hubungan antara variabel-variabel yang diuji (hipotesa alternatif (H_a) yang diterima). Dan apabila yang terjadi sebaliknya (signifikan lebih dari 0,05), maka disimpulkan tidak ada hubungan antar variabel yang diuji. Hipotesa berlaku pada setiap kali analisa tabulasi silang dilakukan.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan studi ini terdiri dari 5 bab, dimana setiap bab terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, sasaran, dan manfaat studi, ruang lingkup materi dan spasial studi, kerangka pikir penelitian, pendekatan dan metode pelaksanaan studi yang mencakup pendekatan studi, kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, teknik sampling, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ELEMEN FISIK LINGKUNGAN.

Berisi kajian teori yang ada relevansinya dengan substansi penelitian, meliputi pengertian dan karakteristik pedagang kaki lima, elemen-elemen fisik lingkungan, rangkuman kajian teori dan definisi operasional variabel studi.

BAB III : GAMBARAN UMUM PKL DI KOTA PEKANBARU.

Berisi gambaran umum Kota Pekanbaru, meliputi peran dan fungsi kota, kebijakan penataan ruang Kota Pekanbaru, kependudukan, Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penataan PKL dan gambaran umum karakteristik PKL di Kota Pekanbaru.pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru.

BAB IV : PENGARUH KEBERADAAN PKL TERHADAP FISIK LINGKUNGAN KOTA PEKANBARU.

Berisi tentang identifikasi karakteristik aktivitas PKL, identifikasi elemen fisik lingkungan Kota Pekanbaru, analisis hubungan karakteristik aktivitas PKL dan elemen fisik lingkungan, analisa pengaruh keberadaan PKL terhadap fisik lingkungan dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL.

UPT-PUSTAK-UNDIP

BAB V : PENUTUP

Berisi temuan dari studi dan kesimpulan yang menjawab *reseach question* yang diangkat. Berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian dibuat rekomendasi untuk studi lanjutan berkaitan dengan aktivitas PKL.

BAB II

KAJIAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ELEMEN FISIK LINGKUNGAN

2.1. Pedagang Kaki Lima

2.1.1. Pengertian dan Ciri Pedagang Kaki Lima

Istilah pedagang kaki lima (PKL) berasal dari zaman Raffles yaitu “5 (five) feets” yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar 5 (lima) kaki atau sama dengan lebih kurang satu setengah meter (Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 1980 dalam Widodo, 2000: 26). Area pejalan kaki tersebut kemudian dipakai sebagai tempat berjualan oleh pedagang-pedagang kecil seperti warung makan, tambal ban dan lain-lain.. Sehingga pedagang kaki lima dapat didefinisikan sebagai pedagang yang berjualan pada kaki lima dan biasanya mengambil lokasi berdagang di pusat keramaian umum.

Purwanto (dalam Hany, 2002: 25) mengatakan bahwa pedagang kaki lima adalah suatu bentuk aktivitas perdagangan yang tidak menetap dan biasanya berlokasi di area jalur pejalan kaki. Mc Gee dan Yeung (1977: 25) menyatakan bahwa pedagang kaki lima sama dengan *Hawker*, yang didefinisikan sebagai kelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar, dalam pengertian ini termasuk orang yang menawarkan barang dan jasa dari rumah ke rumah. Dalam Peraturan Daerah Pekanbaru No. 11 tahun 2001 pada pasal 1 pengertian dari pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan jasa di tempat umum dengan menggunakan usaha dagang. Namun dalam perkembangannya pedagang kaki lima tidak hanya menempati trotoar atau pinggiran jalan saja, tapi juga menempati ruang-ruang publik lainnya seperti jalur-jalur pejalan kaki, areal parkir, ruang-ruang terbuka, taman, terminal, bahkan di perempatan jalan.

Pedagang kaki lima sebagai salah satu kegiatan ekonomi di sektor informal yang cukup fenomenal keberadaannya, mempunyai karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan karakteristik sektor informal, menurut Manning (1996) secara garis besar karakteristik pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

1. Tidak terorganisir dan tidak mempunyai izin
2. Tidak memiliki tempat usaha yang permanen
2. Tidak memerlukan keahlian dan keterampilan khusus
3. Modal dan perputaran usahanya berskala relatif kecil.
4. Sarana berdagang bersifat *moveable*, mudah dipindahkan

Karakteristik pedagang kaki lima juga telah dirumuskan oleh Julius An-naf (dalam Hany, 2002: 27) sebagai berikut:

1. Bagi pedagang kaki lima, aktivitas berdagang merupakan pekerjaan pokok
2. Pedagang kaki lima umumnya tergolong angkatan kerja produktif
3. Tingkat pendidikan mereka pada umumnya relatif rendah
4. Sebagian besar pedagang merupakan pendatang dari luar daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota
5. Mereka berdagang sudah cukup lama
6. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omzet penjualan juga relatif kecil.
7. Umumnya mereka memiliki sendiri usahanya dan belum ada hubungan dengan bank
8. Kurang mampu memupuk modal
9. Umumnya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder.
10. Tingkat pendapatan relatif kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup di perkotaan.
11. Pada hakekatnya mereka terkena pajak, seperti retribusi /pungutan tidak resmi.

2.1.2. Pelaku Pedagang Kaki Lima

Ketimpangan pembangunan antara desa dan kota telah menjadi faktor pendorong migrasi desa-kota. Kesenjangan upah, daya tarik kota dan tekanan di desa itu sendiri menyebabkan kehidupan di kota menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin menyelamatkan diri dari tekanan kemiskinan di desa (Rachbini dan Hamid, 1994: 31). Mc Gee (1971) mengatakan bahwa munculnya masalah ketenagakerjaan di kota-kota Indonesia adalah sebagai akibat dari urbanisasi semu (*pseudo urbanization*) dimana proses urbanisasi tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi di negara berkembang.

Fenomena tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja di kota namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor formal yang akhirnya memunculkan sektor informal (Ramli, 1992: 31). Seperti yang dikatakan para ahli di negara maju para pekerja kebanyakan terserap di sektor industri karena industrialisasi lahir mendahului urbanisasi, sedang di negara berkembang kebanyakan pencari kerja mencari pekerjaan di sektor informal (Hart, 1973; Sethuraman, 1981; Mazumdar, 1984; Hidayat, 1983, dalam Effendi, 1985).

Pedagang kaki lima, yang merupakan pekerjaan nyata dan diminati di kota-kota besar merupakan salah satu kegiatan di sektor informal. Berdasar pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa pelaku pedagang kaki lima sebagian besar berasal dari kaum migran. Hal ini sesuai pendapat Manning dan Effendi (1996: 51) menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman di negara berkembang pada umumnya pedagang kaki lima terdiri dari kaum migran. Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewan Riset Nasional (1994, dalam Widodo: 30) di 4 (empat) kota di Indonesia diketahui bahwa 80,3 % dari pedagang kaki lima adalah migran.

2.1.3. Hubungan Sektor Informal dan Pedagang Kaki Lima

Sektor informal perkotaan di Indonesia pada kurun waktu terakhir ini menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Menurut Ramli (1992: 19) pertumbuhan penduduk yang cepat pada kota di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh urbanisasi dan pemekaran kota, keadaan ini menyebabkan perluasan kesempatan kerja di sektor formal kurang mampu menyerap penambahan angkatan kerja. Sebagai akibatnya kelebihan angkatan kerja yang tidak tertampung, mengalir dan mempercepat tumbuhnya sektor informal. Sama halnya dengan pendapat Effendi (1995: 87) bahwa penambahan jumlah angkatan kerja di kota sebagai akibat dari migrasi desa-kota yang lebih pesat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja, yang menyebabkan terjadi pengangguran, yang diikuti dengan membengkaknya sektor informal di kota.

Salah satu kegiatan di sektor informal adalah pedagang kaki lima, yang merupakan salah satu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting dikebanyakan negara-negara berkembang. Kegiatan pedagang kaki lima ini menjadi bagian penting dan khas dalam sektor informal, sehingga istilah sektor informal sering diidentikkan dengan pedagang kaki lima (Ramli, 1992: 31). Namun demikian pedagang kaki lima hanya sedikit memperoleh perhatian akademik dibandingkan dengan kelompok pekerjaan utama lainnya. Hal ini menyebabkan pedagang kaki lima hanya digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran yang luas, ataupun sebagai pekerjaan sektor tersier sederhana yang bertambah secara luar biasa di dunia ketiga (Paul Bairoch dalam Ramli, 1992: 31).

Menjadi pedagang kaki lima dianggap cara termudah untuk mempertahankan hidup, karena tidak memerlukan persyaratan khusus seperti halnya pada sektor formal, fleksibel dalam waktu dan tempat beroperasi, bergantung pada sumber daya lokal dan

skala usaha relatif kecil. Walaupun pedagang kaki lima telah mampu memberi kontribusi baik dalam meningkatkan pendapatan masyarakat maupun dalam mengurangi jumlah pengangguran di kota, tetapi banyak pejabat kota ataupun elite kota memandang pedagang kaki lima sebagai gangguan yang menyebabkan kota menjadi kotor dan tidak rapi, kemacetan lalu lintas, gangguan pejalan kaki, saingan pedagang toko yang tertib dan membayar pajak, serta penyebaran penyakit lewat kontak fisik dan penjualan makan kotor dan basi (Ramli, 1992: 19).

2.2. Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima

2.2.1. Jenis Barang Dagangan Pedagang Kaki Lima

Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 82-83), jenis dagangan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana mereka beraktivitas. Misalnya di kawasan perdagangan, maka barang yang diperdagangkan juga beraneka ragam, seperti makanan dan minuman, barang kelontong, pakaian dan lain sebagainya.

Adapun jenis dagangan yang ditawarkan pedagang kaki lima dapat bagi dalam 4 (empat) kelompok utama, yaitu:

1. Makanan yang tidak dan belum diproses, seperti daging, buah-buahan dan sayuran.
2. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya.
3. Barang bukan makanan, mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
4. Jasa yang terdiri dari beragam aktivitas, misalnya tukang cukur, bengkel dan lain sebagainya.

2.2.2. Sarana Fisik Aktivitas Pedagang Kaki Lima

Sarana fisik yang digunakan pedagang kaki lima dalam beraktivitas sangat beragam. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc. Gee dan Yeung (1977: 82-83) di kota-kota di Asia Tenggara, diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana fisik yang digunakan sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindahkan atau dibawa dari suatu tempat ketempat lain, selain itu juga dipengaruhi oleh jenis barang dagangan.

Menurut Waworoentoe (1973, dalam Widjayanti, 2000: 39-40) bentuk sarana yang digunakan oleh pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

1. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari dua macam yaitu, gerobak/kereta dorong tanpa atap dan yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam aktivitas pedagang kaki lima yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), umumnya dijumpai pada pedagang makanan, minuman dan rokok.
2. Pikulan/keranjang, sarana perdagangan ini digunakan oleh pedagang keliling (*mobil hawkers*) atau semi permanen, yang biasa digunakan oleh pedagang barang dan minuman. Sarana ini dimaksud agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.
3. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain/plastik. Berdasarkan bentuk sarana tersebut pedagang kaki lima ini dikategorikan pedagang permanen (*static*), yang umumnya digunakan oleh pedagang makanan dan minuman.

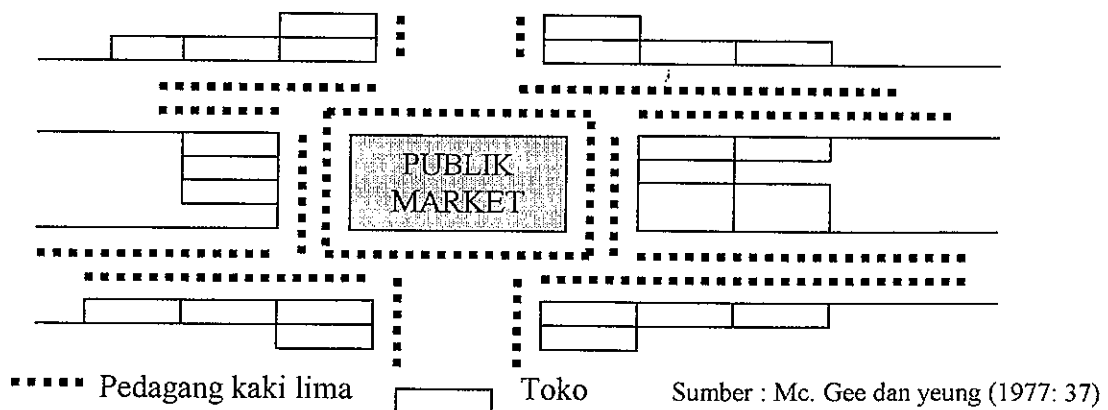
4. Kios, sarana ini menggunakan papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal di tempat tersebut. Pedagang kaki lima ini dikategorikan sebagai pedagang menetap.
5. Gelaran/alas, dimana sarana yang digunakan berupa gelaran tikar untuk alas barang yang diperdagangkan. Pedagang ini dikategorikan semi permanen, biasa digunakan oleh pedagang makanan/minuman, sayuran atau barang kelontong.

2.2.3. Pola Sebaran Pedagang Kaki Lima

Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977) pola sebaran pedagang kaki lima dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pola sebaran mengelompok (*Focus agglomeration*)

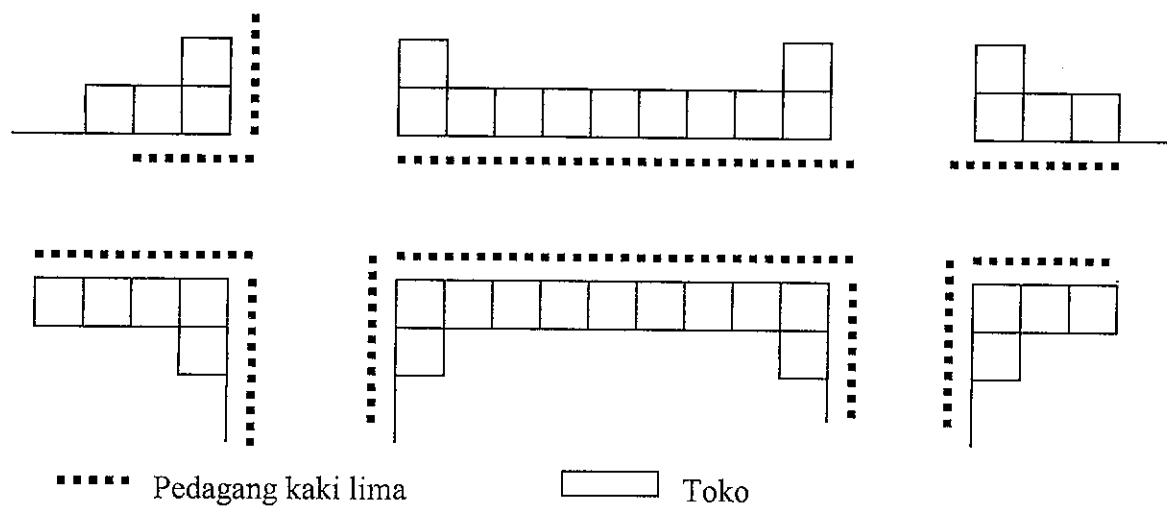
Pada type ini pedagang umumnya terdapat pada ujung jalan, ruang-ruang terbuka, sekeliling pasar, ruang-ruang parkir taman dan tempat umum lainnya. Pola ini dipengaruhi oleh adanya pertimbangan aglomerasi, yaitu suatu pemusatan atau pengelompokan pedagang sejenis atau pedagang yang mempunyai sifat komoditas yang sama atau menunjang.



GAMBAR 2.1.
CONTOH POLA PENYEBARAN MENGELOMPOK
(FOCUS AGLOMERATION)

2. Pola sebaran memanjang (*Linier Concentration*)

Pada pola penyebaran memanjang atau *linier concentration*, pedagang terdapat di sepanjang jalan atau di pinggir jalan utama (*main street*), juga pada jalan yang menghubungkan jalan utama. Jadi pola penyebaran ini ditentukan oleh pola jaringan jalan di daerah tersebut. Aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan sangat mempengaruhi pola penyebaran memanjang ini, karena menguntungkan bagi pedagang dalam mencapai konsumen.



Sumber : Mc. Gee dan Yeung (1977: 76)

GAMBAR 2.2.
CONTOH POLA PENYEBARAN MEMANJANG
(LINIER CONCENTRATION)

2.2.4. Pola Pelayanan Pedagang Kaki Lima

1. Fungsi pelayanan pedagang kaki lima

Fungsi pelayanan pedagang kaki lima dapat ditentukan dari dominasi kuantitatif jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Suatu lokasi aktifitas pedagang kaki lima dapat memiliki lebih dari satu fungsi. Ada tiga fungsi pelayanan yaitu:

- Fungsi pelayanan perdagangan dan jasa, pedagang kaki lima merupakan bagian dari sistem perdagangan kota, khususnya perdagangan eceran. Dalam hal ini pedagang kaki lima berfungsi memasarkan hasil produksi suatu barang dan jasa.
- Fungsi pelayanan rekreatif, dimana pedagang kaki lima berfungsi sebagai hiburan yang bersifat rekreatif. Fungsi ini didapat dari suasana pelayanan yang diberikan seperti pada lokasi-lokasi rekreasi dan tempat-tempat hiburan
- Fungsi pelayanan sosial ekonomi, yang dilihat berdasarkan pandangan masing-masing pelaku yang terlibat di dalamnya. Misalnya dari pandangan pedagang, aktifitas ini merupakan sumber pendapatan, bagi konsumen aktifitas ini membantu dalam penyediaan barang dan jasa dengan harga yang relatif murah, sedangkan dari pandangan pemerintah aktifitas ini sedikit banyak telah membantu dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan dan pemerataan pendapatan.

2. Skala Pelayanan Pedagang Kaki Lima

Skala pelayanan aktivitas jasa pedagang sektor informal dapat diketahui dari pengguna jasa. Menurut Manning dan Effendi, 1996: 366-372) besar kecilnya skala pelayanan tergantung dari jauh dekatnya pengguna jasa tersebut. Semakin dekat asal pengguna jasa berarti skala pelayanan juga kecil, sebaliknya semakin jauh asal pengguna jasa berarti skala pelayanan juga semakin besar.

3. Sifat Pelayanan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima dilihat dari sifat pelayanannya menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 82) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni:

a. Pedagang menetap (*static*)

Pedagang static merupakan suatu bentuk pelayanan yang bersifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Disini setiap konsumen harus datang sendiri ke lokasi dimana pedagang berada.

b. Pedagang semi menetap (*semi static*)

Pada type pedagang semi static bentuk layanan pedagang bersifat menetap sementara atau hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Dalam hal ini pedagang akan menetap bila ada kemungkinan mendapat konsumen yang cukup banyak, misalnya saat jam istirahat/pulang sekolah, saat ada keramaian. Bila tidak ada kemungkinan konsumen yang cukup besar, maka pedagang tersebut akan berkeliling.

c. Pedagang keliling (*mobile*)

Pedagang keliling merupakan suatu bentuk layanan, dimana pedagang berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Pedagang keliling ini biasanya volume dagangannya relatif kecil.

4. Waktu Pelayanan Aktivitas Pedagangan Kaki Lima

Aktivitas pedagang kaki lima dalam satu hari terbagi dalam beberapa periode (Mc. Gee dan Yeung, 1977: 89). Dengan adanya pembagian waktu dalam menjalankan aktivitasnya menunjukkan bahwa pedagang kaki lima tidak menghabiskan waktu sehari penuh dalam beraktivitas.

2.2.4. Ruang Aktivitas Pedagang Kaki Lima

Pengertian ruang dalam Undang-undang No. 24/92 adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan ruang aktivitas adalah suatu wadah atau ruang yang terbentuk oleh elemen arsitektural, yang di dalamnya terkandung dan terdapat fungsi, maksud, tujuan dan kehendak manusia (Ashihara, 1983).

MC. Gee dan Yeung (1977: 61) berpendapat bahwa pedagang kaki lima pada umumnya cenderung untuk beraktivitas secara berkelompok pada suatu area yang memiliki tingkat intensitas aktivitas yang tinggi, seperti pusat-pusat hiburan, pasar, taman maupun pada simpul-simpul jalur transportasi. Sama halnya dengan pendapat Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996: 232) berdasarkan penelitiannya mengenai pedagang sektor informal di Cali, Colombo, dimana para pedagang sektor informal dijumpai di semua sektor kota, terutama berpusat di tengah kota dan pusat-pusat hiburan lainnya ketika ada pertunjukan sehingga menarik sejumlah besar penduduk.

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima cenderung memilih ruang tempat beraktivitasnya pada lokasi-lokasi strategis yang tingkat kunjungannya tinggi seperti pusat-pusat aktivitas di suatu kota. Kecenderungan ini berkaitan dengan salah satu fungsi pemasaran yakni mendekatkan komoditi kepada konsumen (*place utility*). Seperti yang dikatakan Ramli (1992: 38) pedagang kaki lima selalu berusaha agar barang dagangannya terjual, untuk itu memilih tempat berjualan yang umum dan banyak didatangi pengunjung seperti jalan raya, emper-emper toko dan pasar-pasar.

Shirvani (1985: 37) mengungkapkan bahwa aktivitas pedagang kaki lima di perkotaan merupakan pendukung aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang ada (*activity*

support). Dimana aktivitas pedagang kaki lima muncul karena adanya aktivitas-aktivitas fungsional kota. Seperti yang diungkapkan Rachbibi dan Hamid (1994: 90-91) dalam observasinya mengenai pedagang kaki lima di Jakarta dan Surabaya, ditemukan adanya kecendrungan bahwa setiap berdiri gedung bertingkat di jalan Sudirman Jakarta maka muncullah sejumlah pedagang kaki lima berderet sepanjang jalan. Aktivitas pedagang kaki lima ini bertujuan untuk melayani para karyawan atau pegawai yang bergaji rendah. Jadi dimana ada aktivitas-aktivitas fungsional, pedagang kaki lima siap menawarkan jasanya yang juga mendukung aktivitas utama tersebut.

Sesuai dengan uraian di atas, dapat terlihat pada kenyataan pedagang kaki lima pada umumnya menempati ruang umum atau ruang privat yang ada di kota. Ruang umum atau disebut juga ruang publik merupakan tempat berkumpulnya warga kota untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperkuat ikatan sebagai suatu komunitas (Carr, 1995, Madanipour, 1996, Tibbalds, 1992). Ruang umum merupakan ruang milik pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Seperti trotoar, taman kota, ruang terbuka termasuk fasilitas atau sarana kota seperti halte, jembatan penyeberangan dan lain sebagainya. Ruang privat adalah ruang yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, misalnya lahan pribadi yang dimiliki oleh pemilik toko, perkantoran dan lain-lain. Penggunaan ruang-ruang ini kemudian menjadi *conflict of interest* atau permasalahan-permasalahan yang timbul akibat keberadaan pedagang kaki lima mulai dari pemanfaatan ruang publik sampai kepada kemerosotan fisik kota.

2.3. Elemen Fisik Lingkungan

Pengertian lingkungan menurut Sujarto (1991) merupakan suatu kelompok rumah tangga/keluarga atau dibentuk oleh beberapa kegiatan fungsional sehingga membentuk suatu kawasan fungsional. Seperti kawasan perdagangan, kawasan perkantoran dan lain sebagainya. Secara umum ditinjau dari pola tata ruang lingkungan akan mengandung 5 (lima) komponen pokok sebagai unsur kehidupan yang satu sama lainnya mempunyai hubungan saling bergantung yaitu:

- Wisma, adalah tempat tinggal atau perumahan
- Karya, adalah tempat bekerja atau berkegiatan usaha
- Marga, adalah jaringan pergerakan, jaringan jalan perangkutan yang menghubungkan antara berbagai kegiatan fungsional.
- Suka, adalah tempat rekreasi dan hiburan
- Penyempurna, adalah sarana utilitas dan pusat pelayanan kegiatan sosial.

Aspek fisik lingkungan yang erat kaitannya dengan *urban desain* atau perancangan kota, dimana urban desain menyangkut seluruh dari elemen kota baik secara fisik maupun non fisik. Berdasarkan hal tersebut maka dalam konteks penelitian untuk mengetahui pengaruh keberadaan PKL terhadap fisik lingkungan, perlu dikemukakan kerangka urban desain yang dijadikan acuan dalam menentukan elemen fisik lingkungan yang akan dibahas.

Menurut Harastoeti (dalam Tatanan, 1990: 50) semua objek yang kita lihat merupakan elemen dalam rancangan kota (urban desain), karena semuanya mempengaruhi gambaran visual, baik sebagai objek yang berdiri sendiri maupun sebagai objek yang mempunyai hubungan satu sama lainnya. Elemen-elemen tersebut tidak hanya harus berfungsi, tetapi juga harus menampilkan keindahannya, dimana bila digabungkan

bentuk yang mempunyai dua kualitas permukaan yaitu tekstur dan warna, serta bentuk tiga dimensi berupa massa dalam ruang. Dengan demikian elemen-elemen rancang kota juga merupakan elemen dari lingkungan fisik.

Menurut Sujarto (1981) *urban design* merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam rangkaian proses perencanaan kota yang mempertimbangkan aspek fisik penataan ruang kota. Perancangan kota adalah proses dan hasil pengorganisasian dan pengintegrasian seluruh komponen lingkungan baik alam maupun buatan, sedemikian rupa, sehingga akan meningkatkan citra setempat dan perasaan berada di suatu tempat. (*sense of place*) (Dannenbrink dalam Branch, 1995 : 200). Menurut Shirvani (1985: 6) *urban design* adalah bagian dari proses perencanaan yang tergantung pada kualitas fisik lingkungan. Adapun elemen-elemen pembentuk fisik kota menurut Shirvani (1985: 7) adalah tata guna lahan, bentuk dan masa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, jalur pejalan kaki/pedestrian, pendukung kegiatan, tanda-tanda dan preservasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas pada penelitian ini elemen fisik lingkungan yang akan dibahas selanjutnya yang berdasarkan pada lingkup dari lingkungan fisik kota yaitu penampilan visual, kualitas estetika, dan karakter spasial, dan kriteria *urban design* yang terkait dengan keberadaan PKL yaitu: fungsi ruang, bentuk massa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, dan pedestrian .

2.3.1. Tata Guna Lahan

Tata guna lahan merupakan pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan terbaik dalam mengalokasikan fungsi tertentu, sehingga secara umum dapat memberikan gambaran keseluruhan bagaimana daerah-daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi (Darmawan, 2003: 12). Penentuan tata guna lahan dapat menciptakan

hubungan antara sirkulasi atau parkir, mengatur kepadatan kegiatan atau penggunaan lahan kota. Pengendalian guna lahan yang tidak sesuai, diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Pada masa lampau terdapat dua masalah utama dalam kebijakan-kebijakan tata guna lahan yaitu kurangnya perbedaan penggunaan lahan dalam kawasan kota, dalam arti pemilahan penggunaan lahan kota yang belum jelas, dan kegagalan mempertimbangkan faktor lingkungan dan faktor alam kota.

2.3.2. Bentuk dan Massa Bangunan

Bentuk dan massa bangunan meliputi aspek-aspek bentuk fisik, ketinggian, pemunduran/*setbacks*, dan penutupan/*coverage* (Shirvani, 1985: 11). Disamping itu faktor penampilan maupun konfigurasi dari masa bangunannya yang meliputi warna, material, tekstur, tampak dan bentuknya yang erat kaitannya dengan estetika juga perlu diperhatikan. (Shirvani, 1985: 11). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada uraian berikut ini:

- **Bentuk fisik**, untuk mengartikan pembentukan massa bangunan dalam bagian-bagian utamanya (Orr dalam Widjajanti, 2000: 4). Dalam kaitan dengan bentuk-bentuk ini, dikenal berbagai macam bentuk yang sering kali dipakai sebagai perwujudan fisik dari bangunan-bangunan (Soetiadji S, 1986: 13). Adapun bentuk-bentuk dari perwujudan fisik bangunan diantaranya bentuk persegi, bentuk bulat dan bundar, bentuk segitiga, bentuk trapesium dan lainnya, dimana masing-masing bentuk akan memberikan kesan tersendiri.
- **Ketinggian bangunan**, menurut Shirvani (1985: 14) harus terjadi keterpaduan massa, dimana satu bangunan tidak menutupi bangunan lainnya agar tidak terjadi kerusakan tampilan visual kawasan.

- **Tampilan bangunan**, tampilan bangunan terkait erat dengan nilai estetika yang ditimbulkan. Keserasian tampilan juga sangat dipengaruhi oleh warna, tekstur dan material yang digunakan. Nilai-nilai estetis dari tampilan bangunan dapat dipancarkan dari 3 (tiga) sumber utama (Soetiadji 198: 7) yaitu:
 - Dari sosok bangunan itu sendiri, yaitu bagaimana bentuk dasar, bentuk kerangka bangunan melalui proses penyesuaian dengan lingkungan yang akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa sosok bangunan tersebut memenuhi kriteria-kriteria fisik dan fungsi.
 - Dari olahan tampak bangunan, yang merupakan olahan dari tampak atau wajah yang akan ditampilkan kepada penonton atau pengunjung bangunan tersebut.
 - Dari olahan lingkungan di sekitar bangunan, dimana bangunan dan lingkungan mempunyai hubungan timbal balik yang erat sekali yang bahkan saling mempengaruhi. Citra estetika yang dimiliki bangunan akan kurang berarti, bila tidak serasi dengan citra estetika yang dipancarkan oleh lingkungannya. Sebaliknya citra estetika lingkungan justru terbentuk oleh adanya akumulasi estetika yang dipancarkan bangunan-bangunan yang membentuk lingkungan tersebut., disamping nilai-nilai estetika yang memang di terpancar dari lingkungan tersebut. Jadi terlihat bahwa anatara estetika bangunan dan lingkungan selalu terjadi interaksi yang kuat.
 - Selain itu keindahan juga dapat diciptakan dari keindahan bentuk yang memenuhi syarat-syarat keterpaduan, keseimbangan, proporsi dan skala, serta keindahan ekspresi yang timbul dari pengalaman visual (Ishar dalam Widjajanti, 2000: 49). Dalam *teori place* Cullen (dalam Zahnd, 1999: 17) mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi keindahan sebuah *place* yaitu orientasi, posisi dan lokasi.

2.3.3. Sirkulasi Dan Parkir

Masalah sirkulasi kota merupakan suatu keterkaitan antara prasarana jalan yang tersedia, bentuk setiap struktur kota, fasilitas pelayanan umum yang berpengaruh terhadap padatnya kegiatan dan masalah jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat, disamping itu perilaku masyarakat kota yang memanfaatkan jalan tersebut (Shirvani, 1985: 26). Keberadaan sistem sirkulasi/penghubung ini terkait erat dengan keragaman aktivitas pada suatu ruang perkotaan karena berfungsi sebagai penghubung antara suatu ruang aktifitas dengan ruang aktivitas lainnya. Ada empat prinsip utama dalam menangani masalah sirkulasi yaitu:

- Ruang terbuka yang memiliki pemandangan yang baik antara lain bersih dan elemen landscape menarik
- Persyaratan ketinggian dan sempadan bangunan yang berdekatan dengan jalan
- Pengaturan parkir dipinggir jalan, dan tanaman yang berfungsi sebagai penyekat jalan
- Meningkatkan lingkungan alami yang terlihat dari jalan.

Shirvani (1985: 22) mengemukakan empat prinsip utama dalam penataan parkir di perkotaan sebagai berikut:

- Setiap adanya aktivitas atau pembangunan gedung-gedung harus dilengkapi dengan ruang untuk parkir kendaraan.
- Program Multiguna, dengan melakukan kerjasama pemanfaatan ruang parkir untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Sebagai contoh ruang parkir gedung kantor, malam harinya dimanfaatkan untuk ruang parkir gedung pusat perbelanjaan yang ada disekitarnya.
- Pembangunan areal parkir dapat berupa taman parkir atau gedung parkir.

- Pembangunan areal parkir pada pinggiran kota sebagai penampungan kendaraan bagi mereka yang akan bepergian ke pusat kota. Misalnya masyarakat yang tinggal di pinggiran kota, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, diwajibkan untuk memarkir kendaraannya di areal parkir tersebut, kemudian menggunakan kendaraan umum ke pusat kota.

2.3.4. Ruang Terbuka

Ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka (Budiharjo dan Sujarto, 1998: 53). Menurut Shirvani (1985: 27) ruang terbuka menyangkut semua landsekap, elemen keras (seperti jalan, trotoar dan lainnya), taman, dan ruang rekreasi di kawasan kota. Selain itu ruang terbuka juga meliputi taman, lapangan hijau, ruang hijau kota, pohon-pohon, pagar tanaman, air, tempat sampah, penerangan jalan, kios-kios dan sebagainya.

Pada penelitian ini ruang terbuka yang dimaksud, dibatasi hanya pada ruang-ruang aktivitas PKL yaitu trotoar, jalan, pelataran parkir dan di atas saluran.

2.3.5. Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian)

Berjalan kaki merupakan alat untuk pergerakan interval kota, satu-satunya alat untuk memenuhi kebutuhan interaksi tatap muka yang ada di dalam aktivitas komersial dan kultural di lingkungan kehidupan perkotaan (John Fruin, 1979). Menurut Shirvani (1985: 313) sistem pedestrian yang baik akan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan di kawasan pusat kota, mempertinggi kualitas lingkungan melalui sistim perancangan yang manusiawi, menciptakan kegiatan pedagang kaki lima yang lebih banyak dan juga meningkatkan kualitas udara di kawasan tersebut.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa berjalan kaki memerlukan suatu ruang kota, merupakan bagian dari sistem transportasi yang memerlukan keterpaduan dengan sistem lain sehingga terjalin kesinambungan dengan elemen transportasi lain seperti parkir, halte dan sebagainya.

Aktivitas pejalan kaki membutuhkan persyaratan antara lain (Rubenstein, dalam Julianingsih 2002: 27):

- Aman, mudah/leluasa bergerak dan cukup terlindung dari lalu lintas kendaraan.
- Menyenangkan dengan rute-rute pendek dan jelas serta bebas hambatan dan keterlambatan waktu yang diakibatkan kepadatan pejalan kaki.
- Mudah dilakukan ke segala arah, tanpa kesulitan, hambatan dan gangguan yang disebabkan ruang yang sempit, permukaan lantai naik turun dan sebagainya.
- Pada tempat-tempat tertentu diberikan elemen yang dapat menimbulkan daya tarik seperti elemen estetika, lampu penerang jalan, lansekap dan lain-lain.

Sedangkan aspek tatanan fisik, bentuk dan ruang akan memberikan pengalaman tempat (*experience of place*) pada para penggunanya. Apabila mengacu pada keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468 tahun 1998, sebagai bagian ruang publik sebaiknya ruang pejalan kaki juga bersifat aksesibel, yang meliputi empat asas yaitu kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian. Berdasarkan standar spesifikasi trotoar dari Departemen Pekerjaan Umum, lebar trotoar yang dibutuhkan disesuaikan dengan peruntukan lahannya, dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini.

TABEL II.1.
STANDAR BESARAN TROTOAR (DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM)

Penggunaan Lahan di Sekitarnya	Lebar Minimum (M)
• Perumahan	1,5
• Perkantoran, industri, sekolah, terminal, pertokoan/perdagangan	2,0
• Jembatan/terowongan	1,0

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga dan Pembinaan Jalan Dept. PU

Karakteristik jalur pedestrian berdasarkan fungsinya dapat dilihat pada tabel II.2 berikut:

TABEL II.2.
KARAKTERISTIK PEDESTRIAN

No	Nama Jalur Pedestrian	Fungsi / kegunaan	Karakteristik
1.	Trotoir	Berjalan kaki dipinggir jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Arah jelas • Lokasi ditepi jalan bebas hambatan • Permukaan rata (max 5%) lebar 1,50-2,00m
2.	Jalur Penyebrangan (zebra Cross)	Menghindarkan konflik dengan kendaraan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyilang diatas jalan, dilengkapi traffic light. • Lebar 2,00-4,00 m • Frekwensi tertentu
3.	Plaza	Kegiatan santai dan berekreasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bebas kendaraan • Space lapang • Lebar bervariasi • Ada fasilitas
4.	Hall	Tempat pejalan kaki dikawasan perbelanjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Terpisah dari jalur kendaraan • Dipertokoan • Plaza kecil • Lebar bervariasi. • Ada fasilitas
5.	Subway	Tempat berjalan kaki yang menghubungkan antar bangunan dibawah tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Berupa terowongan bawah tanah. • Dilengkapi pengkondisian udara dan penerangan • Bebas lalu lintas kendaraan.

Sumber : Trancik dalam Julianingsih, 2002.

2.4. Pedagang Kaki Lima dalam Rencana Tata Ruang Kota.

Dalam Undang-undang No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, pengertian tata ruang adalah wujud struktural dan pola penataan ruang, baik direncanakan atau tidak. Menurut Rapoport (dalam Sujarto, 1992: 5), tata ruang merupakan suatu artian harfiah dari "spatial", yaitu segala sesuatu yang dipertimbangkan berdasarkan keruangan. Sedangkan menurut Danujo (Sujarto, 1992 : 6) menyatakan bahwa tata ruang merupakan bagian-bagian ruang yang disediakan untuk digunakan sebagai tempat benda-benda kegiatan dan perubahan. Untuk lebih jelasnya terlebih dahulu harus diketahui elemen-elemen pembentuk suatu wilayah sebagai berikut:

1. Kumpulan dari pelayanan jasa termasuk didalamnya perdagangan, pemerintahan, keuangan, yang cenderung terdistribusi secara kelompok dalam pusat pelayanan.
2. Kumpulan dari industri sekunder pergudangan dan perdagangan grosir yang cenderung untuk berkumpul pada suatu tempat.
5. Lingkungan pemukiman sebagai tempat tinggal dari manusia dan ruang terbuka hijau.
6. Jaringan transportasi yang menghubungkan tempat-tempat tersebut di atas.

Kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang contohnya Indonesia, sering kali hanya memperhatikan indikator-indikator atau elemen-elemen kota yang bersifat formal dalam perencanaannya. Hal ini akhirnya memicu munculnya kegiatan-kegiatan sektor informal, misalnya pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima yang pada awalnya merupakan suatu peluang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kemudian karena kurangnya pengendalian akhirnya menimbulkan permasalahan bagi kota.

Demikian pula halnya di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2000 tentang penataan dan pembinaan PKL, yang tidak diikuti dengan pedoman penataan fisik PKL, dan penetapan ruang bagi aktivitas PKL.

2.5. Rangkuman Kajian Teori

Berdasarkan uraian kajian teori mengenai pedagang kaki lima diatas maka dapat dirangkumkan sebagai berikut:

1. Sektor Informal, hadir disaat sektor formal tidak mampu memberi ruang lingkup yang cukup, sehingga kegiatan ekonomi berlangsung diluar sektor formal yang terorganisir.
2. Pedagang Kaki Lima, merupakan bagian dari sektor informal, dalam melaksanakan aktivitasnya tidak diperlukan keahlian khusus atau modal yang besar. Pedagang kaki lima dalam aktivitasnya biasanya menempati ruang-ruang publik kota seperti trotoar, bahu jalan bahkan sampai ke badan jalan, taman-taman kota, juga di depan pertokoan.
3. Karakteristik aktivitas pedagang kaki lima dapat dilihat pada tabel II. 3 berikut:

TABEL II.3.
KARAKTERISTIK AKTIVITAS PKL

NO	KARAKTERISTIK AKTIVITAS PKL	JENIS
1.	Barang Dagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Makanan yang tidak dan belum diproses Makanan yang siap saji • Barang bukan makanan, mulai dari tekstil sampai obat-obatan. • Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas seperti tukang cukur dan lainnya
2.	Bentuk sarana fisik aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Gerobak/kereta dorong • Pikulan/keranjang • Warung semi permanen • Kios • Gelaran/alas.
3.	Pola penyebaran PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Pola penyebaran mengelompok (<i>focus agglomeration</i>) • Pola penyebaran memanjang (<i>linier concentration</i>)
4.	Pola pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi pelayanan • Skala pelayanan PKL • Waktu pelayanan • Sifat pelayanan
5.	.Ruang aktivitas PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang kota yang strategis (ruang publik} • Ruang dengan intensitas pengunjung tinggi

4. Kebijakan tata ruang kota-kota di Indonesia yang belum mengakomodasi kepentingan sektor informal, sehingga kemunculan sektor informal menempati ruang-ruang kota yang bukan peruntukannya.
5. Lingkungan Fisik, yang terdiri dari komponen/elemen fisik pada suatu lingkungan, dimana komponen/elemen yang ada hendaknya sesuai dengan standar yang benar. Semua objek yang kita lihat merupakan elemen perancangan kota (urban desain), yang mempengaruhi gambaran visual suatu lingkungan. Urban desain sebagai bagian dari perencanaan kota harus memperhatikan aspek-aspek fisik penataan ruang kota.
7. Elemen-elemen pembentuk fisik ruang kota yang akan dikaji adalah meliputi tata guna lahan, bentuk dan masa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka dan pedestrian.

UPT-PUSTAK-UNDIP

TABEL II.4.
RINGKASAN TEORI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG AKAN DITELITI

NO	Pendapat	Pernyataan
Pengertian dan Ciri Pedagang Kaki lima		
1.	Fak. Ekonomi Unpar, Bandung.	Istilah PKL berasal dari zaman Raffles yaitu five feets yang berarti jalur pejalan kaki dipinggir jalan selebar 5 kaki. Pengertian PKL adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima dan biasanya mengambil tempat atau lokasi berdagang di pusat keramaian umum seperti trotoar, di depan pertokoan, pasar, sekolah dan sebagainya.
2.	Purwanto	Pedagang kaki lima adalah suatu bentuk aktivitas perdagangan yang tidak menetap dan biasanya berlokasi di area jalur pejalan kaki.
3.	Mc. Gee dan Yeung	Pedagang kaki lima (Hawker), sebagai kelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar.
4.	Chris Manning	Karakteristik pedagang kaki lima adalah tidak terorganisir dan tidak mempunyai izin, tidak memiliki tempat usaha yang permanen, tidak memerlukan keahlian dan keterampilan khusus, modal dan perputaran usahanya berskala relatif kecil, sarana berdagang bersifat <i>moveable</i> , mudah dipindahkan.
Karakteristik Usaha Pedagang Kaki Lima		
		Jenis barang dagangan, sarana fisik aktivitas, pola penyebaran dan pola pelayanan.
1.	Mc. Gee dan Yeung	<p>Jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana PKL tersebut beraktivitas.</p> <p>Sarana fisik aktivitas yang digunakan PKL sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindahkan atau dibawa dari suatu tempat ke tempat lain, selain itu juga dipengaruhi oleh jenis barang dagangannya.</p>

2.	Waworoentoe	Bentuk sarana fisik aktivitas yang digunakan PKL adalah berupa gerobak/kereta dorong, pikulan atau keranjang, warung semi permanen, kios, gelaran atau alas.
3.	Mc. Gee dan Yeung	Pola penyebaran PKL dikelompokkan dalam 2 kategori yakni: <ul style="list-style-type: none"> • Pola penyebaran mengelompok (<i>focus agglomeration</i>) • Pola penyebaran memanjang (<i>linear concentration</i>)
4.	Chris Manning dan Effendi	Skala pelayanan PKL tergantung dari jangkauan pelayanan yaitu jauh atau dekatnya pengguna jasa atau konsumen.
5.	Mc. Gee dan Yeung	Sifat pelayanan PKL dibagi dalam 3 kelompok: <ul style="list-style-type: none"> • Pedagang menetap (<i>static</i>) • Pedagang semi menetap (<i>semi static</i>) • Pedagang keliling (<i>mobile</i>)
	Mc. Gee dan Yeung	Waktu pelayanan aktivitas PKL dalam satu hari dapat dibagi dalam beberapa periode yaitu adanya pembagian waktu dalam melaksanakan aktivitas, ada PKL yang mulai beraktivitas pagi sampai siang hari, ada yang beraktifitas dari siang sampai malam hari dan ada juga yang dimulai dari malam sampai dini hari.
	Ruang	Aktivitas PKL
1.	Mc. Gee dan Yeung	PKL pada umumnya, cenderung untuk beraktivitas secara berkelompok pada suatu area yang memiliki tingkat intensitas aktifitas yang tinggi, seperti pada pusat hiburan, pasar, dan lainnya.
	Chris Manning dan Effendi	PKL dijumpai disemua sektor kota terutama berpusat di tengah kota dan pusat-pusat hiburan lainnya.
	Shirvani Hamid	Aktivitas pedagang kaki lima di perkotaan merupakan pendukung dari aktivitas-aktivitas yang ada (<i>activity support</i>).
1.	Rachbini dan Hamid	Adanya kecenderungan setiap berdiri gedung bertingkat maka akan diikuti oleh kehadiran PKL di sepanjang jalan.

		Lingkungan Fisik
1	Kamus Tata Ruang	Tatanan lingkungan merupakan susunan komponen-komponen lingkungan, baik secara alamiah maupun yang terjadi karena hasil upaya manusia.
	Djoko Sujarto	Lingkungan merupakan suatu kelompok rumah tangga atau keluarga atau beberapa kelompok kegiatan fungsional sehingga membentuk suatu kawasan fungsional. Tatanan fisik lingkungan dapat diartikan susunan atau suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen fisik pada suatu lingkungan, dimana setiap komponen yang ada hendaknya sesuai dengan standard yang benar.
	Harastoeti	Semua objek yang dilihat merupakan elemen rancang kota, yang kesemuanya mempengaruhi gambaran visual lingkungan.
	Hamid Shirvani	Elemen-elemen pembentuk fisik ruang kota meliputi, tata guna lahan, bentuk dan masa bangunan, sirkulasi dan parkir ruang terbuka, pedestrian, dan aktivitas pendukung.

2.6. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional

2.6.1. Identifikasi Variabel

Berdasarkan uraian di atas maka variabel yang akan digunakan pada penelitian selanjutnya adalah:

1. PKL sebagai variabel bebas/pengaruh (*independent variabel*), dengan indikator sebagai berikut:

- Jenis dagangan
- Bentuk sarana fisik aktivitas
- Pola penyebaran

- Waktu aktivitas
 - Lokasi aktivitas
 - Luas ruang aktivitas
 - Perlakuan terhadap sarana fisik aktivitas
2. Lingkungan fisik sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*), dengan indikator sebagai berikut:
- Tata guna lahan
 - Bentuk dan massa bangunan
 - Sirkulasi dan parkir
 - Ruang terbuka (trotoar, jalan, pelataran parkir, saluran)
3. Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru terhadap keberadaan, dengan indikator:
- Persepsi terhadap gangguan keberadaan PKL
 - Persepsi terhadap manfaat keberadaan PKL
 - Persepsi terhadap penataan PKL

2.6.2. Definisi Operasional

Dalam upaya analisis pengaruh keberadaan aktivitas pedagang kaki lima terhadap tatanan fisik lingkungan kota, maka perlu adanya definisi operasional yang cukup dapat dimengerti oleh peneliti maupun responden. Adapun definisi operasional dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

a. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima, yang dimaksud adalah pedagang kaki lima yang beraktivitas pada kawasan fungsional di Kota Pekanbaru.

- Karakteristik aktivitas PKL adalah bagaimana perilaku PKL dalam menjalankan aktivitasnya yang meliputi: jenis dagangan PKL, sarana fisik yang digunakan PKL dalam menjalankan aktivitasnya seperti tenda, gerobak, gelaran dan lainnya, pola sebaran PKL, adalah sifat sebaran PKL, apakah mengelompok di sekitar pusat aktivitas masyarakat atau berkembang memanjang mengikuti pola jalan, waktu berdagang, adalah waktu-waktu dimana PKL beraktivitas, misalnya pagi-siang hari, siang sampai malam, dan malam sampai dini hari, lokasi dimana PKL beraktivitas, jenis ruang yang digunakan PKL sebagai tempat aktivitas seperti trotoar jalan dan lainnya, luas ruang yang digunakan sebagai tempat aktivitas, dan bagaimana PKL memperlakukan sarana dagangannya setelah selesai beraktivitas, apakah dibawa pulang atau ditinggal di lokasi.

b. Masyarakat

Yang dimaksud masyarakat disini adalah masyarakat Kota Pekanbaru yang terdiri atas masyarakat sebagai konsumen, yaitu masyarakat yang melakukan transaksi dengan PKL maupun masyarakat di sekitar lokasi yaitu, masyarakat pemilik toko, kantor, atau bertempat tinggal di sekitar ruang aktivitas PKL.

c. Fisik Lingkungan

Yang terdiri dari elemen-elemen fisik lingkungan yang meliputi:

- Tata guna lahan, pengertian yang dipakai disini adalah fungsi ruang dimana PKL beraktivitas.
- Bentuk dan massa bangunan, yaitu bentuk sarana fisik aktivitas pedagang kaki lima dan bentuk dan masa bangunan formal yang ada disekitarnya serta bagaimana kesesuaian antara keduanya.

- Sirkulasi dan parkir, yaitu bagaimana kondisi sirkulasi dan parkir pada ruang dimana PKL beraktivitas
- Ruang terbuka, yang dimaksud di sini dibatasi pada ruang-ruang dimana PKL beraktivitas seperti trotoar, jalan, pelataran parkir, halaman toko, diatas saluran dan lahan kosong yang ada.
- jalur pejalan kaki, adalah ruang yang berfungsi sebagai areal pejalan kaki seperti pelataran toko yang dimanfaatkan oleh PKL sebagai ruang aktivitasnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU

3.1. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru bermula dari sebuah desa yang bernama Dusun Payung Sekaki yang berada di pinggir Sungai Siak bagian utara. Pada zaman kerajaan Siak Sri Indrapura ketika dipimpin oleh Sultan Abdul Alamuddin Syah, dusun ini berkembang dan pusatnya berpindah ke seberang Selatan Sungai Siak di sekitar Pasar Bawah sekarang yang kemudian bernama Senapelan, dan akhirnya berganti nama menjadi Pekanbaru. Pada tahun 1974 oleh Pemerintah RI Pekanbaru ditetapkan menjadi Kotamadya. Dari uraian sejarah di atas diketahui bahwa perkembangan kota Pekanbaru berawal dari pinggiran Sungai Siak dan terus berkembang ke arah Selatan.

Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ} 14'$ - $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'$ - $0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1987 daerah administrasi Kota Pekanbaru di perluas dari 62,96 KM² yang terdiri dari 6 kecamatan menjadi 632,26 KM² dengan 8 kecamatan. Wilayah administrasi Kota Pekanbaru berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Sebelah Selatan berbatasan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Secara fisik Kota Pekanbaru terbagi menjadi 2 bagian oleh Sungai Siak, yaitu wilayah sebelah Utara Sungai Siak dan wilayah sebelah Selatan Sungai Siak. Pada saat ini pengembangan kota lebih terpusat pada wilayah Selatan Sungai Siak dan cenderung mengarah ke Selatan. Hal ini disebabkan oleh topografi Kota Pekanbaru bagian Utara yang

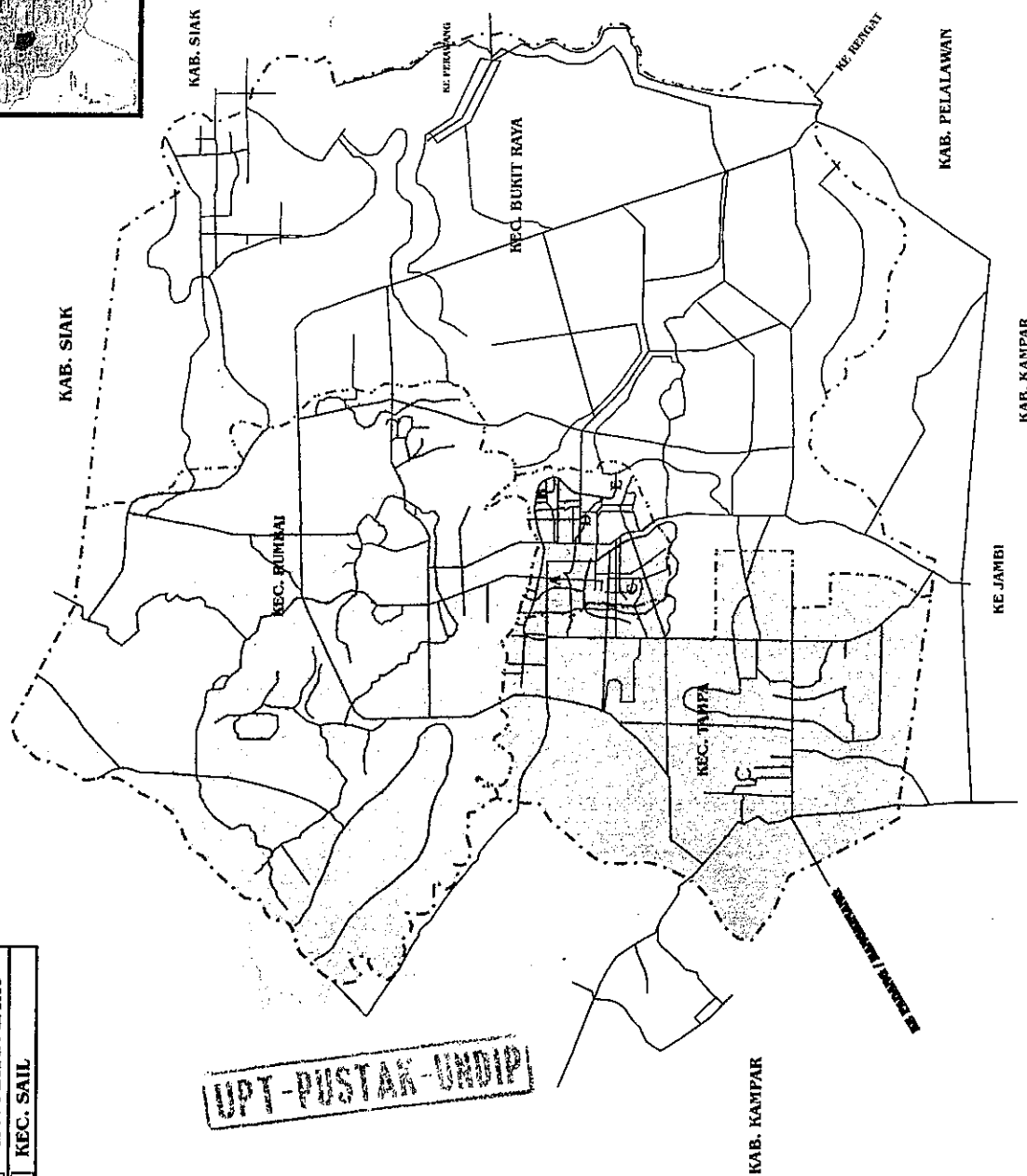
tidak mendukung, dengan kondisi yang berbukit-bukit dan rawa jika dibandingkan dengan bagian Selatan kota yang relatif datar. Peta Wilayah Administrasi Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Gambar 3.1.

3.2. Peran dan Fungsi Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Propinsi Riau dan merupakan kota orde I pada hirarki kota-kota di propinsi ini. Dengan predikat tersebut, maka Kota Pekanbaru mengemban beberapa fungsi yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri, pusat pelayanan jasa dan pusat pelayanan fasilitas lainnya. Hal ini didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana perhubungan darat, udara dan sungai. Sungai Siak merupakan jalur pelayaran penting sebagai penghubung Kota Pekanbaru dengan kepulauan di sekitarnya, terutama sebagai jalur perdagangan antar pulau dan hubungan luar negeri (SIJORI).

Kota Pekanbaru sebagai kawasan berkembang dan pusat pertumbuhan di Propinsi Riau, maka kebijakan umum pembangunan ekonomi dititikberatkan pada sektor perdagangan dan jasa yang diarahkan untuk memacu perkembangan sektor industri, komunikasi dan jasa pariwisata, serta sektor-sektor lainnya. Kebijakan ini untuk mendukung Visi Kota Pekanbaru yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa”. Untuk mewujudkan visi tersebut Kota Pekanbaru telah melaksanakan pembangunan di segala bidang, dan perkembangan yang terjadi dinilai cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru dalam tahun 1999 adalah 1,65% (Sumber Renstra Kota Pekanbaru, 2001-2005).

A	KEC. SENAPELAN
B	KEC. LIMAPULUH
C	KEC. SUKAJADI
D	KEC. PEKAN BARU
E	KEC. SAIL



PEKANBARU - PUSAT - JAMBI



MEGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PENGARUH KEBERADAAN PEDAGANG
KAKI LIMA TERHADAP TATANAN
FISIK LINGKUNGAN KOTA PEKANBARU

PETA ADMINISTRASI

LEGENDA :

- Batas Kotamadia
- Batas Kecamatan
- Jalan Aspal
- Sungai

UTARA



SKALA PETA

0 1:60 2:00 4:30
Kecamatan
Skala 1:10000

SUMBER
PEMERINTAH KOTA
PEKANBARU

3.3. Kebijakan Pengembangan Ruang Kota

Konsep pengembangan tata ruang Kota Pekanbaru mengusahakan pemerataan pertumbuhan kota agar tidak terkonsentrasi hanya di pusat kota, karena masih banyaknya lahan kosong yang dapat dibangun terutama dibagian utara dan timur kota. Kota Pekanbaru diarahkan untuk mengembangkan fungsi-fungsi utamanya yaitu sebagai pusat pemerintah perdagangan, jasa, industri, dan penduduk disamping juga sebagai pintu gerbang Propinsi Riau.

Berdasarkan konsep tersebut maka Kota Pekanbaru dibagi menjadi lima Wilayah Pengembangan (WP) yang terdiri dari satu wilayah pengembangan sebagai pusat pertumbuhan utama dengan kegiatannya melayani kebutuhan seluruh kota, sedangkan empat wilayah pengembangan lainnya berfungsi sebagai pusat kegiatan hirarki kedua (sekunder) dengan skala pelayanan wilayah pembangunan itu sendiri.

Adapun wilayah pengembangan tersebut adalah :

- **Wilayah Pengembangan I (WP I)**, terdiri dari lima kecamatan yaitu : Kecamatan Senapelan, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Pekanbaru Kota dan Kecamatan Sail. Selanjutnya wilayah ini diarahkan untuk pemerintahan, perdagangan, jasa / perkantoran, industri kecil, pendidikan, perumahan.
- **Wilayah Pengembangan II (WP II)**, terdiri dari satu kecamatan yaitu Kecamatan Rumbai. Selanjutnya dalam pengembangannya diarahkan untuk perumahan, perdagangan, jasa, kawasan lindung, pertanian, pendidikan, olah raga, dan rekreasi.
- **Wilayah Pengembangan III (WP III)**, wilayah ini dari satu kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Raya (A) yang berada di sebelah utara Sungai Siak. Selanjutnya wilayah ini diarahkan untuk perumahan, perdagangan, jasa, industri, pertanian, kawasan lindung, serta olah raga dan rekreasi.



MEGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

PRA TESIS

PENGARUH KEBERADAAN PEDAGANG
KAKI LIMA TERHADAP TATANAN
FISIK LINGKUNGAN KOTA PEKANBARU

PETA WILAYAH PENGEMBANGAN

LEGENDA :

- Batas Kotamadia
- Batas Kecamatan
- Jalan Aspal
- Sungai
- Batas Wilayah Pengembangan
- Wilayah Pengembangan I
- Wilayah Pengembangan II
- Wilayah Pengembangan III
- Wilayah Pengembangan IV
- Wilayah Pengembangan V

- A KEC. SENAPELAN
- B KEC. LIMAPULUH
- C KEC. SUKAJADI
- D KEC. PEKAN BARU
- E KEC. SAIL

SKALA PETA

0 1:50 2:50 3:50
Kilometer

UTARA



SUMBER
PEMERINTAH KOTA
PEKANBARU

- WILAYAH PENGEMBANGAN III
- PERUMAHAN
- PERTANIAN
- KAWASAN LINDUNG
- PERDAGANGAN & JASA
- INDUSTRI
- OLAH RAGA & REKREASI

KAB. SIAK

KAB. SIAK

WP III

KEC. BUKIT RAYA A

KEC. RUMBAI

WP II

KEC. BUKIT RAYA B

WP IV

WP V

KAB. KAMPAR

KE JAMBI

- WILAYAH PENGEMBANGAN IV
- PERUMAHAN
- KAWASAN LINDUNG
- PENDIDIKAN
- PERTANIAN
- INDUSTRI
- OLAH RAGA & REKREASI
- PERDAGANGAN & JASA
- PEMERINTAHAN

- WILAYAH PENGEMBANGAN II
- OLAH RAGA & REKREASI
- PENDIDIKAN
- KAWASAN LINDUNG
- PERUMAHAN
- PERTANIAN
- PERDAGANGAN & JASA

UPT-PUSTAKA UNDIP

- WILAYAH PENGEMBANGAN I
- PERDAGANGAN
- PEMERINTAHAN
- JASAPERKANTORAN
- INDUSTRI RECI
- PERUMAHAN
- PENDIDIKAN

KAB. KAMPAR

- WILAYAH PENGEMBANGAN V
- PERUMAHAN
- PERTANIAN
- PENDIDIKAN
- KAWASAN LINDUNG
- PERDAGANGAN DAN JASA
- INDUSTRI RECI
- PEMERINTAHAN

- **Wilayah Pengembangan IV (WP IV)**, wilayah ini terdiri dari satu kecamatan, yaitu kecamatan Bukit Raya (B) yang berada di sebelah selatan Sungai Siak. Selanjutnya wilayah ini diarahkan pengembangannya untuk perumahan, perdagangan, jasa, pemerintahan, pertanian, pendidikan, industri, kawasan lindung, serta olah raga dan rekreasi.
- **Wilayah Pengembangan V (WP V)**, wilayah ini terdiri dari satu kecamatan yaitu kecamatan Tampan. Selanjutnya wilayah ini diarahkan pengembangannya untuk perumahan, pertanian, industri kecil, pendidikan, pemerintahan, kawasan lindung, perdagangan dan jasa. Gambar Peta Wilayah pengembangan terlampir.

Penggunaan lahan di Kota Pekanbaru baru terealisasi sebesar 40 % dari luas wilayah Kota Pekanbaru atau dalam arti kata 60 % wilayah masih merupakan lahan belum terbangun yang berupa kebun, tegalan, semak belukar dan penggunaan lainnya. Sementara lahan yang telah terbangun didominasi oleh permukiman, perdagangan, perkantoran, industri, jasa, dan sarana fasilitas umum beserta penunjangnya.

3.4. Kependudukan

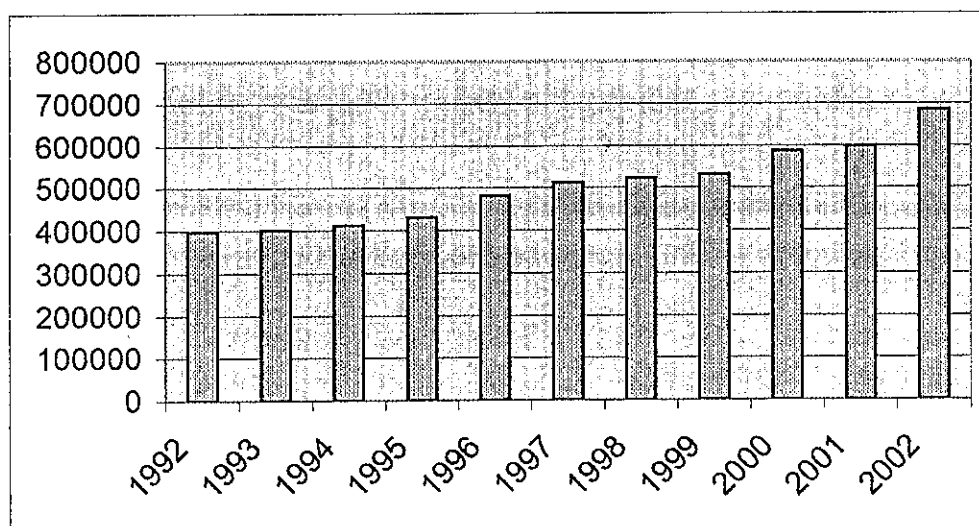
Kota Pekanbaru sebagai pusat pertumbuhan di Propinsi Riau sedang giat melaksanakan pembangunan. Hal ini menyebabkan terjadinya migrasi dari kabupaten kabupaten maupun propinsi disekitarnya hal ini terlihat dari perkembangan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup tinggi. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2002 jumlah penduduk Kota Pekanbaru adalah 684.274 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk 3,99 % pertahun (Pekanbaru dalam angka Tahun 2001), angka ini telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan perbandingan hasil sensus penduduk tahun 1980 dengan hasil sensus tahun 1990, dimana angka pertumbuhan penduduk rata-

rata pertahun mencapai 5,31%. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru periode tahun 1992 - 2002 dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini:

TABEL III.1
PERKEMBANGAN PENDUDUK KOTA PEKANBARU
TAHUN 1992 - 2002

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)
1	1992	397.330
2	1993	401.477
3	1994	412.918
4	1995	431.464
5	1996	481.661
6	1997	512.123
7	1998	523.176
8	1999	531.635
9	2000	586.223
10	2001	597.971
11	2002	684.274

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2001 (BPS Kota Pekanbaru)



GAMBAR 3.3.
DIAGRAM BATANG PERKEMBANGAN PENDUDUK
KOTA PEKANBARU TAHUN 1992 - 2002

Sumber : hasil analisis, 2003

Kondisi pembangunan Kota Pekanbaru yang masih terkonsentrasi di pusat kota juga menyebabkan penyebaran penduduk Kota Pekanbaru tidak merata, dimana penduduk terkonsentrasi di sekitar pusat kota yaitu pada Wilayah Pengembangan I (WP I) yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sail, Kecamatan Senapelan, dan Kecamatan Sukajadi. Adapun kepadatan penduduk Kota Pekanbaru pada setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel III.2.

TABEL III.2.
KEPADATAN PENDUDUK DI KOTA PEKANBARU

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK	
				KM2	Ha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	TAMPAN	108,48	144.626	1.329	13,28
2.	BUKIT RAYA	353,78	176.756	591	5,91
3.	LIMA PULUH	4,04	42.589	10.542	105,42
4.	SAIL	3,26	22.156	6.796	67,96
5.	PEKANBARU KOTA	2,26	30.206	13.365	133,65
6.	SUKA JADI	5,10	63.024	12.358	123,58
7.	SENAPELAN	6,65	35.819	5.386	53,86
8.	RUMBAI	203,03	82.795	408	4,08
	JUMLAH	632,26	597.971	946	9,46

Sumber: Pekanbaru Dalam Angka (BPS Kota Pekanbaru)

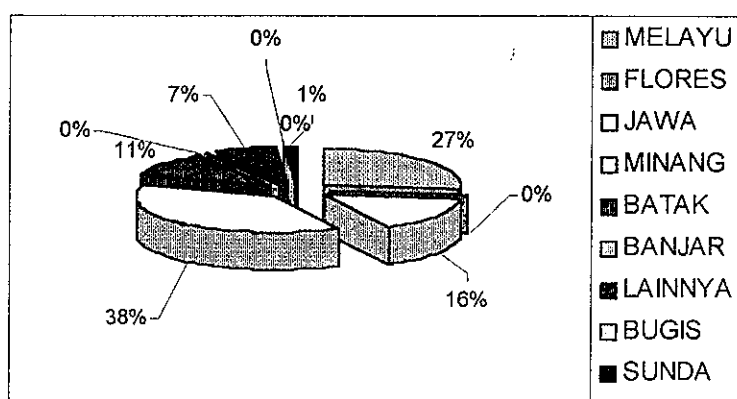
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Pekanbaru Kota 133 jiwa/Ha dan yang terendah di Kecamatan Rumbai dengan kepadatan penduduk 4 jiwa/Ha. Hal ini juga menjadi pendorong aktivitas PKL juga terkonsentrasi di pusat kota, karena tingkat konsumen juga lebih tinggi.

Penduduk Kota Pekanbaru sangat heterogen, hal ini dipengaruhi oleh migrasi yang terjadi. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat penduduk Kota Pekanbaru menurut suku bangsa dan kewarganegaraan pada tabel III.3. berikut ini.

TABEL III.3.
KOMPOSISI PENDUDUK KOTA PEKANBARU MENURUT SUKU BANGSA

NO	SUKU BANGSA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)
1	MELAYU	156.135
2	JAWA	91.704
3	MINANG	221.711
4	BATAK	64.586
5	FLORES	74
6	BANJAR	1.407
7	BUGIS	1.122
8	SUNDA	6.153
9	ASING	1.440
10	LAINNYA	41.440
	JUMLAH	585.440

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, (Hasil Sensus Tahun 2000)



GAMBAR 3.4.
DIAGRAM KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT SUKU BANGSA
Sumber : hasil analisis, 2003.

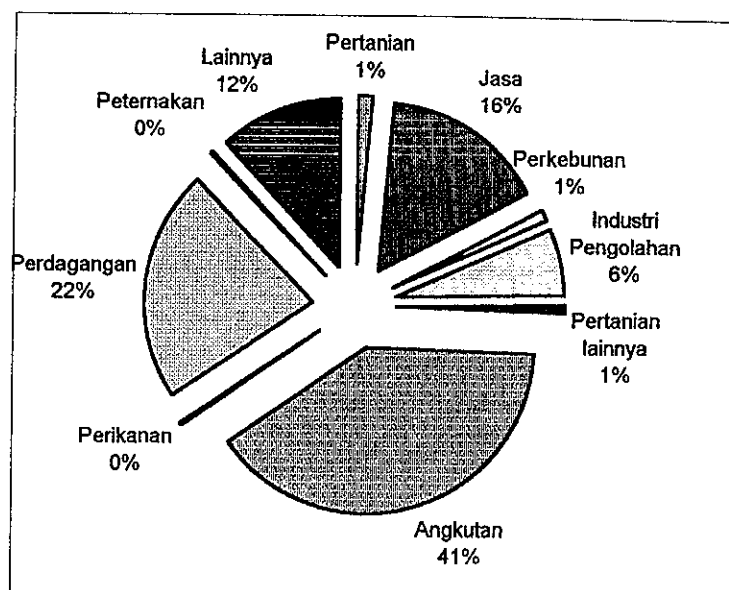
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk yang terbesar adalah Suku Minang yang berasal dari Propinsi Sumatera Barat, kemudian diikuti oleh Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Batak dan suku-suku lainnya. Penduduk asli Kota Pekanbaru adalah Suku Melayu, namun jumlah penduduk Suku Melayu hanya 26,67% dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru yaitu 156.135 jiwa. Jadi jelas terlihat begitu besar pengaruh urbanisasi pada jumlah penduduk Kota Pekanbaru.

Sedangkan berdasarkan mata pencaharian, penduduk Kota Pekanbaru dikelompokkan ke dalam 10 kelompok mata pencaharian yaitu, pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan, pertanian lainnya, industri pengolahan, perdagangan, jasa, angkutan dan lain-lain. Adapun komposisi penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel III.4.

TABEL III.4.
KOMPOSISI PENDUDUK KOTA PEKANBARU MENURUT
MATA PENCAHARIAN(UMUR 15 TAHUN KE ATAS)

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (JIWA)
1.	Pertanian	3.228
2.	Perkebunan	2.540
3.	Perikanan	512
4.	Perternakan	631
5.	Pertanian lainnya	2.039
6.	Industri Pengolahan	14.029
7.	Perdagangan	50.346
8.	Jasa	35.974
9.	Angkutan	90.315
10.	Lainnya	26.965
	JUMLAH	145.489

Sumber : BPS Kota Pekanbaru (Sensus Penduduk Tahun 2000).



GAMBAR 3.5.
DIAGRAM KOMPOSISI PENDUDUK KOTA PEKANBARU
MENURUT MATA PENCAHARIAN

Sumber : hasil analisis, 2003

Dari tabel dan diagram di atas terlihat bahwa, mata pencaharian yang paling dominan adalah perdagangan yaitu 34,6 % , sedangkan mata pencaharian lainnya yang menurut Soetomo (1998) menyatakan bahwa pekerjaan lainnya dapat dikategorikan sebagai pekerjaan sektor informal, sehingga PKL juga termasuk dalam kelompok ini.

3.4. Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru

3.4.1. Perkembangan dan Penyebaran Lokasi PKL di Kota Pekanbaru

Fenomena pedagang kaki lima terjadi hampir di seluruh kota besar di Indonesia, begitu juga di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru sebagai ibukota Propinsi Riau dan sebagai pusat pertumbuhan menjanjikan berbagai peluang, yang kemudian menjadi penarik arus urbanisasi ke kota ini. Hal ini dapat dilihat dari penduduk kota Pekanbaru yang sangat heterogen dan didominasi oleh penduduk pendatang, sehingga menyebabkan jumlah angkatan kerja meningkat, sementara lapangan kerja di sektor formal terbatas. Pada akhirnya sektor informal terutama pedagang kaki lima menjadi pilihan, untuk mempertahankan hidup dan memecahkan masalah perekonomian. Menjadi pedagang kaki

lima hampir tidak memerlukan prosedur yang resmi dalam pendirian usaha, sehingga relatif tidak mengeluarkan biaya dan tidak memakan waktu yang lama, modal yang relatif kecil dengan potensi keuntungan diperoleh cukup baik.

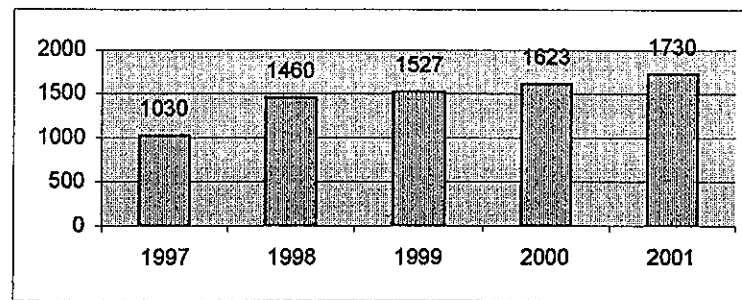
Keberadaan pedagang kaki lima terus mengalami peningkatan dari tahun ke-tahun, terutama di sekitar pusat kota dan kawasan-kawasan fungsional kota atau lokasi aktivitas masyarakat seperti pada kawasan perdagangan, pendidikan, perkantoran permukiman dan lainnya. Sampai saat ini belum ada data resmi yang menyebutkan jumlah PKL yang ada di Kota Pekanbaru. Data dari Dinas Pasar Kota Pekanbaru, hanya mencatat jumlah pedagang kaki lima yang beraktivitas di beberapa lokasi pasar di kota Pekanbaru. Pada tahun 1997 tercatat 1030 pedagang, pada tahun 2001 jumlah pedagang meningkat menjadi 1730 pedagang, jumlah ini belum termasuk pedagang kaki lima yang beraktivitas di tempat-tempat umum lainnya. Secara rinci perkembangan jumlah pedagang kaki lima dapat dilihat pada tabel III.4.

Berdasarkan penelitian Dewi M pada tahun 2002 jumlah pedagang kaki lima yang beraktivitas di Kota Pekanbaru yang tersebar di 25 (dua puluh lima) ruas jalan dan 6 (enam) pasar adalah 6166 pedagang.

TABEL III.4.
JUMLAH PEDAGANG KAKI LIMA

TAHUN	JUMLAH PEDAGANG
1997	1.030
1998	1.460
1999	1.527
2000	1.623
2001	1730

Sumber: Dinas Pasar Kota Pekanbaru



GAMBAR 3.6.
DIAGRAM BATANG PERKEMBANGAN JUMLAH PKL
Sumber : hasil analisis, 2003.

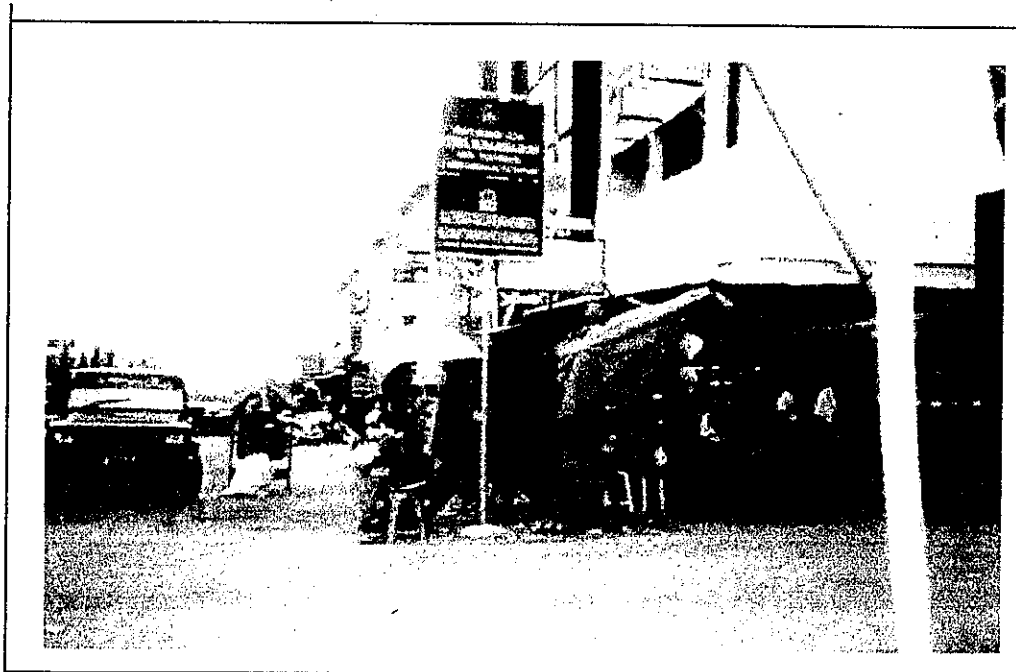
Lonjakan jumlah pedagang kaki lima terjadi pada ruas-ruas jalan yang strategis dan pada kawasan-kawasan fungsional kota, seperti pada Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Pangeran Hidayat, Pasar Sukaramai, Pasar Bawah dan lokasi strategis lainnya.. Seperti pada jalan Tuanku Tambusai, dimana sebelum terjadinya krisis moneter hanya terdapat beberapa pedagang di sekitar Plaza Citra dan bersifat mobile atau tidak menetap. Tapi pada tahun berikutnya PKL mulai beraktivitas secara menetap yang terlihat dari sarana dagangnya yang berupa tenda-tenda yang ditinggalkan dilokasi sehabis beraktivitas. Keberadaan mereka yang terus bertambah hingga menutupi bangunan yang ada di belakangnya. Keberadaan dan penyebaran lokasi PKL di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada gambar 3.6.

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru cenderung memanfaatkan ruang-ruang publik kota seperti pada trotoar, bahu jalan, emperan toko, pelataran parkir di sekitar lokasi aktivitas masyarakat, karena tidak adanya peruntukan ruang bagi aktivitas mereka. Sebagai akibatnya terjadi distorsi fungsi dari ruang publik tersebut karena tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini juga diperparah dengan kurangnya kepedulian PKL akan masalah kebersihan dan kepentingan umum pada ruang tersebut.

UPT-PUSTAK-UNDIP

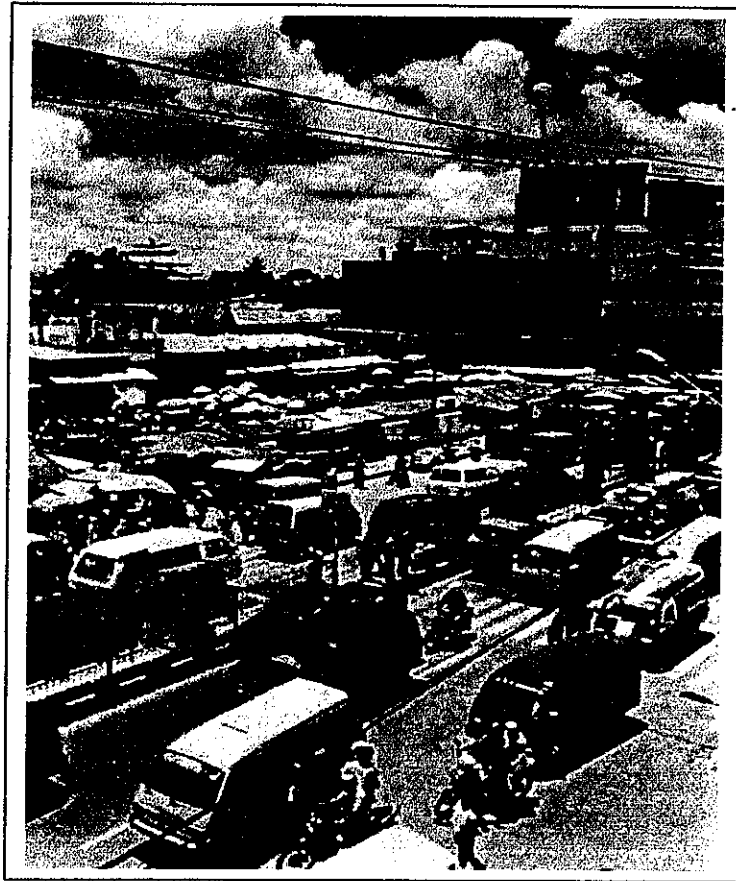


GAMBAR 3.7.
PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERAKTIFITAS
PADA TROTOIR DAN BAHU JALAN



GAMBAR 3.8.
PEDAGANG KAKI LIMA BERDAGANG DI EMPERAN TOKO DAN TROTOIR

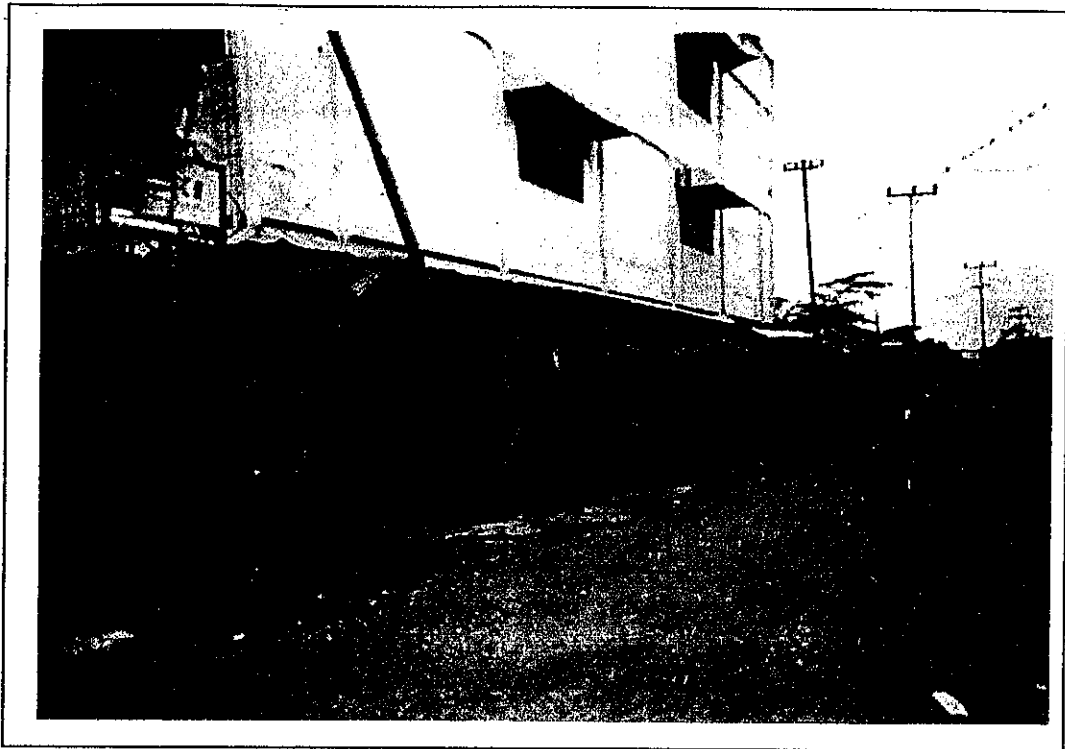
Dari survei awal yang dilakukan terlihat bahwa pedagang kaki lima lebih banyak beraktifitas di sekitar kawasan perdagangan, karena dianggap konsumen yang datang lebih



GAMBAR 3.9.
PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR PASAR CIK PUAN
JALAN TUANKU TAMBUSAI

Pedagang kaki lima dalam beraktivitas tidak memperhatikan masalah K3 dan kepentingan umum pada ruang yang ditempatinya. Sarana fisik dagangan yang sederhana berupa tenda, kios-kios, gerobak, maupun gelaran yang belum tertata dengan baik. Sebagian pedagang tidak mengemasi sarana dagangannya setelah beraktifitas, sehingga menimbulkan pemandangan yang jauh dari keindahan.

UPT-PUSTAKA UNBP



GAMBAR 3.10.
TENDA-TENDA YANG DITINGGALKAN BEGITU SAJA
SETELAH AKTIVITAS SELESAI

3.6.Karakteristik Fisik Lokasi Studi

UPT-POSTAL-UNDIP

Karakteristik lokasi studi, dimaksud untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi lokasi studi meliputi penggunaan lahan, kegiatan pada lokasi dan kondisi elemen fisik lingkungan yang terdiri dari bentuk bangunan, kondisi jalan, trotoar dan pola parkir. Adapun lokasi penelitian dalam studi ini tersebar di beberapa lokasi yang merupakan kawasan fungsional kota yaitu Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Agus Salim, Jalan Jendral Sudirman, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Jalan Kaharudin Nasution. Lokasi dari studi di atas dapat dilihat pada Gambar 3.10.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan karakteristik dari setiap lokasi studi dimaksud, untuk mengetahui gambaran umum tentang kondisi lokasi studi, mulai dari kondisi jalan, penggunaan jalan, kegiatan formal pada lokasi, serta kaitan antara kegiatan formal dan kegiatan PKL, sebagai pendukung analisa yang akan dibahas pada Bab IV.

3.6.1. Jalan Tuanku Tambusai

Jalan Tuanku Tambusai merupakan salah satu jalur utama menuju pusat Kota (Jl. Jenderal Sudirman) dari arah Barat. Adapun aktivitas formal yang berkembang pada kawasan ini adalah perdagangan dan jasa, dimana kawasan ini merupakan kawasan perdagangan dan jasa yang terbesar di Kota Pekanbaru. Disamping fungsi tersebut di sekitar lokasi juga terdapat kawasan permukiman di belakang pertokoan. Pada jalan ini terdapat beberapa pusat aktivitas masyarakat yaitu Citra Plaza, Pasar Cik Puan, Terminal Antar Kota Mayang Terurai, serta kompleks pertokoan sepanjang jalan tersebut.

Lokasi PKL pada jalan ini terkonsentrasi di sekitar Plaza Citra, Pasar Cik Puan dan Terminal Mayang Terurai, dengan memanfaatkan mulai dari emperan toko, pelataran parkir, trotoar bahkan pada pagi hari sampai ke badan jalan yang rawan menyebabkan kemacetan. Adapun pola penyebaran PKL disekitar Plaza Citra dan Pasar Cik Puan merupakan pola mengelompok (*focus agglomeration*), sementara PKL juga berkembang secara linier sepanjang jalan Tuanku Tambusai dengan memanfaatkan trotoar, badan jalan pelataran parkir di depan toko. Sedangkan jenis barang dagangan yang dominan disekitar Plaza Citra adalah bahan sandang seperti pakaian dan asesoris, di Pasar Cik Puan jenis dagangan berupa kebutuhan harian seperti sayuran, buah, dan barang kelontong. Sedangkan di sekitar terminal didominasi oleh pedagang makanan dan minuman.

Bangunan yang ada pada lokasi ini terdiri dari deretan pertokoan di sepanjang jalan. Bentuk bangunan pada umumnya berupa bangunan permanen bertingkat atau yang biasa disebut “ruko”, desain bangunan berbentuk kotak dengan tampilan *fasade* yang sederhana, terlihat kurangnya sentuhan arsitekturnya sehingga terkesan monoton. Tata letak massa dari pertokoan yang tidak terencana dengan baik, terlihat dari bangunan yang berderet, dimana setiap satu blok terdiri lebih dari 10 unit bangunan. Hal ini menyebabkan

kurangnya aksesibilitas bagi lahan dibelakangnya dan dan sangat rawan bila terjadi kebakaran karena jarak antara blok kurang dari 2 (dua) meter.

Sementara tampilan PKL dengan sarana aktivitas yang sederhana didominasi oleh tenda-tenda jauh dari kesan mewah dibandingkan dengan bangunan yang menjadi ikutannya. Massa bangunan dengan pola penyebaran linier, yang berderet rapat di depan pertokoan, sehingga menutup bagian muka dari bangunan pertokoan.

Sebagai jalan utama menuju pusat kota, maka jalan ini dilalui oleh sarana transportasi umum (angkutan Kota) yaitu jurusan Tangkerang, Sukajadi dan Panam. Jalan Tuanku Tambusai merupakan jalan arteri dengan sistem arus lalu lintas dua arah, yang terdiri dari dua jalur dan dibatasi oleh jalur hijau dengan lebar 1 M. jalan ini. Sepanjang jalan terdapat trotoar dengan lebar 1 - 1,2 M yang menyatu dengan pelataran parkir di depan pertokoan. Untuk parkir pada lokasi ini terdapat dua sistim yaitu parkir di badan jalan (*on the street*) dan parkir bukan di badan jalan (*off the street*).

3.6.2. Jalan Agus Salim

UPT-PUSTAK-UNDIP

Aktivitas formal pada lokasi ini adalah perdagangan dan jasa dimana terdapat deretan pertokoan dan pasar tradisional (pasar inpres).

Pada ruas jalan ini PKL beraktivitas dengan memanfaatkan pelataran parkir di depan pertokoan sampai memenuhi badan jalan, sehingga jalan ini hanya menyisakan ruang untuk sirkulasi manusia, sedangkan kendaraan tidak dapat melalui jalan ini selama aktivitas berlangsung. Jenis dagangan kebanyakan berupa kebutuhan harian mulai dari sayuran, buah, barang kelontong serta pakaian.

Bentuk bangunan disini pada umumnya berupa pertokoan dua lantai yang berderet mengikuti jalan. Kondisi bangunan sudah tua dan kurang terawat terlihat dan tampilan

yang sangat sederhana. Sedangkan kondisi PKL pada lokasi ini sangat semrawut, kumpulan massa sarana aktivitas yang bercampur dan tidak tertata dengan baik. Sarana aktivitas yang sederhana mulai dari tenda-tenda, gerobak/kereta dorong, sampai gelaran/alas. Hal ini menyebabkan pertokoan yang ada dibelakangnya hampir tidak kelihatan.

Jalan Agus Salim merupakan jalan kolektor yang menghubungkan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sudirman. Jalan ini tidak di lalui oleh angkutan umum, sehingga untuk menuju lokasi akses utama melalui jalan Sudirman dan jalan Ahmad Yani, dimana kedua jalan ini dilalui oleh kendaraan umum (angkutan kota dan bus). Kondisi jalan merupakan jalan aspal dengan kondisi yang baik, adapun lebar jalannya adalah 8 M. Disepanjang jalan tidak terdapat fasilitas trotoar, hanya selasar di depan toko, sedangkan pelataran parkir terdapat di depan pertokoan.

3.6.3. Jalan Sudirman

Aktivitas formal di sekitar lokasi adalah mulai dari Pelita Pantai sampai jalan Hangtuh merupakan kawasan perdagangan, sedangkan mulai dari jalan Hangtuh sampai pertigaan jalan Tuanku Tambusai merupakan kawasan perkantoran.

Pada jalan ini pola penyebaran PKL adalah pola linier berkembang mengikuti jalan. Di sekitar kawasan perdagangan PKL beraktivitas pada emperan toko dan di bahu jalan. Sedangkan di sekitar perkantoran PKL beraktivitas pada lahan-lahan kosong yang ada di sekitar lokasi, di atas saluran. Adapun jenis dagangan didominasi oleh jenis makanan seperti makanan/minuman, buah, jajanan, jamu dan sebagainya.

Bentuk bangunan perdagangan berupa deretan pertokoan, disamping di lokasi ini terdapat bangunan Plaza Sukaramai dengan desain modern, bertolak belakang dengan

bangunan pertokoan yang pada umumnya merupakan bangunan lama dengan desain yang sangat sederhana. Sarana aktivitas PKL pada lokasi ini pada umumnya berupa gerobak/kereta dorong, yang dibawa pulang sehabis beraktivitas.

Tatanan massa bangunan perkantoran berupa bangunan tunggal dengan desain yang modern. Sementara sarana aktivitas PKL berbentuk kios-kios yang merupakan bangunan darurat dari kayu yang sekaligus menjadi tempat tinggal, serta warung-warung tenda di sekitar gedung-gedung perkantoran yang keberadaan keduanya sangat bertolak belakang.

Jalan Sudirman merupakan jalan protokol di Kota Pekanbaru, dengan klasifikasi jalan merupakan jalan arteri. Kualitas jalan merupakan jalan aspal dengan kondisi baik, dengan klasifikasi jalan merupakan jalan arteri dengan sistem arus lalu lintas dua arah. Jalan ini terdiri dari 2 jalur yang dibatasi oleh jalur hijau dengan lebar 1,5 M. Mulai dari Pelita Pantai sampai pertigaan jalan Hangtuah tidak terdapat trotoar kecuali di depan Plaza Sukaramai selebar 1 M. Sedangkan dari pertigaan jalan Hangtuah sampai pertigaan jalan Tuanku Tambusai yang merupakan kawasan perkantoran terdapat fasilitas trotoar dengan lebar 1 M. Selain itu Pola Parkir pada kawasan perdagangan adalah linier pada tepi jalan, karena pertokoan yang ada tidak menyediakan fasilitas parkir, kecuali pada Plaza Sukaramai dan perkantoran masing-masing telah menyediakan lahan parkir bagi pengunjungnya..

3.6.4. Jalan Pepaya

Aktivitas formal pada lokasi ini adalah sampai 100 M dari jalan Tuanku Tambusai merupakan fungsi perdagangan, kemudian perkantoran serta pemukiman, dimana perkantoran merupakan fungsi yang paling dominan. Fasilitas perdagangan yang ada adalah Plaza Citra, Hotel dan pertokoan. Fasilitas perkantoran yang ada diantaranya Kantor

Bapedalda Kota, Disnaker Propinsi, Statistik, Poltabes, Diskimpraswil Propinsi , BPN Kota.

PKL pada lokasi ini berkembang secara linier di sepanjang jalan, dimana mereka memanfaatkan tutup saluran, badan jalan, pelataran parkir di depan pertokoan dan lahan-lahan yang kosong di sekitar aktivitas formal sebagai tempat beraktivitas. Jenis dagangan didominasi oleh jenis makanan.

Bentuk bangunan terdiri dari deretan pertokoan dan bangunan tunggal gedung-gedung kantor yang pada umumnya merupakan bangunan lama dengan desain yang sederhana. Sementara PKL pada lokasi ini sarana aktivitasnya berupa tenda-tenda dan kereta dorong yang tersebar secara linier sepanjang jalan.

Jalan Pepaya merupakan jalan kolektor yang dapat diakses langsung dari jalan Tuanku Tambusai. Kualitas jalan merupakan jalan aspal dengan arus lalu lintas dua arah dan lebar jalan adalah 10 M. Pada jalan ini tidak terdapat fasilitas trotoar. Sarana transportasi umum tidak ada yang melewati jalan ini, namun dapat diakses langsung dari jalan Tuanku Tambusai.

3.6.5. Jalan KH. Ahmad Dahlan

Aktivitas formal yang berkembang pada lokasi ini adalah permukiman, pendidikan dan perdagangan. Fasilitas pendidikan yang tersedia dilokasi mulai dari yang terendah (Taman kanak-kanak) sampai perguruan tinggi. Fasilitas pendidikan tersebut antara lain, Yayasan pendidikan Masmur (menyelenggarakan pendidikan mulai dari MTs, SMU dan SMK), Yayasan Perguruan Diniyah (menyelenggarakan pendidikan mulai dari TK sampai SMU), Institut Agama Islam Negeri SUSQA, Yayasan pendidikan Muhammadiyah (mulai dari TK sampai perguruan tinggi), SD Beerseba. Fasilitas perdagang berupa pertokoan,

sedangkan fungsi permukiman terdapat disekitar lokasi yang akses menuju perumahan penduduk langsung dari jalan ini. Selain fungsi tersebut pada lokasi ini juga terdapat fasilitas kesehatan yaitu Rumah Sakit Eria Bunda.

Pada lokasi PKL PKL berkembang secara berkelompok di sekitar aktivitas masyarakat, dimana PKL memanfaatkan ruang di atas saluran, badan jalan, pelataran parkir, halaman rumah penduduk dan lahan-lahan kosong sebagai tempat aktivitasnya. Sedangkan jenis dagangan bervariasi mulai dari makanan/minuman, jasa fotokopi, tambal ban dan lainnya.

Tatanan massa bangunan setiap aktivitas pendidikan merupakan komplek bangunan permanen, untuk bangunan TK sampai SD pada umumnya berlantai 1 (satu), sementara bangunan SLTP sampai Perguruan Tinggi terdiri dari 2-3 lantai. Adapun PKL di lokasi ini menggunakan berupa tenda, kios dan gerobak sebagai sarana aktivitas.

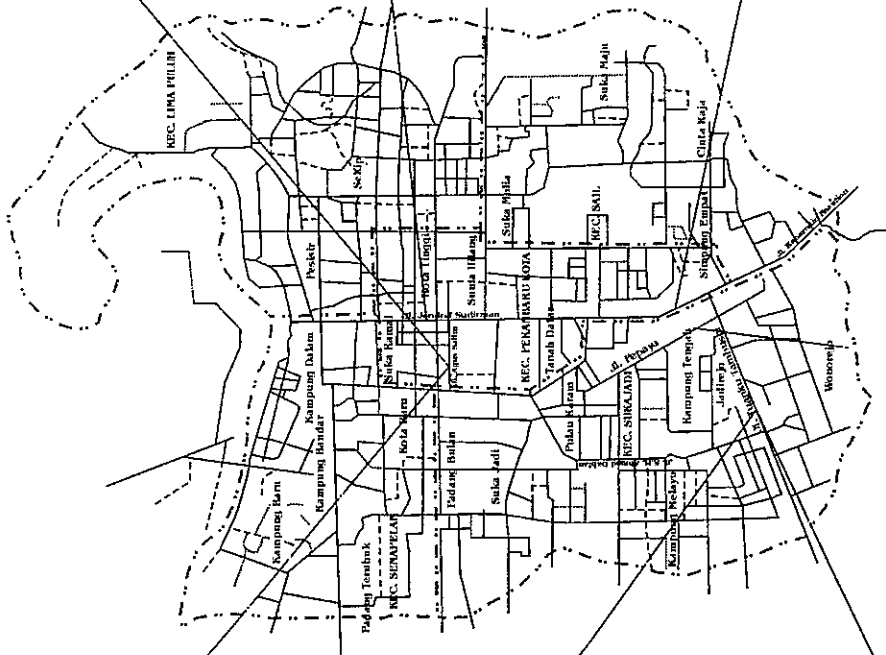
Jalan ini merupakan jalan kolektor dengan sistem arus lalu lintas dua arah. Pada jalan ini dilalui oleh kendaraan umum jurusan Sukajadi. Kualitas jalan merupakan jalan aspal dengan kondisi cukup baik, dengan lebar 8 M. Jalan ini tidak memiliki fasilitas trotoar, dimana jalan langsung dibatasi oleh saluran dibagian kiri dan kanannya. Untuk pertokoan pada umumnya menyediakan lahan parkir bagi pengunjungnya, sementara untuk aktivitas pendidikan hanya menyediakan parkir bagi personilnya, sementara untuk tamu atau jemputan memanfaatkan parkir di badan jalan.



Lokasi Aktivitas PKL
Padajalan Agus Salim



Lokasi Aktivitas PKL
Padajalan Tuanku Tambusai
Depan Pertokoan



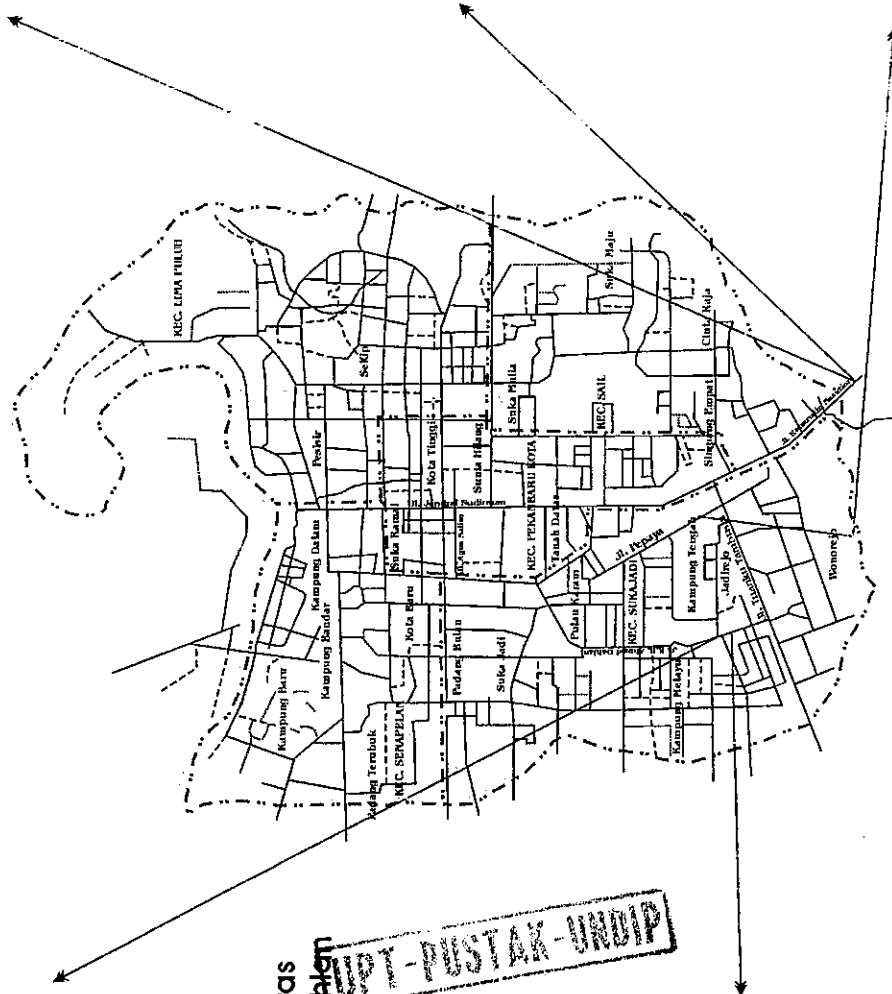
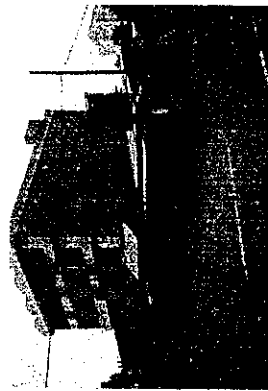
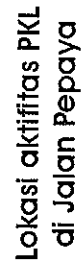
Lokasi PKL
Pada Jalan Sudirman Di Sekitar
Kawasan Perdagangan



Lokasi Aktivitas PKL
Pada Jalan Sudirman Di Sekitar
Kawasan Perkantoran



Lokasi aktifitas PKL disekitar aktifitas pendidikan di Jalan KH Ahmad Dahlan



3.6.6. Jalan Kaharudin Nasution (sekitar Kampus Universitas Islam Riau)

Pada lokasi ini tidak semua ruas jalan di amati karena PKL lebih terkonsentrasi di sekitar kampus UIR, sehingga fungsi utama lokasi ini adalah pendidikan dan juga terdapat pemukiman di sekitarnya.

Pada lokasi ini PKL berkembang dengan pola linier sepanjang jalan. PKL beraktivitas dengan memanfaatkan bahu jalan, halaman toko dan halaman rumah penduduk sebagai tempat aktivitasnya. Jenis dagangan didominasi oleh jasa yaitu jasa fotocopy dan rental komputer, serta makanan dan minuman.

Bangunan Formal yang ada disekitar lokasi berupa bangunan pertokoan dua lantai, bangunan rumah penduduk, serta kios-kios. Sementara bentuk sarana aktivitas PKL disini berupa warung tenda. Gerobak dan kios-kios darurat.

Jalan ini merupakan akses Kota Pekanbaru menuju Rengat (Kabupaten Indragiri Hulu) dengan klasifikasi jalan merupakan jalan arteri. Kondisi jalan yang baik dengan sistem arus lalu lintas dua arah. Lebar jalan ini adalah 22 M, dimana tidak terdapat fasilitas trotoar, jalan langsung berbatasan dengan saluran drainase di kiri kanannya. Untuk parkir tidak ada sistem yang baku, sebagian toko ada yang menyediakan lahan parkir. Bagi yang tidak menyediakan lahan parkir, badan jalan dimanfaatkan sebagai lahan parkir.

3.7. Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Pedagang Kaki Lima

Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan peraturan mengenai penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yaitu Perda No. 11 tahun 2001 yang diperkuat dengan SK Walikota No. 220 Tahun 2001. Peraturan Daerah ini telah dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, pedagang dan pengaturan dalam menjalankan usaha agar berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan

kesejahteraannya. Selain itu Peraturan Daerah ini berisikan mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pedagang kaki lima dalam melaksanakan aktivitasnya, serta sanksi hukum bila terjadi pelanggaran.

Dalam Perda tersebut belum diatur dimana lokasi yang boleh dan tidak untuk aktivitas pedagang kaki lima, dimana hanya dikatakan bahwa tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan oleh Kepala Daerah (pasal 2 ayat 1). Hal ini berpengaruh dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut, karena tidaklah semudah yang dibayangkan. Pemerintah masih dihadapkan pada berbagai kendala baik dari sisi pedagang kaki lima maupun dari pemerintah daerah itu sendiri. Seperti masih kurangnya sosialisasi mengenai peraturan kepada pedagang, kurangnya kesadaran pedagang akan masalah K3, pengawasan dari aparat yang masih belum optimal karena terbatasnya personil, penerapan sanksi hukum yang belum tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu masalah yang luput dari perhatian adalah pihak konsumen yang menjadi sasaran dari pedagang. Apabila ada kesadaran dari pihak konsumen untuk tidak berbelanja pada pedagang yang beraktfitas pada lokasi yang bukan peruntukannya, secara tidak langsung akan menimbulkan kesadaran dari pedagang tersebut.

Melihat dari problema di atas, dalam hal pengelolaan pedagang kaki lima hendaklah memperhatikan semua aspek yang terkait. Jadi tidak hanya melihat dari sisi kepentingan pemerintah, tapi juga harus diperhatikan dari sisi pedagang dan masyarakat itu sendiri sehingga didapat cari suatu titik temu bagi semua kepentingan. Sehingga kebijakan maupun aturan yang diberlakukan dapat diimplementasikan secara optimal karena telah mengakomodasi semua kepentingan pihak yang terkait.

BAB IV

ANALISIS PENGARUH KEBERADAAN PKL TERHADAP LINGKUNGAN FISIK KOTA PEKANBARU

Pada bab ini akan dibahas analisa mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan PKL terhadap lingkungan fisik, baik pengaruh positif maupun negatif akibat dari perilaku PKL dalam beraktivitas dan memanfaatkan ruang. Analisis dilakukan berdasarkan pada kebijakan dan peraturan yang berlaku serta persepsi dari masyarakat terhadap keberadaan PKL tersebut.

4.1. Identifikasi Karakteristik PKL di Kota Pekanbaru

Pada bagian ini akan dilakukan pembahasan mengenai karakteristik aktivitas PKL yang didasarkan atas karakteristik usaha dan karakteristik lokasi yang meliputi jenis dagangan, sarana fisik aktivitas, pengelompokan PKL, waktu aktivitas, jenis ruang aktivitas, lokasi aktivitas, luas ruang aktivitas dan perlakuan terhadap sarana fisik aktivitas atau cara penyimpanan sarana fisik aktivitas PKL

4.1.1. Jenis Dagangan

Berdasar jenis dagangan yang dijual, responden PKL dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Makanan, yang terdiri dari makanan yang tidak atau belum diproses, termasuk di dalamnya makanan mentah seperti daging, buah-buahan, sayuran, dan makanan siap saji, seperti bakso, nasi minuman dan lainnya.
- b. Barang bukan makanan (non makanan), seperti barang kelontong, koran, asesoris serta barang sandang lainnya.
- c. Jasa, meliputi jasa tambal ban, reparasi kunci, jam dan jasa lainnya.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka jenis dagangan responden PKL dapat dilihat pada Tabel IV.1. berikut.

TABEL IV.1.
JENIS DAGANGAN PKL

No.	Jenis Dagangan	Jumlah	%
1.	Makanan	56	56
2.	Non Makanan	32	32
3.	Jasa	12	12
Total		100	100

Sumber: Hasil penelitian dan analisa penulis, 2003

Dari Tabel IV.1. di atas terlihat bahwa prosentase terbesar responden PKL menjual jenis dagangan berupa makanan yaitu 56%. Sedangkan PKL yang menjual dagangan non makanan sebanyak 32% dan PKL yang menjual jasa sebanyak 12%. Hal ini menunjukkan bahwa makanan mendominasi jenis dagangan PKL.

Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 82-83), bahwa jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas di sekitarnya. Seperti diketahui bahwa PKL beraktivitas pada lokasi-lokasi sekitar pusat aktivitas masyarakat, yang juga berperan sebagai aktivitas pendukung kegiatan bagi kegiatan yang ada di sekitarnya.

Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota Propinsi Riau memiliki peran sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan pusat pelayanan lainnya. Sehingga hal ini menjadi peluang bagi PKL dalam menyediakan kebutuhan bagi kegiatan formal disekitarnya terutama makanan. Seperti pada kawasan perdagangan, terdapat banyak karyawan yang beraktivitas disini, sehingga dalam memenuhi kebutuhan makanannya mereka berusaha mencari lokasi yang terdekat dari tempat aktivitas mereka serta harga yang lebih murah. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh

Rachbini dan Hamid (1994: 90-91) mengenai pedagang kaki lima di Jakarta dan Surabaya, yaitu ditemukan adanya kecendrungan bahwa setiap berdiri gedung bertingkat di jalan Sudirman Jakarta maka muncullah sejumlah pedagang kaki lima yang berderet sepanjang jalan. Aktivitas pedagang kaki lima ini bertujuan untuk melayani para karyawan atau pegawai bergaji rendah. Sama halnya dengan pendapat Shirvani (1985: 37) bahwa aktivitas pedagang kaki lima diperkotaan merupakan aktivitas pendukung dari aktivitas-aktivitas yang ada (*activity support*).

4.1.2. Sarana Aktivitas PKL

Berdasarkan sarana aktivitas yang digunakan PKL di Kota Pekanbaru, dibedakan atas 6 (enam) kelompok yaitu sebagaimana terlihat pada tabel IV.2 berikut.

TABEL IV.2.
SARANA FISIK AKTIVITAS PKL

No.	Sarana Fisik Aktivitas PKL	Jumlah	%
1.	Gerobak/Kereta dorong	36	36
2.	Tenda	30	30
3.	Gelaran	12	12
4.	Meja	8	8
5.	Kios	10	10
6.	Lainnya	4	4
Total		100	100

Sumber: hasil penelitian dan analisa penulis, 2003

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sarana dagangan berupa gerobak/kereta dorong merupakan sarana yang paling banyak digunakan oleh responden PKL, yaitu 36%. Jenis sarana ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu gerobak/kereta dorong yang dilengkapi dengan atap, yang gunanya untuk melindungi PKL dan perlengkapannya dari pengaruh cuaca. Sarana jenis ini biasanya digunakan oleh pedagang yang menjual jenis dagangan

makanan/minuman siap saji yang juga dilengkapi dengan meja dan kursi, martabak, ayam goreng (*Fried chicken*), buah-buahan dan lainnya. Yang kedua adalah jenis gerobak atau kereta dorong tanpa atap, biasanya digunakan oleh pedagang yang menjual dagangan non makanan seperti asesoris, kacamata, jam dan lainnya.

Sarana dagangan berupa tenda digunakan oleh 30% responden PKL. Sarana dagangan jenis tenda umumnya terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu, pertama tenda yang dilengkapi dengan gerobak atau kereta dorong sebagai tempat menyimpan barang dagangannya serta meja dan kursi bagi konsumennya. Bagian atap dan kelilingnya biasanya ditutup dengan terpal atau bahan lainnya sehingga terkesan seperti warung, yang biasa juga disebut warung tenda. Sarana jenis ini biasanya digunakan oleh pedagang makanan/minuman siap saji. Kedua jenis tenda yang tidak dilengkapi dengan meja, kursi, melainkan etalase sebagai tempat barang dagangannya. Bagian atap juga ditutup dengan pelindung dari terpal atau bahan lainnya namun pada sisi depannya terbuka. Sarana jenis ini banyak digunakan oleh pedagang non makanan seperti pedagang jam, pakaian, asesoris dan lainnya.

Sarana jenis gelaran digunakan oleh 12% responden PKL. Bentuk sarana ini berupa gelaran dari plastik/tikar yang digunakan sebagai alas dalam menggelar barang dagangannya. Sarana jenis ini banyak digunakan oleh pedagang makanan belum di proses (pedagang sayuran), pedagang non makanan seperti pakaian, majalah, poster, asesoris, dan barang kelontong lainnya, pedagang jasa seperti tukang sol sepatu, patri dan lainnya.

Sarana dagangan berupa meja digunakan oleh 8% responden PKL. Sarana meja biasa digunakan sebagai tempat meletakkan barang dagangannya, sebagian pedagang ada yang melengkapinya dengan atap sebagai pelindung. Sarana jenis ini biasanya digunakan oleh pedagang yang menjual makanan kecil, bumbu dapur, dan lainnya.

Sarana dagangan berupa kios digunakan oleh 10% responden PKL. Bentuk sarana ini berupa bangunan darurat yang tidak permanen, yang dibangun PKL pada saat tidak adanya pengawasan dari aparat, biasanya pada malam hari, biasanya juga sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal bagi pemiliknya. Sarana jenis ini biasanya dibangun pada daerah milik jalan atau lahan-lahan kosong baik milik pemerintah maupun pribadi. Pada umumnya digunakan oleh pedagang makanan/minuman, barang kelontong, jasa tambal ban dan lainnya.

Jenis sarana lainnya adalah jenis sarana dagang yang digunakan oleh PKL yang tidak termasuk ke dalam (lima) jenis sarana dagangan di atas seperti pikulan atau keranjang, mobil dan lainnya, yang digunakan oleh 4% PKL responden.

4.1.3. Pola Penyebaran PKL

Berdasarkan hasil pengamatan secara umum penyebaran PKL di Kota Pekanbaru terdapat dua pola penyebaran yaitu

- a. Pola penyebaran memanjang (*linier concentration*). PKL lebih banyak terlihat membentuk pola ini yaitu berkembang mengikuti pola jalan. Pada pola penyebaran memanjang ini memiliki aksesibilitas yang tinggi dalam mencapai konsumen. PKL dengan pola penyebaran memanjang beraktivitas memanfaatkan badan jalan, trotoar atau lahan parkir di sepanjang jalan-jalan utama kota.
- b. Pola penyebaran mengelompok (*focus agglomeration*). Pola penyebaran mengelompok terjadi di sekitar pasar, plaza dan beberapa fasilitas pendidikan. Pemilihan pola penyebaran ini dengan pertimbangan faktor aglomerasi, dengan pengelompokkan barang dagangan sejenis agar lebih menarik minat konsumen. Kondisi seperti ini dapat terlihat pada lokasi Pasar Cik Puan, di sekitar Citra Plaza, dan di sekitar beberapa fasilitas pendidikan.

Berdasarkan pengelompokan PKL, pada umumnya PKL cenderung beraktivitas bercampur dengan pedagang jenis lain (63%), namun ada juga PKL yang berkelompok dengan pedagang sejenis sebesar 37%, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel IV.3.

**TABEL IV.3.
POLA PENGELOMPOKAN PKL**

No.	Pengelompokan	Jumlah	%
1.	Sejenis.	37	37
2.	Bercampur dengan jenis lain	63	63
Total		100	100

Sumber: hasil penelitian dan analisa penulis, 2003

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pola penyebaran PKL di Kota Pekanbaru terdiri dari dua pola penyebaran yaitu bersifat memanjang (*linear concentration*) dan pola penyebaran mengelompok (*focus agglomeration*). Sedangkan dalam menjalankan aktivitasnya PKL cenderung bercampur dengan pedagang yang berlainan jenis dagangannya.

4.1.4. Waktu aktivitas PKL

Waktu PKL beraktivitas bervariasi mulai dari pagi sampai malam hari tergantung dari jenis dagangannya, seperti pedagang sayur beraktivitas mulai dari pagi hingga siang hari, sementara pedagang makanan beraktivitas dari pagi hingga malam atau dari sore hingga tengah malam. Berdasarkan lama waktu aktivitas dapat dibedakan sesuai tabel IV.4. dibawah ini.

TABEL IV.4.
LAMA WAKTU AKTIVITAS PKL

No.	Lama Waktu Aktivitas PKL	Jumlah	%
1.	< 4 Jam	2	2
2.	4-8 Jam	55	55
3.	>8 Jam	43	43
Total		100	100

Sumber: hasil penelitian dan analisa penulis, 2003

Pada tabel di atas terlihat bahwa lamanya waktu PKL beraktivitas yang paling banyak adalah 4-8 jam yaitu sebesar 55%, yang beraktivitas lebih dari 8 (delapan) jam sebanyak 43%, sedangkan PKL yang beraktivitas kurang dari 4 (empat) jam hanya 2%. Seperti kita ketahui bahwa PKL selalu beraktivitas pada kawasan fungsional kota, dimana aktivitas formal pada kawasan tersebut tidak berlangsung selama 24 jam, sehingga lama waktu aktivitas PKL juga tergantung dari waktu aktivitas formal yang ada di sekitarnya.

4.1.5. Jenis Ruang Aktivitas PKL

Berdasarkan hasil pengamatan PKL responden di Kota Pekanbaru cenderung memanfaatkan ruang-ruang publik yang tersedia diantaranya trotoar, badan jalan, lahan parkir dan emperan pertokoan, hanya sedikit PKL yang memanfaatkan ruang privat. Untuk lebih jelasnya jenis ruang yang dimanfaatkan oleh PKL dapat dilihat pada tabel IV.7.

TABEL IV. 5.
JENIS RUANG AKTIVITAS PKL

No.	Ruang Aktivitas PKL	Jumlah	%
1.	Trotoar	14	14
2.	Badan Jalan	39	39
3.	Pelataran Parkir/Halaman /Emperan Toko	25	25
4.	Lainnya	22	22
Total		100	100

Sumber: Hasil penelitian dan analisis penulis, 2003

Pada tabel IV.5. diatas diketahui bahwa badan jalan merupakan jenis ruang yang paling banyak digunakan oleh responden PKL yaitu sebesar 39%. Jenis ruang pelataran parkir/halaman/emperan toko dimanfaatkan oleh 23%, jenis lainnya yaitu diatas saluran, lahan kosong, halaman rumah dimanfaatkan oleh 22% PKL responden. Selanjutnya jenis ruang trotoar dimanfaatkan oleh 14% PKL.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa PKL memanfaatkan ruang publik yang ada pada lokasi, dimana dari prosentase di atas terlihat bahwa perbandingan jumlah PKL yang memanfaatkan masing-masing ruang tidak terlalu menjolok. Hal ini menunjukkan bahwa PKL memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia di sekitar lokasi aktivitas masyarakat, karena memang tidak ada pilihan ruang lainnya bagi aktivitas PKL.

4.1.6. Luas Ruang Aktivitas PKL

Luas ruang aktivitas PKL pada studi ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu kecil dari 2 meter², 2-5 meter², dan besar dari 5 meter². Luas ruang yang dimanfaatkan oleh PKL dapat dilihat pada tabel IV.8 berikut.

TABEL IV.6.
LUAS RUANG AKTIVITAS PKL

No.	Luas Ruang Aktivitas PKL	Jumlah	%
1.	< 2,00 M ²	45	45
2.	Antara 2 - 5 M ²	41	41
3.	> 5,00 M ²	14	14
Total		100	100

Sumber: Hasil penelitian dan analisis penulis, 2003

Dari tabel IV.6. diatas terlihat bahwa sebanyak 45% responden PKL memanfaatkan ruang kecil dari 2 meter², 41% responden memanfaatkan ruang seluas 2-5 meter², 14% responden memanfaatkan ruang dengan luas besar dari 5 meter².

Berdasar uraian tersebut menunjukan bahwa PKL masih cenderung memanfaatkan ruang yang tidak terlalu luas, yang ditunjukkan banyaknya PKL yang menggunakan ruang kecil dari 2 meter².

4.1.7. Perlakuan PKL terhadap Sarana Aktivitas

Perlakuan terhadap ruang aktivitas dimaksud disini adalah bagaimana PKL memanfaatkan ruang aktivitasnya termasuk cara penyimpanan sarana fisik aktivitasnya saat telah selesai beraktivitas. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas ruang dimana PKL beraktivitas. Untuk lebih jelasnya cara penyimpanan sarana fisik aktivitas oleh PKL dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL IV.7.
CARA PENYIMPANAN SARANA AKTIVITAS

No.	Cara Penyimpanan Sarana Aktivitas	Jumlah	%
1.	Ditinggal	27	27
2.	Dibawa pulang sebagian & sebagian ditinggal	41	41
3.	Disimpan disekitar lokasi	27	27
4.	Dijaga sendiri	5	5
Total		100	100

Sumber: Hasil penelitian dan analisis penulis, 2003

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya kecenderungan PKL untuk memberikan tanda pada lokasi tempat aktivitasnya, dengan meninggalkan sebagian sarana fisik aktivitasnya (41%) atau seluruh sarana fisik aktivitasnya (27%). Sarana aktivitas ini biasanya berupa tenda ataupun kereta dorong. Selain itu PKL juga ada yang menitipkan sarana aktivitasnya di sekitar lokasi (27%), misalnya pada toko di sekitar tempat aktivitasnya. Biasanya jenis sarana aktivitas yang dititipkan berupa etalase dan meja. Sedangkan cara penyimpanan dengan dijaga sendiri (5%), dimana sarana fisik aktivitas langsung menjadi tempat tinggal PKL. Jenis sarana ini biasanya berupa kios-kios darurat.

Selain cara penyimpanan sarana aktivitas, cara PKL memperlakukan tempat usahanya juga harus diperhatikan. Hasil survei menunjukkan bahwa pada umumnya PKL membersihkan tempat aktivitasnya setelah selesai beraktivitas, namun tingkat kebersihan yang dihasilkan tidak seperti yang diharapkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh pungutan retribusi sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang merupakan uang kebersihan, sehingga PKL menganggap masalah kebersihan lokasi adalah tugas petugas kebersihan. Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa PKL cenderung meninggalkan sarana fisik aktivitasnya setelah aktivitas selesai, dan kurangnya rasa tanggung jawab akan kebersihan lingkungan.

4.2. Identifikasi Karakteristik Elemen Fisik Lingkungan

Pada bagian ini akan dibahas mengenai karakteristik elemen-elemen fisik lingkungan yang ada di Kota Pekanbaru, untuk melihat bagaimana implikasi keberadaan PKL terhadap masing-masing elemen fisik tersebut. Adapun elemen fisik lingkungan yang dimaksud adalah tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, serta ruang aktivitas yang terdiri dari trotoar, jalan, pelataran parkir/halaman toko. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini.

4.2.1. Tata Guna Lahan.

Bagian ini menjelaskan tentang kondisi tata guna lahan pada lokasi studi dengan adanya aktivitas PKL. Tata guna lahan dinilai berdasarkan kondisi di lapangan yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kondisi yaitu:

- a. Terganggu : bila keberadaan PKL menyebabkan terganggunya fungsi utama kawasan dimana PKL beraktivitas
- b. Agak terganggu : bila keberadaan PKL agak mengganggu fungsi utama kawasan dimana PKL beraktivitas.
- c. Tidak terganggu : bila keberadaan PKL tidak menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan dimana PKL beraktivitas

**TABEL IV.8.
KONDISI TATA GUNA LAHAN**

No.	Kondisi Tata Guna Lahan	Jumlah	%
1.	Terganggu	41	41
2.	Agak terganggu	59	59
3.	Tidak terganggu	-	-
Total		100	100

Sumber: Hasil penelitian dan analisis penulis, 2003

Dari tabel IV.8. di atas dapat terlihat bahwa keberadaan PKL yang menyebabkan terganggunya tata guna lahan adalah 41%, yang menyebabkan tata guna lahan agak terganggu 59%, sedangkan yang tidak menimbulkan gangguan tidak ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan PKL telah menyebabkan gangguan terhadap tata guna lahan dimana PKL beraktivitas.

4.2.2. Bentuk dan Massa Bangunan

Pada bagian ini menjelaskan kondisi bentuk dan massa bangunan yang ada dengan adanya aktivitas PKL di sekitarnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan kondisi ini dibedakan atas 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Terganggu : bila keberadaan PKL memanfaatkan sarana fisik aktivitas berupa tenda atau kios dan tidak di kemasi atau ditinggalkan saja setelah aktivitas selesai .
- b. Agak terganggu : bila keberadaan PKL memanfaatkan sarana aktivitas berupa gerobak/kereta dorong, gelaran/alas, meja, yang di kemasi atau dibersihkan setelah selesai beraktivitas.
- c. Tidak terganggu : Bila keberadaan PKL tidak mempengaruhi bentuk dan massa bangunan, seperti PKL yang tidak menetap.

TABEL IV.9.
KONDISI BENTUK DAN MASSA BANGUNAN

No.	Kondisi Tata Guna Lahan	Jumlah	%
1.	Terganggu	41	41
2.	Agak terganggu	59	59
3.	Tidak terganggu	-	-
Total		100	100

Sumber: Hasil penelitian dan analisis penulis, 2003

Pada tabel IV.9. di atas terlihat bahwa keberadaan PKL yang menyebabkan bentuk dan massa bangunan terganggu adalah 41%, yang menyebabkan bentuk dan massa bangunan agak terganggu adalah 59%, sedangkan yang tidak mengganggu tidak ada. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan PKL menyebabkan gangguan terhadap bentuk dan massa bangunan, hanya saja tingkat gangguan yang ditimbulkan tidak sama tergantung pada sarana fisik aktivitas yang digunakan dan perlakuan PKL terhadap sarana fisik aktivitasnya tersebut.

4.2.3. Sirkulasi dan Parkir

Pada bagian ini dibahas mengenai kondisi sirkulasi dan parkir dengan adanya aktivitas PKL. Berdasarkan pengamatan kondisi sirkulasi dan parkir dibedakan kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Terganggu : bila keberadaan PKL telah menyebabkan kemacetan pada lokasi dimana PKL beraktivitas.
- b. Agak terganggu : bila keberadaan PKL menyebabkan penyempitan badan jalan namun tidak sampai menimbulkan kemacetan.
- c. Tidak terganggu : bila keberadaan PKL tidak berpengaruh terhadap sirkulasi dan parkir.

TABEL IV.10.
KONDISI SIRKULASI DAN PARKIR

No.	Kondisi Tata Guna Lahan	Jumlah	%
1.	Terganggu	73	73
2.	Agak terganggu	27	27
3.	Tidak terganggu	-	-
Total		100	100

Sumber: Hasil penelitian dan analisis penulis, 2003

Dari tabel IV.10. di atas terlihat bahwa keberadaan PKL sebanyak 73% menyebabkan sirkulasi dan parkir terganggu, 21% menyebabkan sirkulasi dan parkir agak terganggu, sedangkan yang tidak menimbulkan gangguan tidak ada. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan PKL mengganggu sirkulasi dan parkir, hanya tingkat gangguan yang ditimbulkan tidak sama.

4.2.4. Ruang Aktivitas

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kondisi ruang-ruang yang dimanfaatkan PKL sebagai tempat beraktivitas, dimana ruang-ruang yang dimaksud adalah ruang publik kota yang bukan diperuntukkan bagi aktivitas PKL. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kondisi ruang yang dimanfaatkan PKL sebagai tempat aktivitas dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Terganggu : bila keberadaan PKL menyebabkan ruang yang ditempatinya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. Agak terganggu : bila keberadaan PKL hanya menyebabkan sebagian fungsi ruang terganggu.
- c. Tidak terganggu : bila keberadaan PKL tidak menimbulkan gangguan

TABEL IV.11.
KONDISI RUANG AKTIVITAS PKL

No.	Kondisi Tata Guna Lahan	Jumlah	%
1.	Terganggu	41	41
2.	Agak terganggu	53	53
3.	Tidak terganggu	6	6
Total		100	100

Sumber: Hasil penelitian dan analisis penulis, 2003

Dari tabel IV.11 terlihat bahwa keberadaan PKL 41% menyebabkan ruang aktivitas terganggu, 53% menyebabkan ruang aktivitas agak terganggu dan 6% tidak menimbulkan gangguan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan PKL sebagian besar menimbulkan gangguan terhadap ruang aktivitasnya dan hanya sebagian kecil yang tidak menimbulkan gangguan.

Kondisi elemen fisik lingkungan yang diuraikan di atas dipengaruhi oleh karakteristik PKL dalam beraktivitas, untuk melihat pengaruh karakteristik aktivitas PKL terhadap elemen fisik lingkungan dapat dilihat pada analisis hubungan kedua variabel tersebut.

4.3. Analisis Hubungan antara Perilaku Aktivitas PKL dengan Elemen Fisik Lingkungan

Analisis ini dilakukan untuk melihat hubungan antara karakteristik aktivitas PKL dengan elemen fisik lingkungan yang meliputi tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, dan ruang terbuka yang merupakan ruang aktivitas PKL. Karakteristik aktivitas PKL mencakup jenis dagangan, bentuk sarana aktivitas, pola pengelompokkan PKL, waktu aktivitas, lokasi aktivitas, luas ruang dan cara penyimpanan sarana aktivitas. Adapun analisis ini dilakukan dengan menggunakan tabulasi silang (*cross tabulation*). Hasil dari analisis ini berguna untuk melihat pengaruh dari keberadaan PKL terhadap fisik lingkungan.

Untuk karakteristik aktivitas PKL didasarkan pada hasil kuesioner yang diberikan kepada PKL. Sedangkan untuk elemen fisik lingkungan didasarkan pada pengamatan langsung di lapangan pada setiap lokasi studi, dengan memperhatikan kondisi elemen fisik lingkungan dengan adanya keberadaan PKL. Adapun kriteria penilaian dari elemen fisik

tersebut adalah dengan melihat kondisi elemen fisik lingkungan dengan adanya PKL dibandingkan dengan teori dan aturan-aturan berkaitan dengan setiap elemen.

Pada tabel IV.10. di bawah ini menunjukkan hasil uji yang dilakukan, dimana apabila nilai *Chi-square* pada *Asymp.Sig* < 0,05 menunjukkan adanya hubungan antara kedua variabel, sedangkan bila nilai *Contingency coefficient* (koefisien kontigensi) semakin mendekati 1 menunjukkan kaitan yang erat antara keduanya.

TABEL IV.12.
HUBUNGAN PERILAKU PKL DENGAN ELEMEN FISIK LINGKUNGAN.

No	Karakteristik PKL		Kondisi Lingkungan Fisik			
			Gangguan Tata guna lahan	Gangguan Bentuk & massa bangunan	Gangguan Sirkulasi & parkir	Gangguan Ruang aktivitas
1	Jenis dagangan	Asymp. Sig	0.067	0.175	0.283	0.175
		Coef Cont	0.324	0.375	0.263	0.375
2	Sarana fisik	Asymp. Sig	0.016	0.049	0.088	0.049
		Coef Cont	0.349	0.394	0.296	0.394
3	Pola penyebaran PKL	Asymp. Sig	0.000	0.000	0.000	0.000
		Coef Cont	0.382	0.394	0.422	0.394
4	Waktu aktivitas	Asymp. Sig	0.047	0.077	0.001	0.017
		Coef Cont	0.240	0.279	0.324	0.279
5	Lokasi aktivitas	Asymp. Sig	0.000	0.000	0.000	0.000
		Coef Cont	0.707	0.816	0.707	0.816
6	Luas ruang aktivitas	Asymp. Sig	0.019	0.014	0.005	0.014
		Coef Cont	0.271	0.333	0.309	0.333
7	Cara penyimpanan sarana fisik	Asymp. Sig	0.977	0.000	0.210	0.000
		Coef Cont	0.045	0.482	0.208	0.482

Sumber: Hasil analisis penulis, 2003.

Keterangan :

- *Asymp.Sig* < 0.05. artinya ada hubungan antara dua variabel (signifikan)

Berdasarkan tabel IV.12. di atas, terlihat parameter yang menunjukkan ada atau tidaknya hubungan antara variabel-variabel tersebut, sebagai berikut :

1. Jenis dagangan PKL tidak mempunyai hubungan dengan tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang aktivitas, dan pedestrian. Hal ini terlihat dari hasil uji chi kuadrat diperoleh nilai pada *asympt sig.* besar dari 0.05 untuk semua variabel, yang menunjukkan bahwa jenis dagangan PKL tidak langsung mempengaruhi

UPT-PUSTAK-UNDIP

elemen fisik lingkungan. Jenis dagangan tidak secara langsung mempengaruhi fisik lingkungan karena barang dagangan mempunyai wadah, sehingga dapat ditata dengan rapi. Tetapi lain halnya bila barang dagangan dan sarana fisik aktivitasnya dilihat sebagai suatu kesatuan maka akan dapat mempengaruhi lingkungan.

2. Sarana fisik aktivitas

➤ Jenis sarana fisik aktivitas PKL dengan tata guna lahan.

Berdasarkan hasil uji Chi Kuadrat didapat nilai pada *Asymp. Sig.* $0.016 < 0.05$, yang berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara sarana fisik aktivitas dan tata guna lahan. Hal ini juga menunjukkan bahwa sarana fisik aktivitas berpengaruh terhadap tata guna lahan. Koefisien kontingensi yang tidak mendekati 1(satu) menunjukkan hubungan antara keduanya tidak terlalu erat.

Jenis dari sarana fisik aktivitas PKL akan mempengaruhi fungsi ruang dimana dia beraktivitas tergantung jenisnya, dalam arti sejauh mana sarana fisik tersebut mengganggu. Seperti pada trotoar yang berfungsi sebagai ruang pejalan kaki, keberadaan sarana fisik aktivitas berupa tenda yang menghabiskan seluruh lebar trotoar akan mengganggu fungsi dari trotoar tersebut karena tidak dapat dilewati, lain halnya bila sarana aktivitasnya hanya memanfaatkan sebagian kecil dari trotoar sehingga masih dapat dimanfaatkan oleh pejalan kaki.

➤ Sarana fisik aktivitas PKL dengan bentuk dan massa bangunan

Dari hasil uji Chi Kuadrat didapat nilai pada *Asymp. Sig.* $0.049 < 0.05$ yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa sarana fisik aktivitas PKL berpengaruh terhadap bentuk dan massa bangunan. Melihat dari nilai koefisien kontingensi 0.394 menunjukkan bahwa hubungan keduanya tidak begitu erat. Hal ini terlihat dari sarana fisik aktivitas yang

sangat sederhana dan apa adanya misalnya tenda-tenda yang terbuat dari spanduk bekas yang sudah lusuh, sehingga kondisi ini mempengaruhi tampilan bangunan bangunan yang ada di sekitarnya, karena tidak adanya keserasian bentuk bangunan antara kedua komponen tersebut.

➤ Sarana fisik aktivitas dengan sirkulasi dan parkir

Hasil uji Chi Kuadrat untuk variabel ini diperoleh nilai pada *Asymp. Sig.* $0.88 > 0.05$, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Jadi sarana fisik aktivitas tidak berpengaruh terhadap sirkulasi dan parkir.

➤ Sarana fisik dengan ruang aktivitas

Dari hasil uji Chi Kuadrat di dapat hasil pada *Asymp. Sig.* $0.049 < 0.05$, yang berarti ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Sedangkan nilai koefisien kontigensi 0.384 (tidak mendekati 1) yang menunjukkan hubungan keduanya tidak terkait erat. Kondisi dapat terlihat dari pemanfaatan sarana fisik aktivitas yang dipengaruhi oleh tempat aktivitas PKL. Misalnya PKL yang beraktivitas di trotoar biasanya menggunakan sarana aktivitas yang mudah dipindahkan seperti gerobak, meja atau gelaran, yang juga memudahkan mereka untuk pindah bila ada penertiban.

3. Pola penyebaran PKL

Dari hasil uji Chi Kuadrat antara pola penyebaran PKL dengan elemen-elemen fisik lingkungan diperoleh nilai chi kuadrat pada *Asymp.Sig* $0.000 < 0.05$, yang berarti bahwa pola penyebaran PKL memiliki hubungan yang signifikan dengan kesemua elemen fisik lingkungan. Nilai Chi kuadrat pada *Asymp.sig* 0.000 juga menunjukkan bahwa pola penyebaran memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi elemen fisik lingkungan. Adapun nilai koefisien kontingensinya adalah 0.349 yang menunjukkan keterkaitan yang tidak begitu erat. Kondisi ini sangat jelas terlihat, PKL yang

beraktivitas secara berkelompok pada suatu ruang akan lebih besar tingkat pengaruhnya terhadap fungsi ruang yang dimanfaatkan PKL, karena dengan berkelompok maka ruang yang dimanfaatkan bagi kegiatan PKL juga semakin besar, sehingga menyebabkan fungsi ruang tempat aktivitasnya menjadi terganggu bahkan berubah. Kemudian PKL yang beraktivitas secara berkelompok dengan sarana aktivitas yang beragam membentuk tatanan massa yang besar, sehingga menutupi muka bangunan yang ada di belakangnya yang secara visual akan menurunkan citra keindahan dari bangunan formal yang ada. Pengelompokan PKL pada suatu ruang misalnya pada jalan atau pelataran parkir akan mengganggu sirkulasi lalu lintas kendaraan baik di jalan maupun kendaraan yang akan parkir. Selain itu dapat dilihat hubungan PKL dengan ruang aktivitas, dimana PKL beraktivitas secara berkelompok pada kawasan yang tingkat intensitas pengunjungnya sangat tinggi seperti pada jalan Tuanku Tambusai di sekitar Citra Plaza, di jalan Agus Salim, di jalan Ahmad Dahlan di sekitar bangunan-bangunan sekolah yang ada. Sementara pada jalan-jalan lainnya PKL cenderung beraktivitas secara linier mengikuti pola jalan.

4. Waktu aktivitas PKL

➤ Waktu aktivitas dengan tata guna lahan

Berdasarkan hasil uji Chi kuadrat diperoleh nilai Chi kuadrat pada *Asymp.sig.* $0.047 < 0.05$, yang berarti bahwa terdapat hubungan diantara kedua variabel tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa waktu aktivitas berpengaruh terhadap tata guna lahan. Kondisi ini terlihat dari aktivitas PKL pada waktu-waktu tertentu sangat mengganggu fungsi ruang dimana PKL beraktivitas, seperti di sekitar Pasar Cik Puan pada pagi hari PKL beraktivitas sampai ke trotoar dan badan jalan, namun setelah siang hari mereka beraktivitas di dalam pasar, sehingga pada pagi

hari ruang yang berfungsi sebagai ruang buat sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan menjadi terganggu.

- Waktu aktivitas dengan bentuk dan massa bangunan.

Hasil uji kuadrat Chi menunjukkan nilai *asympt.sig.* adalah $0.077 > 0.05$ yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan diantara kedua variabel tersebut.

- Waktu aktivitas dengan sirkulasi dan parkir serta ruang aktivitas.

Dari hasil uji kuadrat chi terhadap waktu aktivitas dengan sirkulasi dan parkir serta ruang aktivitas diperoleh nilai *asympt.sig* adalah 0.001 dan $0.017 < 0.05$, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa waktu aktivitas berpengaruh terhadap sirkulasi dan parkir serta terhadap ruang aktivitas. Kondisi ini terlihat dari waktu aktivitas PKL yang tergantung dari lokasi dan ruang dimana PKL beraktivitas. Di sekitar pasar Cik Puan jalan Tuanku tambusai dan di pertigaan jalan Agus Salim-Sudirman waktu PKL aktivitas yang mengganggu adalah pada pagi hari, karena pada pagi hari PKL beraktivitas sampai ke badan jalan dan pada waktu tersebut lalu lintas sedang padat. Kondisi ini menyebabkan badan jalan menjadi sempit, dan jalan yang berfungsi sebagai tempat lalu lintas kendaraan menjadi terganggu dan menyebabkan terjadi kemacetan. Selain itu aktivitas PKL menjadi mengganggu pada waktu-waktu pengunjung ramai, misalnya pada saat liburan, puasa, dan lebaran.

5. Lokasi aktivitas.

Berdasarkan hasil uji Chi kuadrat untuk semua variabel diperoleh nilai Chi kuadrat pada *Asymp.sig* $0.000 < 0.05$, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel di atas. Hal ini juga menunjukkan bahwa lokasi aktivitas PKL

berpengaruh terhadap kesemua elemen fisik lingkungan yang meliputi tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir serta ruang aktivitas. Selain itu antara lokasi aktivitas dengan tata guna lahan dan sirkulasi dan parkir diperoleh nilai koefisien kontingensi 0,707 yang mendekati satu yang berarti adanya hubungan yang erat antara variabel tersebut. Begitu juga hubungan antara lokasi aktivitas dengan bentuk dan massa bangunan, dan ruang aktivitas diperoleh nilai koefisien kontingensi 0.816, yang menunjukkan hubungan antara variabel tersebut terakait erat. Kondisi ini terlihat dari tingkat pengaruh karekteristik aktivitas PKL terhadap lingkungan fisik yang terbesar terjadi pada pada kawasan perdagangan yaitu lokasi jalan Tuanku Tambusai dan Agus Salim, dapt dilihat pada gambar berikut ini.

5. Luas ruang aktivitas

➤ Luas ruang aktivitas PKL dengan tata guna lahan

Dari hasil uji Chi Kuadrat diperoleh nilai pada *Asymp.Sig.* $0.019 < 0.05$, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel di atas dan berdasarkan Koefisien Kontingensi diperoleh nilai 0.271, yang menunjukkan hubungan kedua variabel kurang erat. Dari nilai-nilai tersebut diketahui bahwa luas ruang aktivitas berpengaruh terhadap tata guna lahan. Kondisi ini dapat terlihat dari cara PKL memanfaatkan ruang, yaitu semakin luas ruang dimanfaatkan semakin mengggngu fungsi dari ruang dimana PKL beraktivitas.

➤ Luas ruang aktivitas PKL dengan bentuk dan massa bangunan

Berdasarkan hasil uji Chi Kuadrat diperoleh nilai pada *asympt.sig.* $0.014 < 0.05$, yang berarti terdapat hubungan antara kedua variabel diatas yang juga menunjukkan bahwa luas rung juga berpengaruh terhadap bentuk dan massa bangunan. Sedangkan berdasarkan Koefisien Kontingensi diperoleh nilai 0.333

yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tidak begitu erat. Kondisi ini terlihat dari luas ruang yang digunakan dan sarana fisik aktivitasnya.

➤ Luas Ruang dengan sirkulasi dan parkir

Dari hasil uji Chi kuadrat diperoleh nilai pada *Asymp.sig.* 0.05, yang berarti terdapat hubungan antara kedua variabel dan menunjukkan bahwa luas ruang berpengaruh terhadap sirkulasi dan parkir. Sedangkan berdasarkan nilai Koefisien Kontingensi yaitu 0.309 yang menunjukkan hubungan yang tidak begitu erat. Kondisi ini dapat terlihat dari pemanfaatan ruang oleh PKL, semakin luas ruang yang digunakan baik oleh tiap unit PKL maupun kelompok PKL akan semakin mengganggu.

7. Cara penyimpanan sarana fisik aktivitas

➤ Cara penyimpanan sarana fisik aktivitas tidak mempunyai hubungan dengan tata guna lahan dan sirkulasi dan parkir, ini terlihat dari hasil uji Chi Kuadrat pada *Asymp.sig* diperoleh nilai 0.977 dan $0.210 > 0.05$. Hal ini juga menunjukkan bahwa cara penyimpanan sarana aktivitas tidak berpengaruh terhadap tata guna lahan serta sirkulasi dan parkir.

➤ Cara penyimpanan sarana fisik aktivitas memiliki hubungan yang signifikan dengan bentuk dan massa bangunan serta dengan ruang aktivitas PKL. Hubungan ini dapat terlihat dari nilai Chi Kuadrat pada *Asymp.Sig.* yaitu $0.000 < 0.05$, nilai 0.000 juga menunjukkan bahwa cara penyimpanan sarana fisik aktivitas berpengaruh besar terhadap bentuk dan massa bangunan serta ruang aktivitas.. Selain itu berdasarkan Koefisien Kontingensi diperoleh nilai 0.482 yang menunjukkan hubungan antara variabel tersebut cukup erat. Kondisi ini terlihat dari sarana fisik aktivitas yang ditinggalkan pada lokasi tempat aktivitas PKL seperti di depan pertokoan akan mempengaruhi citra keindahan bangunan toko yang ada,

namun bila PKL mengemasi atau menyimpan sarana aktivitasnya, maka tampilan bangunan setelah kegiatan PKL selesai tidak akan terpengaruh. Begitu juga dengan ruang aktivitas, PKL yang beraktivitas di depan pertokoan dan di bahu jalan lebih cenderung meninggalkan sarana fisik aktivitasnya, namun PKL yang beraktivitas pada trotoar, badan jalan cenderung mengemasi sarana aktivitasnya.

4.3. Analisis Pengaruh Keberadaan PKL terhadap Lingkungan Fisik

Pada bagian ini akan dibahas bagaimana pengaruh keberadaan PKL terhadap fisik lingkungan yang meliputi pengaruh terhadap elemen fisik lingkungan dan masyarakat Kota Pekanbaru yang didasarkan pada hasil analisis *Cross Tabulation* yang telah dilakukan.

4.3.1. Pengaruh Terhadap Elemen Fisik Lingkungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan hubungan karakteristik PKL dalam beraktivitas dengan elemen fisik lingkungan dapat dilihat bagaimana pengaruh yang ditimbulkan terhadap elemen-elemen fisik lingkungan yang meliputi yaitu tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan Parkir serta ruang aktivitas yang meliputi trotoar, jalan, dan halaman toko/parkir.

4.3.1.1. Tata Guna Lahan.

Pada masing-masing lokasi studi telah ditetapkan tata guna lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Pekanbaru. Kondisi tata guna lahan pada studi ini juga meliputi fungsi dari ruang-ruang yang dimanfaatkan oleh PKL dalam beraktivitas. Adapun lokasi-lokasi yang diamati meliputi fungsi perdagangan pada jalan Tuanku Tambusai dan jalan Agus Salim, fungsi perkantoran pada jalan Sudirman dan Pepaya, fungsi pendidikan pada jalan KH. Ahmad Dahlan dan Kaharudin Nasution, sedangkan untuk fungsi permukiman pada jalan KH. Ahmad Dahlan dan jalan Pepaya.

Berdasarkan pengamatan dan survei yang telah dilaksanakan terlihat bahwa PKL beraktivitas dominan pada ruang-ruang kota, seperti pada trotoar, jalan, pelataran parkir, halaman toko. Dengan adanya aktivitas PKL pada ruang-ruang yang bukan diperuntukkannya menyebabkan terjadi distorsi fungsi dari ruang-ruang tersebut, karena tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi ini terjadi karena belum adanya penetapan dari pihak Pemerintah Kota dalam menetapkan dimana lokasi yang diperuntukkan bagi aktivitas PKL, sehingga PKL memanfaatkan ruang-ruang kota yang dianggapnya strategis dalam mencapai konsumen sesuai dengan karakteristiknya.

Adapun pengaruh keberadaan PKL terhadap tata guna lahan di kawasan studi dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

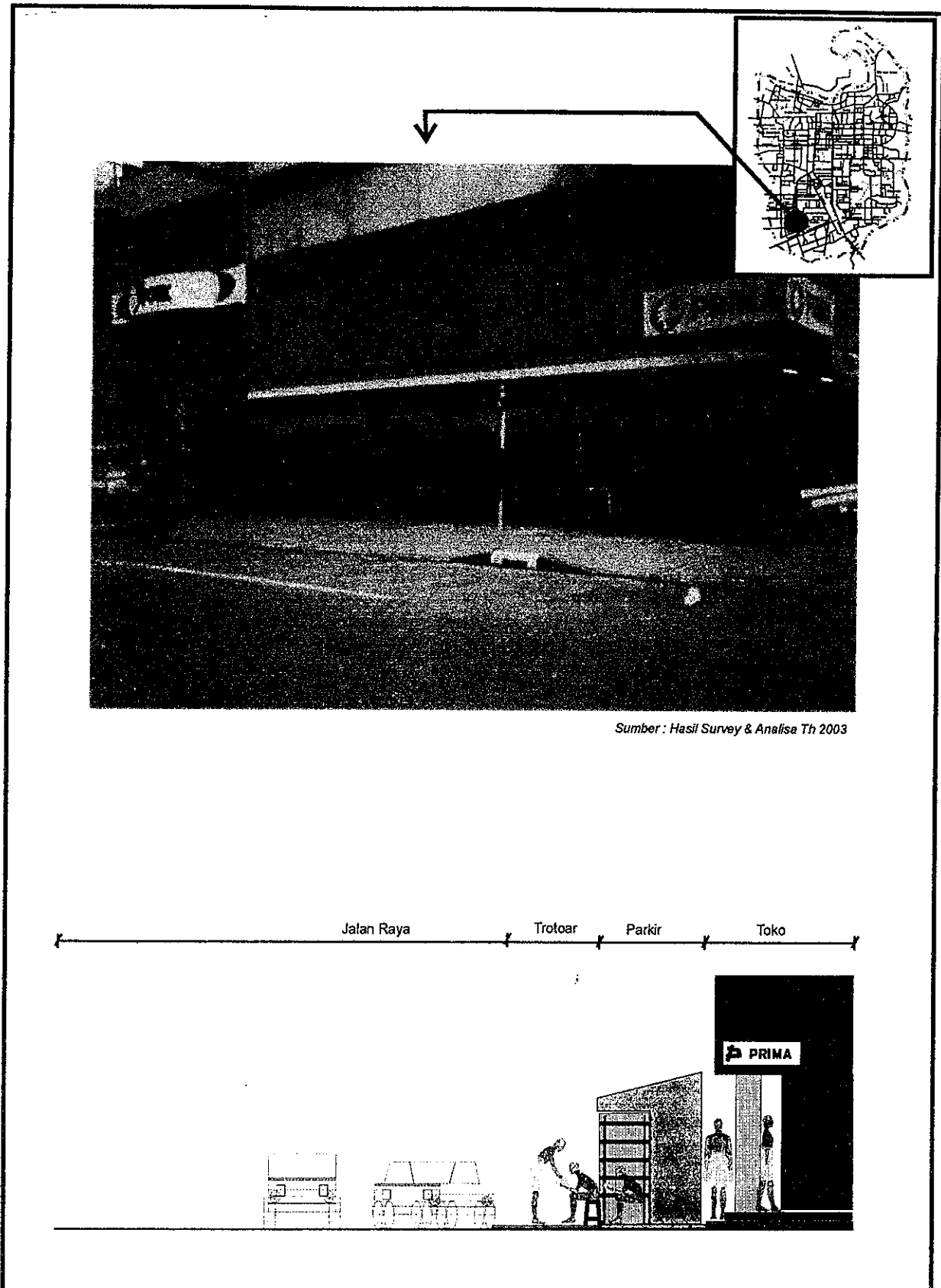
a. Pada Kawasan Perdagangan

Pada kawasan perdagangan yaitu pada lokasi jalan Tuanku Tambusai dan jalan Agus Salim. Secara umum pada kawasan studi merupakan pusat perbelanjaan, pada jalan Tuanku Tambusai terdapat pertokoan, Citra Plaza dan pasar tradisional (Pasar Cik Puan), serta di jalan Agus Salim terdapat pertokoan dan Pasar Inpres, yang kesemuanya berfungsi sebagai sarana fisik untuk pedagang ataupun tempat transaksi dilakukan. Sebagai fungsi komersial maka setiap bangunan perbelanjaan memerlukan kondisi-kondisi yang mendukung bagi terlaksananya aktivitas dan menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Adapun kondisi yang dibutuhkan adalah tidak terhalangnya pandangan pengunjung terhadap etalase maupun nama toko agar barang yang dijual terlihat jelas dan pengunjung dapat mengetahui apakah kebutuhannya terdapat pada toko tersebut. Selain itu juga diperlukan sirkulasi yang lancar bagi pengunjung yang keluar masuk bangunan.

Pada kenyataan yang ada lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan formal juga telah dimanfaatkan oleh PKL, keberadaan PKL yang tidak

diikuti dengan penyediaan ruang bagi aktivitas PKL menyebabkan PKL memanfaatkan ruang-ruang publik maupun ruang privat yang ada di sekitar lokasi tersebut sebagai tempat aktivitasnya. Sehingga dapat terlihat PKL beraktivitas pada trotoar, badan jalan, pelataran parkir didepan toko ruang-ruang kosong di sekitar lokasi. Kondisi inilah yang akhirnya memperlihatkan kegiatan PKL menjadi lebih dominan dari pada kegiatan formal yang ada. Adapun pengaruh dari keberadaan PKL tersebut seperti gangguan pandangan pengunjung terhadap toko-toko, gangguan sirkulasi bagi pengunjung yang hendak masuk atau keluar dari toko, serta sirkulasi pengunjung yang hendak memarkir kendaraannya. Pada akhirnya kondisi yang dituntut bagi bangunan formal sebagai bangunan komersial tidak dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dan sesuai dengan hasil uji Chi Kuadrat, lokasi aktivitas PKL berpengaruh besar dan terkait erat dengan tata guna lahan, yang dapat dilihat dari kondisi tata guna lahan yang sangat terganggu terjadi di sekitar jalan Tuanku Tambusai dan jalan Agus Salim, dimana PKL beraktivitas sampai ke trotoar dan badan jalan. Kondisi ini menyebabkan pengunjung memanfaatkan badan jalan untuk sirkulasi dan parkir kendaraan, terlihat pada gambar 4.1. dan 4.2. berikut.

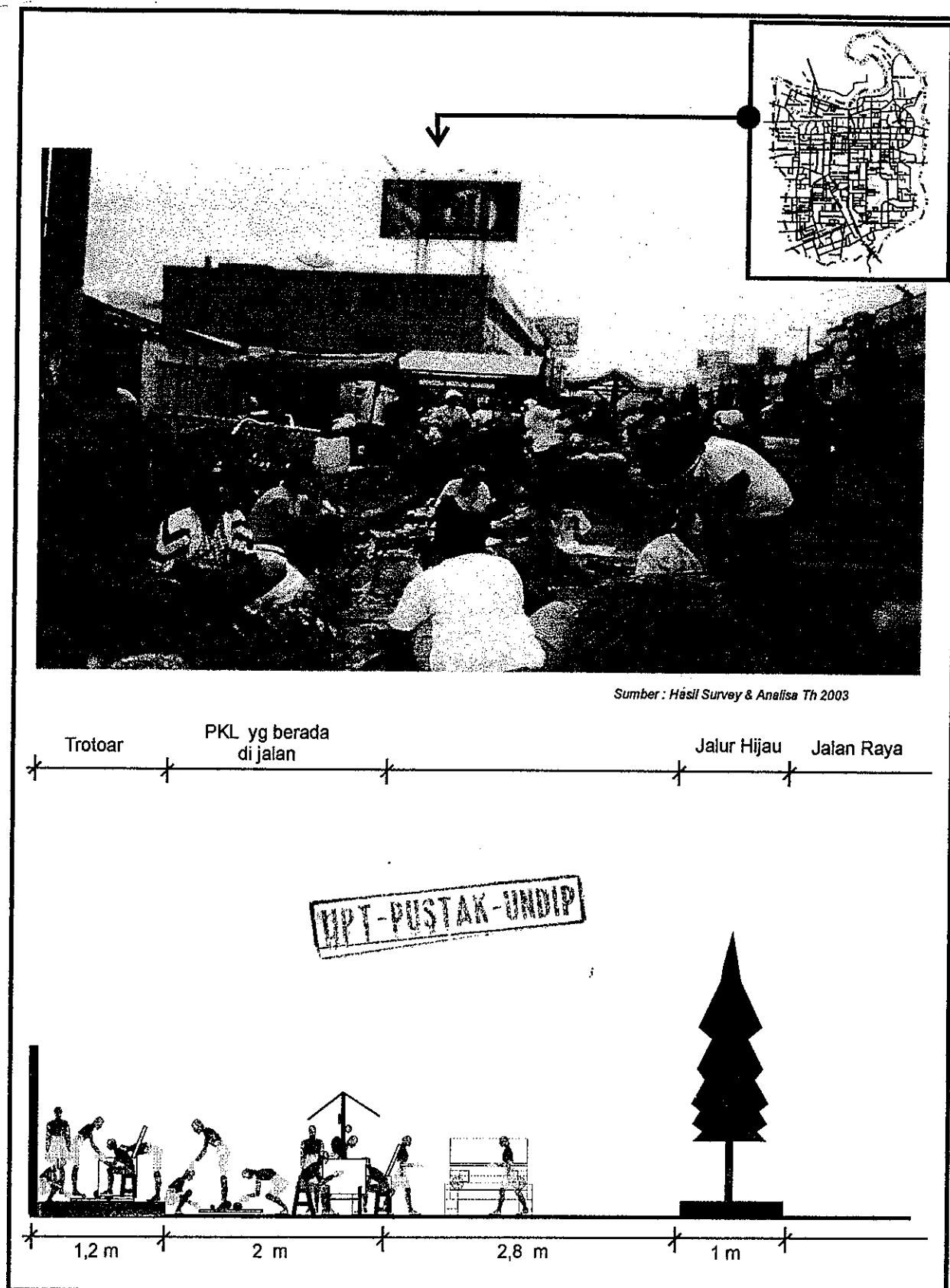


Sumber : Hasil Survey & Analisa Th 2003

GAMBAR IV.8
GAMBAR & SKETSA KONDISI PARKIR DENGAN ADANYA PKL
PADA JALAN TUANKU TAMBUSAI

Sumber : hasil survei dan observasi penulis, 2003.

UPT-PUSTAK-UNDIP



Sumber : Hasil Survey & Analisa Th 2003

GAMBAR IV.7
GAMBAR & SKETSA TROTOAR DAN JALAN DENGAN ADANYA PKL

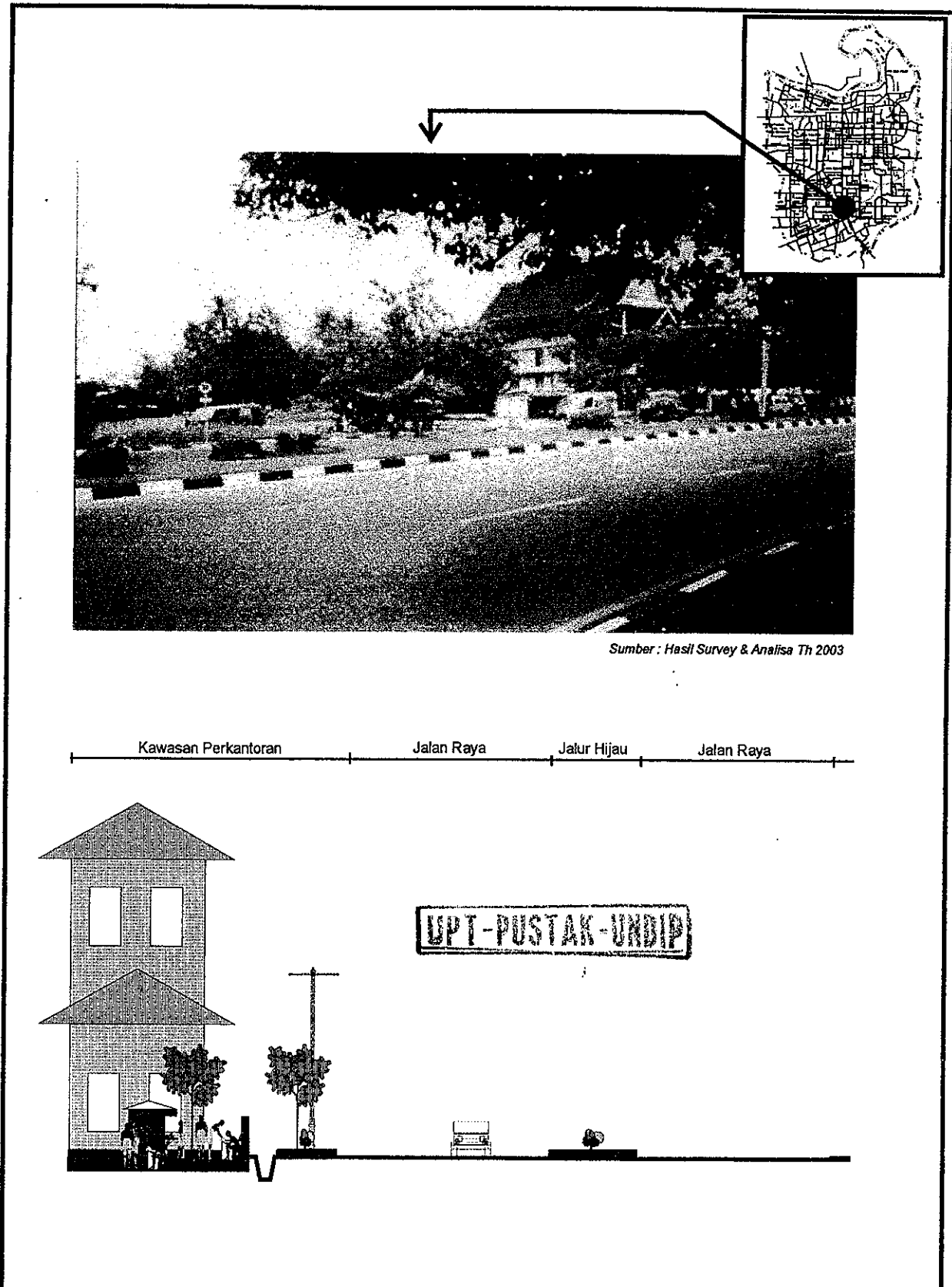
Sumber : hasil survei dan observasi penulis, 2003.

b. Pada Kawasan Perkantoran

Kawasan perkantoran terdapat pada jalan Sudirman dan Jalan Pepaya, dimana pada lokasi ini terdapat perkantoran baik milik pemerintah maupun swasta. PKL pada umumnya beraktivitas di sekitar bangunan perkantoran dengan memanfaatkan badan jalan, saluran maupun lahan-lahan kosong di sekitar lokasi. Pada jalan Sudirman PKL beraktivitas pada lahan-lahan kosong di sekitar lokasi dan memanfaatkan saluran yang ditutup dengan menggunakan papan sebagai ruang aktivitasnya. Sedangkan PKL pada jalan Pepaya beraktivitas di pinggir jalan dan di atas saluran di seberang jalan, serta sisi kiri dan kanan bangunan. Pada umumnya barang dagangan yang ditawarkan PKL adalah jenis makanan dan minuman bagi pelaku aktivitas formal yang ada.

Sebagai fungsi perkantoran, bangunan kantor dalam menunjang kelancaran aktivitas yang diwadahnya menuntut suasana lingkungan yang nyaman dan tenang, dalam arti tuntutan atas sirkulasi lalu lintas yang lancar, tidak bising dan aman.

Keberadaan PKL di sekitar bangunan kantor, secara fungsi kawasan tidak terlalu mengganggu karena keberadaan PKL tidak terlalu dominan, sehingga fungsi utama kawasan sebagai kawasan perkantoran tetap terjaga. Namun keberadaan PKL di depan perkantoran, pada simpul-simpul transportasi dan badan jalan agak sedikit mengganggu lalu lintas yang ada. Adapun keberadaan PKL pada lokasi di sekitar bangunan kantor dapat dilihat pada gambar 4.3. berikut.



GAMBAR IV.3
GAMBAR & SKETSA PEMANFAATAN RUANG
OLEH PKL PADA KAWASAN PERKANTORAN

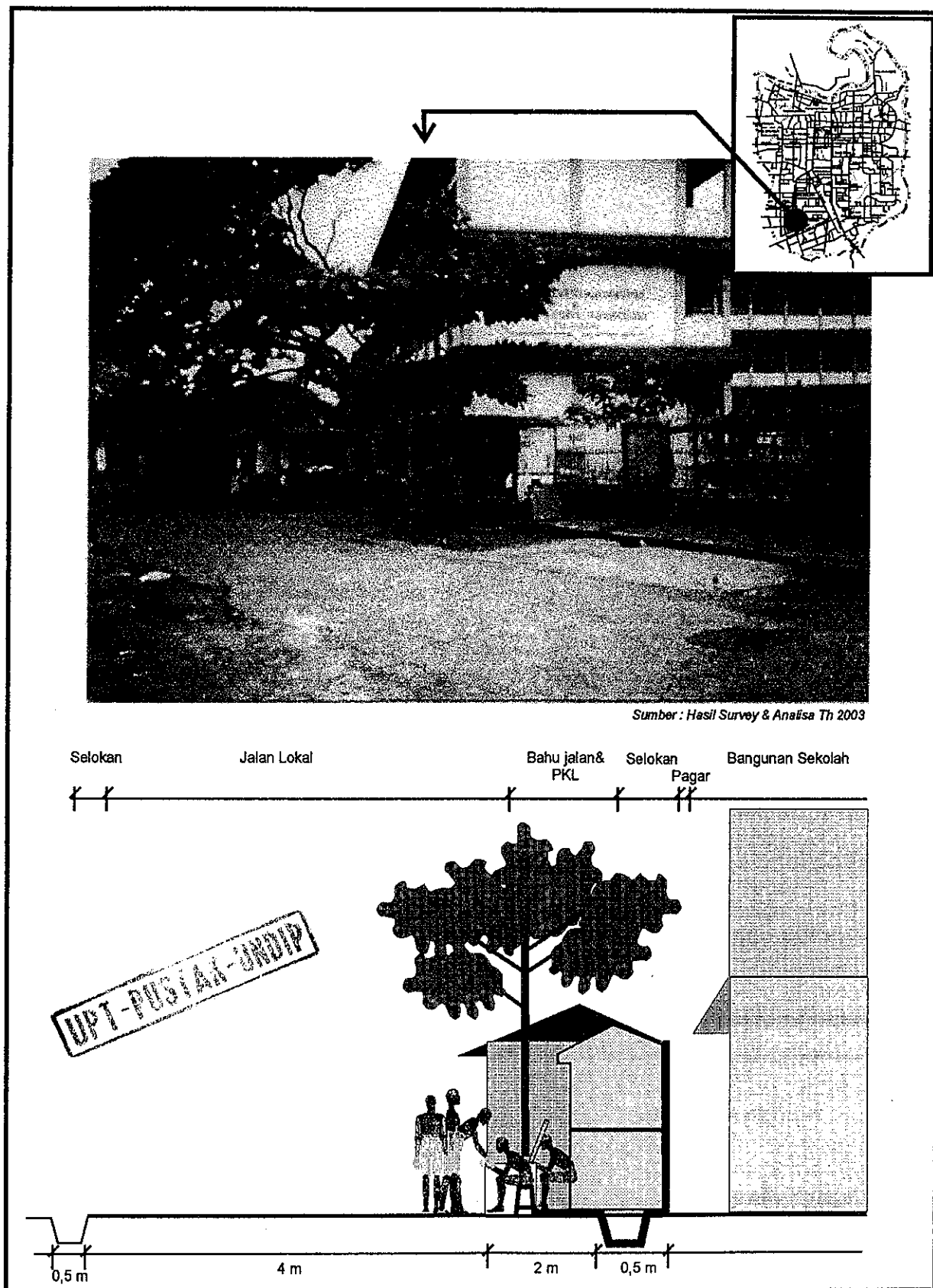
Sumber : hasil survei dan observasi penulis, 2003.

c. Pada Kawasan Pendidikan dan Permukiman

Kawasan pendidikan terdapat pada jalan KH. Ahmad Dahlan dan jalan Kaharudin Nasution. Adapun keberadaan PKL pada lokasi ini terdapat di sisi kiri dan kanan bangunan sekolah, dengan memanfaatkan saluran, badan jalan maupun halaman toko dan rumah penduduk. Pada umumnya PKL menawarkan jenis dagangan berupa makan dan minuman.

Secara fungsi keberadaan PKL pada lokasi ini tidak mengganggu aktivitas yang ada pada lokasi, bahkan keberadaannya menjadi pendukung kegiatan formal yang ada di sekitarnya. Namun demikian keberadaan PKL pada badan jalan juga menyebabkan penyempitan jalan, hanya saja jalan tersebut merupakan jalan lokal yang lalu lintasnya tidak terlalu sibuk, sehingga keberadaannya tidak terlalu mengganggu. Kondisi PKL pada lokasi ini dapat dilihat pada gambar 4.4. sebagai berikut.

Demikian pula di sekitar kawasan permukiman pada jalan KH. Ahmad Dahlan dan jalan Pepaya PKL beraktivitas di persimpangan jalan menuju lokasi perumahan pada pinggir jalan dan di atas saluran. Keberadaan PKL pada lokasi ini dari segi fungsi tidak mengganggu karena keberadaan PKL yang belum terlalu banyak



GAMBAR IV.4
GAMBAR & SKETSA PEMANFAATAN RUANG PADA
KAWASAN PERMUKIMAN & PENDIDIKAN JL.AHMAD DAHLAN

Sumber : hasil survei dan observasi penulis, 2003.

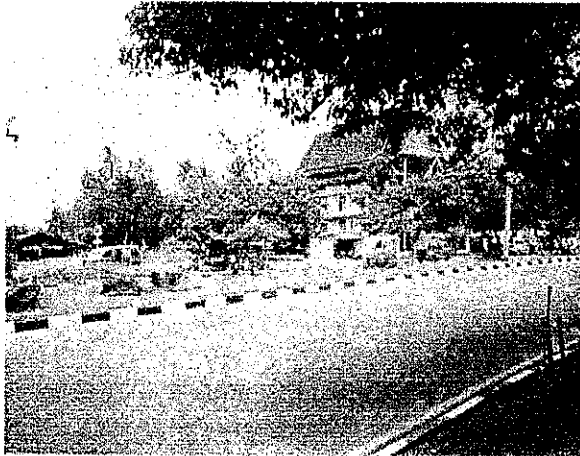
4.3.1.2. Bentuk dan Massa Bangunan.

Bentuk dan massa bangunan yang dimaksud adalah kesesuaian bentuk dan massa bangunan formal yang ada dengan bentuk dan massa bangunan PKL yang berkaitan dengan jenis dagangan, sarana fisik, pola penyebaran PKL, dan perlakuan terhadap sarana fisik aktivitas. Analisis ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari keberadaan PKL terhadap tampilan visual lingkungan di mana PKL beraktivitas.

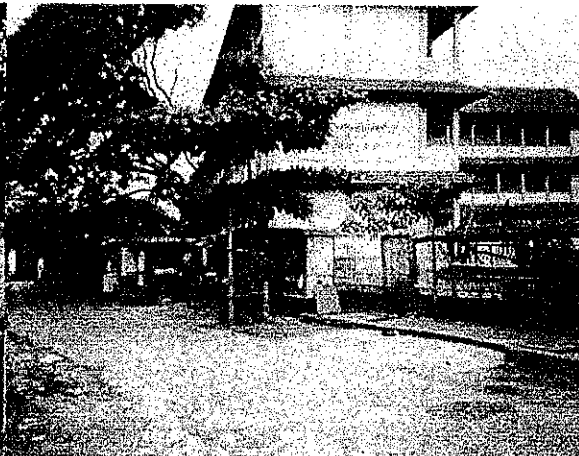
Melihat dari karakteristik aktivitas PKL diketahui bahwa pada umumnya PKL menggunakan sarana aktivitas yang sederhana dan mudah untuk dipindahkan, sesuai dengan hasil penelitian dari Mc. Gee dan Yeung (1977: 82-83) di kota-kota di Asia Tenggara, dimana sarana fisik yang digunakan sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindahkan atau dibawa dari suatu tempat ke tempat lain, selain itu juga dipengaruhi oleh jenis barang dagangan. Demikian juga dengan PKL di Kota Pekanbaru pada umumnya memanfaatkan sarana fisik aktivitas yang sederhana dan belum tertata dengan baik yaitu berupa gerobak, warung/tenda, gelaran/alas, meja, kios dan lainnya.

Bangunan formal yang ada di setiap lokasi merupakan bangunan permanen dengan bentuk sesuai dengan fungsi dari bangunan tersebut. Seperti pada kawasan perdagangan, bangunan formal disini berupa deretan pertokoan di sepanjang jalan., pada kawasan perkantoran bangunan pada umumnya bangunan tunggal dengan desain yang menarik, dan di kawasan pendidikan bangunan merupakan bangunan kompleks sekolah yang terdiri dari beberapa massa bangunan. Tidak demikian halnya dengan PKL yang beraktivitas di sekitar bangunan formal, mereka hadir dengan karakternya sendiri yang tidak mempertimbangkan keserasian dengan lingkungan. Hal ini terlihat dari sarana fisik aktivitas PKL yang sangat sederhana yang berupa tenda-tenda, gerobak, meja dan lainnya, yang bertolak belakang dengan bangunan formal yang melatarbelakanginya.

Untuk melihat kesesuaian bangunan formal dengan sarana fisik aktivitas PKL dapat dilihat pada gambar 4.5.



Sarana fisik aktivitas PKL yang seadanya
Yang menimbulkan pemandangan yang kontras
Dengan bangunan sekolah yang melatarbelakanginya



Kondisi kios yang tidak terawat menimbulkan
pemandangan yang tidak serasi dengan lingk.



Tampilan kios darurat yang
sangat bertolak belakang dengan
bangunan yang ada disekitarnya



Kondisi sarana aktivitas yang mengganggu
tampilan visual bangunan dibelakangnya



Sarana aktivitas ditinggalkan begitu saja setelah beraktivitas
Yang menimbulkan pemandangan yang kumuh

GAMBAR 4.5.

KEBERADAAN SARANA FISIK AKTIVITAS TERHADAP BANGUNAN FORMAL YANG ADA DISEKITARNYA

Sumber: hasil survey dan analisis penulis, 2003.

Pada gambar di atas terlihat sarana fisik aktivitas PKL yang didominasi tenda-tenda yang berkelompok dan membentuk tata massa persegi panjang berdiri berjejer memanjang di depan kompleks pertokoan hingga menutupi bagian muka atau fasade toko, selain itu juga menghalangi pengunjung yang akan memasuki toko. Adapun jenis dagangan yang ditawarkan beraneka ragam mulai dari jam, asesoris, ikat pinggang, kacamata, topi, makanan dan minuman, termasuk sayur mayur. Kondisi seperti ini terlihat di sekitar kegiatan perdagangan seperti pada jalan Tuanku Tambusai dan jalan Agus Salim, dimana tampilan PKL menjadi lebih dominan dibandingkan dengan bangunan formal yang melatarbelakanginya.

Di sekitar kegiatan perkantoran dan pendidikan PKL beraktivitas diluar halaman gedung seperti di pinggir pagar gedung yang memanfaatkan lahan kosong di sekitar lokasi dan saluran yang ditutup dengan papan sampai ke bahu jalan sebagai tempat usahanya. Sarana fisik yang digunakan juga seadanya seperti tenda-tenda dari spanduk bekas maupun plastik dengan gerobak atau kereta dorong sebagai tempat barang dagangannya. Pada umumnya PKL menjual jenis dagangan berupa makanan dan minuman. Selain itu PKL juga menggunakan sarana aktivitas berupa gerobak/kereta dorong yang mudah untuk dibawa dan dipindahkan, dimana ada beberapa PKL yang juga menyediakan meja dan kursi bagi konsumennya. Pada umumnya PKL jenis ini beraktivitas di pinggiran jalan di depan bangunan formal yang ada. Waktu aktivitasnya beragam ada yang mulai dari pagi hingga malam hari, ada yang hanya sampai sore hari, dan ada yang mulai disore hingga malam hari.

Menurut Shirvani (1985: 14) bahwa tata massa bangunan yang serasi adalah harus terjadi keterpaduan antar massa, dimana tidak saling mengganggu atau menutupi antara bangunan satu dengan lainnya, agar tidak terjadi kerusakan tampilan visual suatu

lingkungan. Didukung oleh Soetiadji S. yang mengatakan bahwa nilai estetis dari suatu bangunan selain tergantung dari sosok dan tampak bngunan itu sendiri juga dipengaruhi oleh olahan lingkungan di sekitar bangunan. Melihat dari keberadaan PKL di Kota Pekanbaru dengan sarana aktivitas yang sederhana atau seadanya, dimana tidak ada keterpaduan baik dari segi bentuk maupun tatanan massa sehingga mempengaruhi citra bangunan formal yang ada di sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan munculnya pemandangan yang secara visual terlihat kumuh dan jauh dari kesan indah, telah menurunkan citra bangunan formal dan lingkungan di sekitarnya. Kondisi ini tidak hanya terjadi saat PKL beraktivitas, karena PKL pada umumnya tidak mengemasi atau meninggalkan sarana aktivitasnya setelah kegiatan mereka selesai seperti terlihat pad gambar 4.5 di atas, sehingga semakin menambah kesan kumuh pada lingkungan dimana PKL beraktivitas.

Visual lingkungan yang buruk terjadi karena tidak adanya keserasian atau keterpaduan baik bentuk maupun massa antara sarana fisik aktivitas PKL dengan bangunan formal yang ada. Selain karena karakteristik dari PKL, kondisi ini juga tercipta karena belum adanya pedoman penataan fisik kegiatan PKL dengan memperhatikan semua aspek fisik antara lain bentuk, ketinggian, bahan yang digunakan untuk sarana fisik aktivitas PKL yang disesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya. Sehingga keserasian tata massa bangunan seperti yang dikatan Shirvani di atas tidak dapat terwujud. Seperti yang dikatakan Ishar (dalam Widjayanti, 2000) bahwa keindahan dapat diciptakan dari keindahan bentuk yang memenuhi syarat-syarat keterpaduan, keseimbangan, proporsi dan skala, serta keindahan ekspresi. Demikian pula dalam penempatan sarana fisik aktivitas PKL belum memperhatikan faktor orientasi, posisi dan lokasi seperti yang dikatakan Cullen tentang teori sebuah tempat atau *Place*.

Kondisi ini terjadi tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pengelola kota, dimana kebijakan yang mengatur mengenai PKL belum dilengkapi dengan pedoman penataan fisik PKL itu sendiri. Jadi tidak dapat disalahkan bila PKL memanfaatkan sarana aktivitas yang seadanya, karena sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya yang terbatas.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Keberadaan PKL yang sangat mengganggu berada pada kawasan perdagangan yaitu pada jalan Tuanku Tambusai dan jalan Agus Salim, karena keberadaan mereka menutupi bangunan yang ada dibelakangnya, sehingga aktivitas PKL menjadi lebih dominan. Sementara pada lokasi lainnya, keberadaan PKL juga mengganggu secara visual karena tidak adanya keterpaduan massa antara bangunan PKL dan bangunan formal yang melatarbelakanginya.
- Dalam hal ini diperlukan suatu pedoman dalam penataan fisik kegiatan PKL, dengan memperhatikan kesesuaian tata massa bangunan formal dan informal yang ada sehingga terjadi keterpaduan antara massa bangunan keduanya, dan pada akhirnya tercipta suatu keserasian tatanan fisik lingkungan.

4.3.1.3. Ruang Aktivitas PKL

1. Trotoar

Trotoar berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan dari pejalan kaki tersebut. Selain itu trotoar juga berfungsi memperlancar lalu lintas jalan raya karena tidak terganggu atau terpengaruh oleh lalu lintas pejalan kaki. Berdasarkan survei yang telah dilakukan kondisi trotoar di Kota Pekanbaru tidak semuanya dapat berfungsi sebagaimana fungsi yang telah

ditetapkan, sehingga jauh dari kriteria ideal bagi pejalan kaki. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya perencanaan yang kurang baik serta adanya intervensi dari kegiatan pedagang kaki lima pada trotoar.

Pada wilayah studi ada beberapa jalan yang memiliki trotoar yaitu jalan Jenderal Sudirman dan jalan Tuanku Tambusai dengan lebar 1,2 M, dengan kondisi kurang terawat yang terlihat dari permukaan trotoar yang mulai tidak rata atau terjadi penurunan permukaan pada bagian-bagian tertentu. Berdasarkan standar dari Departemen Kimpraswil lebar minimal trotoar untuk kawasan pertokoan/perbelanjaan, perkantoran, terminal dan sekolah adalah 2 M, sedangkan untuk kawasan perumahan minimal 1,5 M. Menurut Rubenstein persyaratan yang dibutuhkan bagi aktivitas pejalan kaki antara lain:

- Aman, mudah/leluasa bergerak dan cukup terlindung dari lalu lintas kendaraan.
- Menyenangkan dengan rute-rute pendek dan jelas, serta bebas hambatan dan keterlambatan yang diakibatkan kepadatan pejalan kaki.
- Mudah dilakukan ke segala arah, tanpa kesulitan, hambatan dan gangguan yang disebabkan ruang yang sempit, permukaan lantai naik turun dan sebagainya.
- Pada tempat-tempat tertentu diberikan elemen yang dapat menimbulkan daya tarik seperti elemen estetika, lampu penerang jalan, lansekap dan lain-lain

Berdasarkan standar dan persyaratan tersebut di atas terlihat bahwa lebar trotoar yang ada masih belum memenuhi standar yang ditetapkan, apalagi pada kawasan perdagangan intensitas pengunjung lebih tinggi dan berkesinambungan, sehingga dengan lebar ruang minimal kurang mengoptimalkan fungsi dari trotoar tersebut.

Kondisi trotoar yang belum memenuhi standar dan syarat seperti tersebut di atas dimana trotoar harus bebas dari gangguan yang menghambat pejalan kaki, terlihat dari adanya intervensi pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar sebagai tempat

beraktivitas. Pada jalan Tuanku Tambusai kelompok PKL mengisi ruang mulai dari selasar toko, pelataran parkir sampai pada trotoar. Adapun sarana fisik aktivitas yang digunakan adalah tenda, gerobak/kereta dorong, gelaran/alas, meja dan etalase, dengan jenis dagangan seperti jam koran/majalah dan lainnya. Trotoar yang lebarnya hanya 1,2 M, dimanfaatkan oleh kegiatan PKL sehingga lebar efektif yang tersisa tidak memadai untuk sirkulasi bagi pejalan kaki, akhirnya pejalan kaki terpaksa memanfaatkan badan jalan dalam beraktivitas. Kondisi menyebabkan trotoar yang harusnya memenuhi empat asas (menurut Keputusan Menteri PU No. 468 tahun 1998) yaitu kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian tidak terpenuhi. Gambaran PKL yang beraktivitas pada trotoar dapat kita lihat pada gambar 4.2. berikut.



GAMBAR 4.6.
INTERVENSI AKTIVITAS PKL PADA TROTOIR
YANG MANGGANGGU SIRKULASI PEJALAN KAKI.

Sumber : hasil survey dan analisis penulis, 2003.

Dalam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru belum ditetapkan ruang-ruang bagi aktivitas PKL. Namun demikian dalam pelaksanaan dari Peraturan Daerah No. 11 tahun 2001 tersebut, pemerintah telah melarang PKL beraktivitas di atas trotoar dengan sanksi bila terjadi pelanggaran adalah penyitaan barang dagangan.

Peraturan itu hanya dipatuhi oleh PKL saat petugas melakukan razia atau pengawasan langsung dengan menggeser sarana dagangannya ke pinggir trotoar, dan setelah petugas pergi mereka kembali menata barang dagangannya pada trotoar. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran dari PKL untuk mematuhi aturan yang ada, selain itu keterbatasan ruang yang tersedia bagi aktivitas PKL menyebabkan mereka terpaksa mengintervensi ruang publik yang ada untuk dijadikan tempat beraktivitas. Disini peran pemerintah dituntut untuk dapat menyediakan ruang bagi aktivitas PKL sesuai dengan karakteristiknya, sehingga PKL dapat lebih leluasa dan nyaman dalam beraktivitas dan tidak lagi mengintervensi trotoar yang merupakan ruang publik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan PKL yang beraktivitas pada trotoar telah mengganggu tatanan trotoar yang ada, selain itu keberadaan PKL juga mengakibatkan terjadinya distorsi fungsi dari trotoar yang seharusnya berfungsi sebagai ruang bagi pejalan kaki menjadi ruang bagi aktivitas PKL, sehingga kenyamanan pejalan kaki menjadi terganggu dalam arti kata keberadaan PKL berpengaruh negatif terhadap fisik trotoar. Adapun lingkungan yang paling berpengaruh dengan adanya aktivitas PKL pada trotoar adalah pada jalan Tuanku Tambusai, karena trotoar tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya.

2. Jalan dan Parkir

Jalan merupakan sirkulasi untuk kendaraan yang menghubungkan ruang aktivitas satu dengan lainnya. Kondisi jalan pada lokasi studi pada umumnya dalam keadaan baik, dengan lebar disesuaikan dengan intensitas lalu lintas pada jalur tersebut. Sistem arus lalu lintas dua arah, dimana pada jalan Tuanku Tambusai dan jalan Jenderal Sudirman merupakan jalan dua jalur yang dibatasi oleh jalur hijau selebar 1 M. Menurut Shirvani (1985: 26) ada empat prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pengaturan sirkulasi

yaitu sirkulasi harus didesain menjadi ruang terbuka yang memiliki pemandangan yang baik antara lain:

- Bersih dan elemen lansekap yang menarik
- Persyaratan ketinggian dan sempadan bangunan yang berdekatan dengan jalan
- Pengaturan parkir di pinggir jalan, dan tanaman yang berfungsi sebagai penyekat jalan
- Meningkatkan lingkungan alami yang terlihat dari jalan.

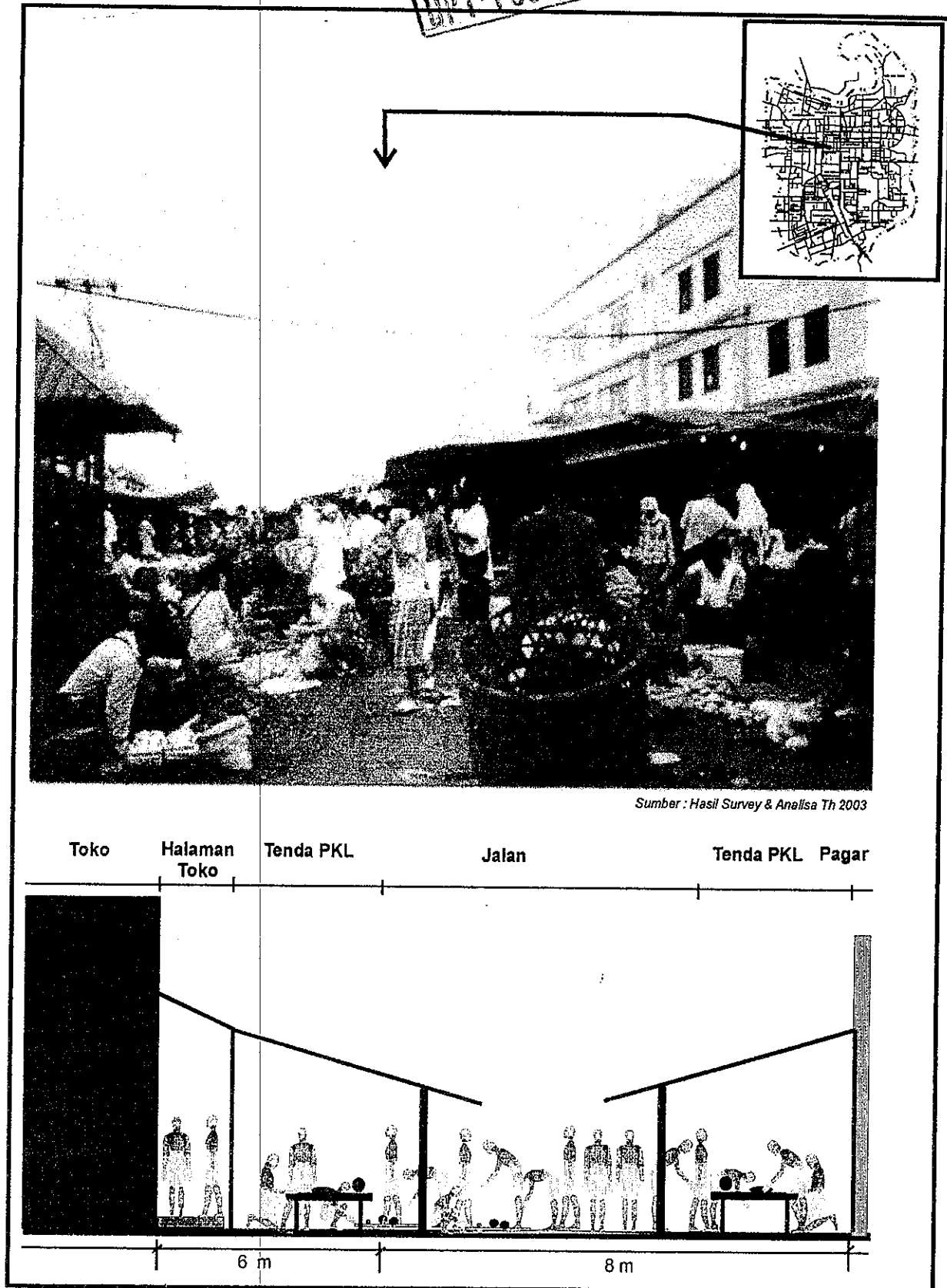
Melihat dari empat prinsip di atas maka hal tersebut belum terpenuhi pada jalan-jalan pada lokasi studi.

Sistem parkir kendaraan yang digunakan adalah sistim parkir di badan jalan (*on the street*) dan tidak di badan jalan (*off the street*). Pada bangunan perkantoran pada umumnya telah menyediakan areal parkir bagi pengunjungnya. Untuk bangunan pertokoan yang baru dibangun pada umumnya telah menyediakan parkir kendaraan di depan toko sesuai dengan kebijakan yang telah di keluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru, dimana setiap bangunan kantor dan bangunan komersil harus menyediakan fasilitas parkir bagi pengunjungnya. Sesuai empat prinsip utama penataan parkir yang dikemukakan oleh Shirvani yang salah satunya adalah setiap adanya aktivitas atau pembangunan gedung-gedung harus dilengkapi dengan ruang untuk parkir kendaraan. Namun demikian parkir yang disediakan kapasitasnya belum memenuhi kebutuhan, sehingga badan jalan tetap dimanfaatkan untuk parkir oleh sebagian pengunjung. Sementara untuk bangunan pertokoan yang sudah lama tidak menyediakan fasilitas parkir karena bangunan langsung berbatasan dengan jalan, dan untuk parkir pengunjung digunakan sistem parkir di badan jalan.

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa sebagian besar PKL memanfaatkan badan jalan dan lahan parkir sebagai tempat aktivitasnya, karena lokasi tersebut dianggap paling strategis dalam mencapai konsumen. Pemanfaatan badan jalan untuk aktivitas PKL terlihat hampir di semua ruas jalan yang menjadi objek studi, namun yang terparah adalah pada jalan Agus Salim keberadaan PKL telah memenuhi badan jalan, sehingga sama sekali tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Pada Jalan Tuanku Tambusai gangguan terjadi pada pagi hari, karena waktu aktivitas PKL di sekitar Pasar Cik Puan yang paling ramai adalah pagi hari, dimana mereka berdagang sampai ke badan jalan. Jalan Tuanku Tambusai yang merupakan jalur utama yang menghubungkan Pekanbaru bagian barat dengan pusat kota, sehingga pada pagi hari intensitas kendaraan yang lewat sangat tinggi karena bertepatan dengan jam masuk kantor dan sekolah. Terjadinya bentrokan antara aktivitas PKL dan lalu lintas pada jalan tersebut, yang mengakibatkan terjadi kemacetan. Hal ini terjadi setiap hari, walaupun aparat Tibum selalu mengadakan penertiban, PKL masih saja beraktivitas sampai ke badan jalan dengan alasan berjualan di dalam pasar sepi pembeli.

Pada jalan Agus Salim, keberadaan PKL telah merubah fungsi dari jalan tersebut sebagai ruang sirkulasi bagi kendaraan menjadi ruang bagi PKL. Sementara pada jalan Sudirman, jalan Pepaya, jalan KH. Ahmad Dahlan dan jalan Kaharudin Nasution, PKL memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat aktivitasnya. Kondisi ini juga mempengaruhi lalu lintas di sekitarnya, dimana mengganggu bagi pengunjung yang ingin memarkir kendaraan karena ruang tersebut telah dimanfaatkan oleh PKL.

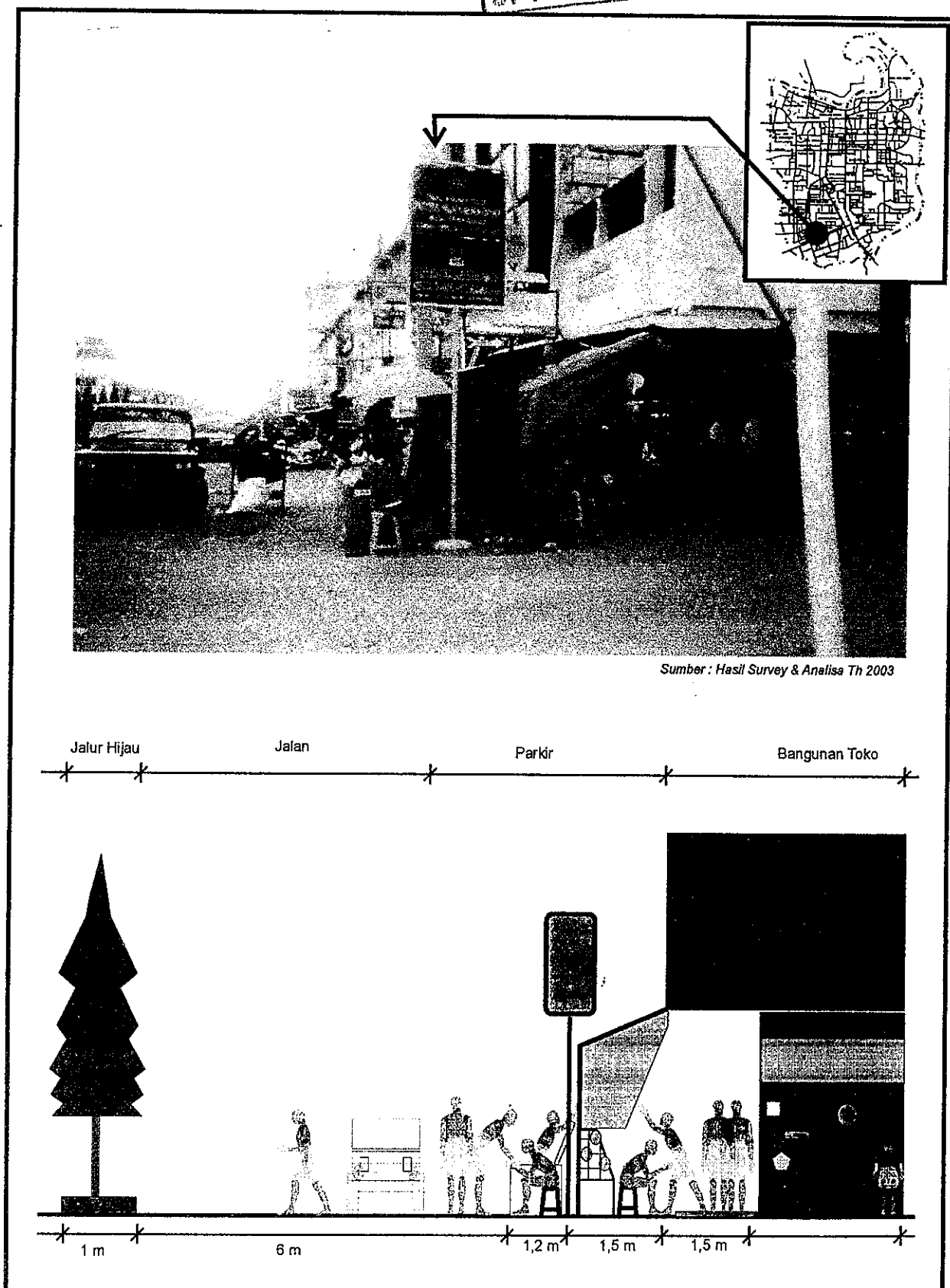
Lahan parkir di depan pertokoan juga tidak luput dari keberadaan PKL, sehingga fungsi ruang parkir menjadi berubah atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pada akhirnya badan jalan dimanfaatkan untuk memarkir kendaraannya. Gambaran PKL yang beraktivitas pada badan jalan dan pelataran parkir dapat terlihat pada gambar 4.7. dan 4.8.



Sumber : Hasil Survey & Analisa Th 2003

GAMBAR IV.2
GAMBAR & SKETSA PEMANFAATAN RUANG OLEH PKL
PADA KAWASAN PERDAGANGAN JL . AGUS SALIM

Sumber : hasil survei dan observasi penulis, 2003.



Sumber : Hasil Survey & Analisa Th 2003

GAMBAR IV.1
GAMBAR & SKETSA PEMANFAATAN RUANG OLEH PKL
PADA KAWASAN PERDAGANGAN JL TUANKU TAMBUSAI

Sumber : hasil survei dan observasi penulis, 2003.

Pada gambar 4.7. dan 4.8. di atas terlihat bahwa keberadaan PKL telah menyebabkan penyempitan badan jalan, sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan dan rawan terhadap kemacetan lalu lintas. Jalan sebagai ruang bagi sirkulasi kendaraan tidak dapat berfungsi secara optimal, dan kenyamanan penggunanya juga tidak dapat terpenuhi. Selain itu keberadaan PKL pada ruang parkir menimbulkan gangguan bagi pengunjung yang akan memarkir kendaraan, pada akhirnya badan jalan menjadi tempat parkir yang juga berbuntut pada gangguan sistem lalu lintas kendaraan.

3. Ruang Lainnya

Ruang lainnya yang dimaksud disini adalah ruang aktivitas PKL yang tidak termasuk pada poin satu dan dua. Adapun ruang-ruang tersebut antara lain lahan-lahan kosong di sekitar lokasi, di atas saluran, di halaman rumah penduduk dan lainnya.

Berdasarkan survei yang dilakukan ada sejumlah PKL yang memanfaatkan lahan kosong, saluran dan halaman rumah penduduk sebagai tempat aktivitasnya. Pada umumnya jenis dagangan yang di tawarkan adalah makanan, dan terdapat jalan Pepaya, jalan KH. Ahmad Dahlan, jenderal Sudirman dan jalan Kaharudin Nasution. Kondisi PKL yang beraktivitas disini pada umumnya tidak mengganggu sirkulasi manusia maupun kendaraan, namun dari segi visual keberadaan PKL tetap mengganggu dengan menimbulkan pemandangan yang tidak serasi dengan lingkungan.

4.3.2. Pengaruh Terhadap Masyarakat Kota Pekanbaru

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh baik pengaruh negatif maupun pengaruh positif dari keberadaan PKL terhadap masyarakat, berdasarkan persepsi/tanggapan masyarakat tentang aktivitas PKL. Pengaruh terjadi karena adanya perubahan suasana yang menyangkut kebersihan, kenyamanan, keserasian dan keindahan yang mengalami penurunan. Dari hasil penelitian diketahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL pada lingkungan Kota Pekanbaru.

4.3.2.1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaruh Negatif yang Ditimbulkan oleh Keberadaan PKL

Seperti kita ketahui keberadaan PKL selalu diidentikkan dengan kekumuhan atau permasalahan, untuk itu pada bagian ini akan di analisa gangguan yang ditimbulkan oleh keberadaan PKL terhadap masyarakat Kota Pekanbaru.

TABEL IV.13.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN PKL

NO	PERSEPSI MASYARAKAT	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1	Terganggu	79	79
2	Tidak terganggu	21	21
	TOTAL	100	100

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2003.

Dari tabel IV.13. di atas terlihat bahwa 79% masyarakat responden merasa terganggu dengan keberadaan PKL dan 21% masyarakat responden merasa tidak terganggu dengan keberadaan PKL. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat

responden merasa terganggu dengan adanya aktivitas PKL. Untuk melihat gangguan yang dirasakan masyarakat dapat dilihat pada Tabel IV.14. berikut

TABEL IV.14.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KEBERADAAN PKL

NO	JENIS GANGGUAN	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1	Tidak ada	23	23
2	Trotoar menjadi sempit	42	42
3	Jalan menjadi macet	29	29
4	Lingkungan menjadi kotor	46	46
5	Lainnya	-	-
	TOTAL	140	

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2003.

Pada tabel IV.14. di atas tampak bahwa lingkungan menjadi kotor merupakan gangguan yang paling dirasakan masyarakat (46%), trotoar menjadi sempit (42%), dan jalan menjadi macet (29%). Dimana dari hasil kuesioner sebagian masyarakat merasakan lebih dari satu gangguan yang terlihat dari jawaban yang lebih dari 1 (satu). Namun demikian sebanyak 23% masyarakat merasa tidak terganggu dengan keberadaan PKL, yang pada umumnya merupakan masyarakat yang lokasi aktivitasnya belum terlalu dipenuhi oleh PKL atau masyarakat yang lebih merasakan manfaat dari keberadaan PKL tersebut. Berikut ini akan dibahas mengenai humungan karakteristik aktivitas PKL dengan gangguan yang dirasakan masyarakat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.15.

TABEL IV.15.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KARAKTERISTIK
AKTIVITAS PKL

NO	KARAKTERISTIK AKTIVITAS PKL	PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KARAKTERISTIK AKTIVITAS PKL				JUMLAH	%
		MENGANGGU	%	TIDAK MENGANGGU	%		
1	Jenis dagangan	60	60	40	40	100	100
2	Sarana fisik aktivitas	95	95	5	5	100	100
3	Tampilan PKL	100	100	-		100	100
4	Waktu aktivitas	66	66	34	34	100	100

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2003.

Dari tabel IV.15. di atas terlihat bahwa 60% masyarakat responden melihat bahwa jenis dagangan berpengaruh atau mengganggu kondisi kualitas lingkungan dan 40% lagi menyatakan tidak ada pengaruhnya. Dari segi sarana fisik aktivitas PKL 95% masyarakat responden merasa terganggu oleh sarana fisik yang digunakan. Untuk tampilan PKL secara keseluruhan 100% masyarakat responden menyatakan kondisi lingkungan terganggu karena menimbulkan pemandangan yang semrawut dan kumuh. Selanjutnya waktu aktivitas PKL dirasakan mengganggu oleh 66% responden, dan 34% responden merasa waktu aktivitas PKL tidak ada pengaruhnya. Adapun waktu-waktu aktivitas PKL yang dianggap mengganggu oleh masyarakat adalah pada jam-jam sibuk seperti pada pagi hari dan jam pulang kantor yang selalu menyebabkan kemacetan. Selain itu juga terjadi pada saat-saat pengunjung ramai seperti pada waktu liburan, puasa dan lebaran, dimana keberadaan PKL sangat mengganggu kenyamanan pengunjung dan keamanan pengunjung.

TABEL IV.16.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RUANG AKTIVITAS PKL

NO	PERSEPSI MASYARAKAT	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1	Trotoar	31	31
2	Badan jalan	42	42
3	Emper/Hal toko	22	22
4	Pelataran parkir	5	5

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2003.

Pada tabel IV.16. di atas terlihat bahwa masyarakat merasa paling terganggu terhadap PKL yang beraktivitas pada badan jalan (42%), kemudian pada trotoar (31%), dan pada halaman toko/pelataran parkir (27%)..

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan PKL menimbulkan gangguan terhadap masyarakat, baik dilihat dari jenis dagangan, sarana fisik aktivitas, waktu aktivitas, tampilan bangunan dan ruang aktivitasnya.

4.3.2.2. Manfaat Keberadaan PKL

Keberadaan PKL selain menimbulkan sisi negatif juga terdapat sisi positifnya positif, seperti yang dikatakan oleh Paulus Wirotomo (dalam Rachbini dan Hamid, 1994: xiii) bahwa disamping sisi yang negatif, sektor informal, memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kota, salah satunya adalah adanya ketergantungan pegawai sektor formal pada dagangan dan jasa dari sektor informal. Berdasarkan hal tersebut berikut ini dapat dilihat sisi positif yang terkait dengan manfaat dari keberadaan PKL yang dirasakan oleh masyarakat.

TABEL IV.17.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANFAAT KEBERADAAN PKL

NO	PERSEPSI MASYARAKAT	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1	Tidak ada	19	19
2	Mudah mendapat kebutuhan	42	42
3	Harga relatif murah	41	41
4	Lainnya	8	8
	TOTAL	110	110

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2003.

Pada tabel di atas terlihat bahwa manfaat dari keberadaan PKL yang dirasakan oleh masyarakat adalah mudah dalam mendapatkan makanan dan kebutuhan lainnya (42%), harga relatif murah (41%) dan manfaat lainnya 8%. Sedangkan 19% masyarakat berpendapat bahwa keberadaan PKL tidak ada manfaatnya.

Berdasarkan analisis di atas jelas terlihat keberadaan PKL juga memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini juga disebabkan karena keberadaan PKL yang cenderung berada dekat dengan aktivitas masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya dalam arti keberadaan PKL telah menjadi kegiatan pendukung bagi aktivitas disekitarnya.

4.3.2.3. Persepsi Masyarakat dan PKL terhadap Penataan PKL

Pada bagian ini akan dibahas mengenai persepsi masyarakat dan PKL terhadap penataan PKL. Berdasarkan hasil survei primer yang dilakukan terhadap PKL dan masyarakat diketahui bahwa semua responden (100%) setuju bila dilakukan penataan PKL. Namun ada beberapa keinginan dari PKL dan masyarakat terhadap penataan tersebut yang dapat dilihat pada Tabel IV.18. berikut ini.

TABEL IV.18.
PPERSEPSI MASYARAKAT DAN PKL TERHADAP PENATAAN PKL

NO	PREFERENSI	PENATAAN PKL		
		DIPINDAHKAN KE TEMPAT KHUSUS PKL	PENATAAN DI TEMPAT SEMULA	LAINNYA
1	Masyarakat	39	58	3
2	PKL	18	25	57

Sumber : Hasil penelitian dan analisis penulis, 2003.

Pada Tabel IV.18. di atas terlihat bahwa 39% masyarakat responden menginginkan PKL dipindahkan ke lokasi yang khusus untuk aktivitas PKL, 58% menginginkan dilakukan penataan PKL pada lokasi dimana mereka beraktivitas dan 3% menginginkan pola penataan lainnya, yaitu penyediaan ruang bagi aktivitas PKL di sekitar aktivitas masyarakat baik oleh pemerintah kota maupun oleh pemilik bangunan. Sementara dari sisi PKL 18% berkeinginan untuk dipindahkan ke lokasi khusus, 25 % berkeinginan tetap beraktivitas ditempat semula, dan 57% berkeinginan dengan pola penataan lainnya, dimana mereka setuju dipindahkan dengan catatan tempat aktivitasnya tetap merupakan lokasi yang ramai dan strategis.

Berdasarkan analisa di atas dari sisi masyarakat dapat disimpulkan bahwa keberadaan PKL masih diperlukan dengan besarnya prosentase responden masyarakat yang berkeinginan PKL tetap berada di tempat semula namun tetap dilakukan penataan. Sedangkan dari sisi PKL itu sendiri mereka menyadari bahwa keberadaan mereka tidak dapat terus menerus dalam posisi dikejar-kejar oleh aparat pemerintah karena ketidaktertibannya, sehingga mereka juga merasakan perlunya upaya penataan dengan catatan kepentingan mereka yaitu berdekatan dengan konsumen tetap diperhatikan. Hal ini terlihat dari prosentase responden PKL yang tetap setuju dilakukan penataan baik ditempat semula maupun dipindahkan pada lokasi yang ditetapkan Pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Temuan Studi

Berdasarkan hasil survei dan analisis yang dilakukan terhadap keberadaan PKL di Kota Pekanbaru didapat temuan-temuan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan antara karakteristik aktivitas PKL (*independent factor*) yang meliputi jenis dagangan, sarana fisik aktivitas, pengelompokan PKL, luas ruang yang digunakan dan cara penyimpanan sarana aktivitas dengan elemen fisik lingkungan (*dependent factor*) yang meliputi tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang aktivitas. Hubungan yang terjadi dalam arti perilaku aktivitas PKL mempengaruhi elemen fisik lingkungan yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:
 - a. Jenis dagangan PKL tidak secara langsung mempengaruhi tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, dan ruang aktivitas, namun tergantung dari sarana aktivitas yang digunakan.
 - b. Sarana fisik aktivitas PKL berpengaruh terhadap tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, dan ruang aktivitas. Kondisi ini terlihat pada karakteristik aktivitas PKL dalam memanfaatkan sarana fisik aktivitasnya baik jenis, maupun tampilannya. PKL yang beraktivitas dengan memanfaatkan sarana fisik aktivitas yang luas akan mengganggu fungsi ruang dimana PKL beraktivitas, sedangkan sarana fisik yang sederhana dan seadanya serta tidak ada perawatan akan mengganggu tampilan bangunan yang ada di sekitarnya
 - c. Pola penyebaran PKL sangat berpengaruh terhadap tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang aktivitas. Kondisi ini terlihat dari keberadaan PKL yang berkelompok akan lebih berpengaruh dari pada keberadaan

PKL yang tersebar, karena dengan berkelompok PKL telah membentuk massa yang besar yang akan menyita ruang yang luas dan dapat menutupi muka bangunan. Keberadaan kelompok massa PKL pada ruang-ruang publik seperti jalan dan parkir akan lebih mengganggu sirkulasi kendaraan yang ada.

- d. Waktu aktivitas PKL berpengaruh terhadap tata guna lahan, sirkulasi dan parkir, ruang aktivitas. Adapun waktu yang paling berpengaruh dan mengganggu adalah pada pagi hari dimana pada saat ini merupakan jam sibuk karena bertepatan dengan jam masuk kantor/sekolah, sehingga lalu lintas padat. Adanya aktivitas PKL pada pagi hari yang memanfaatkan trotoar, pelataran parkir dan badan jalan menyebabkan terjadinya kemacetan.
- e. Lokasi Aktivitas PKL mempunyai pengaruh yang besar terhadap semua elemen fisik lingkungan, dan hubungan tersebut yang paling erat terjadi antara lokasi aktivitas dengan bentuk dan massa bangunan dan ruang aktivitas. Kondisi ini terlihat dari kondisi bentuk dan massa bangunan serta ruang aktivitas pada kawasan perdagangan lebih terganggu dengan adanya aktivitas PKL dibandingkan pada kawasan-kawasan lain yaitu kawasan perkantoran, pendidikan dan perumahan.
- f. Luas ruang aktivitas berpengaruh terhadap semua elemen fisik lingkungan, dengan pengaruh terbesar terhadap sirkulasi dan parkir. Kondisi ini juga jelas terlihat, dengan semakin luas ruang yang dimanfaatkan oleh PKL, maka semakin besar pengaruh yang ditimbulkan. Apabila setiap PKL memanfaatkan ruang yang luas dalam beraktivitas pada suatu lokasi, maka ruang yang tersita bagi aktivitas PKL juga semakin luas, sehingga dapat mengganggu fungsi dari utama dari kawasan. Demikian juga terhadap elemen fisik lainnya.

- g. Cara penyimpanan sarana fisik aktivitas sangat berpengaruh pada bentuk dan massa bangunan dan ruang aktivitas PKL. Karena kondisi sarana fisik aktivitas yang ditinggalkan tanpa adanya perawatan menimbulkan pemandangan yang jauh dari citra keindahan dan menyita ruang, sehingga juga akan berpengaruh terhadap tampilan bangunan yang ada dan ruang publik menjadi semakin sempit.
- h. Berdasarkan nilai dari hasil uji Chi kuadrat, pola penyebaran PKL dan lokasi aktivitas paling berpengaruh terhadap tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, serta ruang aktivitas. Sementara hubungan yang paling erat terjadi antara variabel lokasi aktivitas dengan bentuk dan massa bangunan serta ruang aktivitas. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan PKL pada kawasan perdagangan cenderung bersifat mengelompok sehingga kumpulan massa menjadi besar yang akan secara langsung mempengaruhi bentuk dan massa bangunan serta ruang dimana PKL beraktivitas.

2. Pengaruh keberadaan PKL terhadap fisik lingkungan Kota Pekanbaru.

a. Terhadap elemen fisik lingkungan

Keberadaan PKL telah memberikan pengaruh negatif terhadap elemen fisik lingkungan hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah dalam penataan PKL belum terlaksana dengan baik serta karakteristik perilaku PKL itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pengaruh keberadaan PKL terhadap elemen fisik lingkungan yang ada.

- Tata guna lahan

Keberadaan PKL telah memberikan pengaruh terhadap tata guna lahan, dimana PKL beraktivitas pada ruang-ruang yang bukan peruntukannya, seperti pada trotoar, jalan, pelataran parkir dan lainnya, sehingga terjadi distorsi fungsi dari ruang.

Keberadaan PKL yang paling berpengaruh terhadap timbulnya gangguan terhadap fungsi kawasan terjadi pada kawasan perdagangan, sementara pada kawasan perkantoran, pendidikan, dan permukiman, keberadaan PKL tidak mengganggu fungsi dari kawasan tersebut, namun aktivitas PKL yang memanfaatkan badan jalan juga agak mengganggu sirkulasi di sekitar kawasan tersebut.

- Bentuk dan massa bangunan.

Tidak adanya keterperpaduan massa bangunan formal dan sarana fisik aktivitas PKL, dimana keberadaan sarana fisik PKL yang sangat sederhana dengan barang dagangan yang tidak tertata dengan baik, menutupi bagian muka atau fasade bangunan di belakangnya, sehingga menimbulkan pemandangan yang secara visual terkesan buruk dan semerawut. Adapun lokasi yang paling terpengaruh dengan adanya PKL adalah pada kawasan perdagangan jalan Tuanku Tambusai dan jalan Agus Salim. Selain itu keberadaan tata massa PKL yang tidak tertata dengan baik telah menurunkan citra keindahan lingkungan termasuk bangunan yang ada disekitarnya. Hal ini terjadi karen belum adanya pedoman penataan fisik kegiatan PKL yang menjadi dalam acuan dalam penataan PKL.

- Trotoar.

Keberadaan PKL pada trotoar juga merusak tatanan yang ada baik dari segi fisik maupun dari segi fungsi. Ukuran lebar trotoar yang direncanakan untuk sirkulasi manusia (pejalan kaki) dimanfaatkan untuk aktivitas PKL yang menyebabkan berubahnya fungsi ruang tersebut dari ruang publik menjadi ruang privat. Sehingga kenyamanan pejalan kaki menjadi terganggu. Hal ini terjadi karena memang belum ada penetapan secara tegas oleh pemerintah tentang ruang bagi kegiatan PKL.

- Jalan dan Parkir

Yang meliputi jalan dan lahan parkir yang dimanfaatkan oleh PKL sebagai tempat beraktivitas. Pemanfaatan lahan parkir oleh PKL menyebabkan kendaraan terpaksa parkir di badan jalan. Dampak yang dirasakan adalah berkurangnya lebar jalan sebagai akibat dari aktivitas PKL dan parkir yang memanfaatkan badan jalan, kondisi ini pada jam-jam sibuk (*peak hour*) menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas.

- b. Terhadap Masyarakat

Keberadaan PKL bagi masyarakat tidak hanya memberikan pengaruh negatif tetapi juga memberikan pengaruh positif yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat tersebut.

- Pengaruh negatif

Keberadaan PKL telah menimbulkan gangguan yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya, trotoar menjadi sempit, jalan menjadi macet dan lingkungan menjadi kumuh. Jenis dagangan, sarana fisik aktivitas, tampilan PKL dan waktu aktivitas juga telah menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. Adapun keberadaan PKL pada badan jalan, trotoar, halaman toko/pelataran parkir dianggap paling mengganggu.

- Pengaruh positif

Keberadaan PKL juga telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat pelaku aktivitas formal yang beraktivitas disekitar lokasi aktivitas PKL. Dimana manfaat utamanya yaitu membantu masyarakat dalam mendapatkan makanan dan kebutuhan lainnya dan harga yang relatif murah serta jarak yang berdekatan.

- c. Persepsi masyarakat dan PKL terhadap penataan PKL
 - Masyarakat pada umumnya menginginkan penataan PKL pada tempat aktivitasnya.
 - PKL pada umumnya setuju dengan adanya penataan, dengan catatan lokasi aktivitas mereka tetap berada pada tempat-tempat yang strategis dan ramai pengunjung.

5.2. Kesimpulan

Berdasarkan pada temuan-temuan penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan pengaruh keberadaan PKL terhadap lingkungan fisik Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Berdasarkan nilai dari hasil uji Chi kuadrat, pola penyebaran PKL dan lokasi aktivitas paling berpengaruh terhadap tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, serta ruang aktivitas. Sementara yang hubungan yang paling erat terjadi antara variabel lokasi aktivitas dengan bentuk dan massa bangunan serta ruang aktivitas, selanjutnya lokasi aktivitas PKL juga mempunyai kaitan yang erat dengan tata guna lahan serta sirkulasi dan parkir. Kondisi ini terlihat dari keberadaan PKL yang berkelompok lebih besar pengaruhnya terhadap elemen fisik lingkungan dibandingkan dengan kondisi PKL yang tersebar. Selain itu bentuk dan massa bangunan PKL serta ruang aktivitas PKL lebih terganggu pada kawasan perdagangan dibandingkan dengan bentuk dan massa bangunan pada lokasi lainnya.
2. Keberadaan PKL yang memanfaatkan ruang-ruang kota yang bukan peruntukannya dalam beraktivitas telah menimbulkan pengaruh negatif, yaitu mengganggu elemen fisik lingkungan yang meliputi tata guna lahan, bentuk dan massa dan bangunan, ruang aktivitas (trotoar, jalan dan parkir) dan berubahnya fungsi ruang-ruang tersebut yaitu dari publik menjadi ruang bagi aktivitas PKL. Adapun keberadaan PKL yang paling berpengaruh adalah pada kawasan perdagangan.

3. Pengaruh negatif yang terjadi, selain akibat dari faktor perilaku PKL juga terkait dengan kebijakan pemerintah yang belum dilaksanakan secara optimal dan belum dilengkapi dengan aturan-aturan pendukung lainnya seperti penetapan ruang bagi aktivitas PKL, pedoman dalam penataan fisik aktivitas PKL dan lainnya.
4. Bagi masyarakat keberadaan PKL memberikan pengaruh negatif dan positif. Pengaruh negatifnya adalah secara visual keberadaan PKL telah melahirkan lingkungan yang semeraut dan kumuh, trotoar menjadi sempit, kemacetan lalu lintas dan lainnya. Namun demikian keberadaan PKL juga memberi manfaat karena menjadi pendukung aktivitas masyarakat disekitarnya dalam menyediakan kebutuhan baik makanan maupun lainnya, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar PKL.
5. Masyarakat dan PKL berkeinginan agar PKL dapat ditata pada ruang-ruang yang ditetapkan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dari berbagai pihak.

5.3. Rekomendasi

Sehubungan dari hasil penelitian ini yang masih jauh dan sempurna, maka perlu dilakukan penelitian ataupun studi lanjutan yang berkaitan dengan aktivitas PKL, mengingat keberadaan PKL telah menjadi bagian dari kegiatan perekonomian perkotaan. Sehingga nantinya dapat menjadi sumbangan yang berharga dalam mengelola dan menagani masalah PKL, khususnya di Kota Pekanbaru dan diperkotaan pada umumnya. Untuk itu penelitian ataupun studi lanjutan yang direkomendasikan lebih lanjut adalah:

1. Diperlukan penelitian lanjutan yang serupa yang lebih komprehensif dan holistik untuk melihat pengaruh yang lebih luas, tidak hanya dari sisi fisik namun juga dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun aspek hukumnya.

2. Penelitian menyangkut penataan fisik kegiatan PKL yang meliputi semua aspek fisik kegiatan PKL terutama yang berkaitan dengan lokasi aktivitas, pola pengelompokkan dan sarana fisik aktivitas, sehingga keberadaan PKL tidak lagi menjadi permasalahan melainkan menjadi ciri atau daya tarik suatu kawasan.
3. Penelitian menyangkut ruang aktivitas PKL untuk melihat karakteristik ruang yang diminati PKL dalam beraktivitas, agar dapat ditetapkan ruang bagi aktivitas PKL.

Dalam kaitannya dengan para pengambil keputusan khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal penataan PKL lebih memperhatikan:

1. Penetapan lokasi bagi aktivitas PKL yang sesuai dengan karakteristik PKL, sehingga lokasi aktivitas PKL tidak lagi menjadi permasalahan..
2. Dalam penataan PKL pemerintah hendaknya mempunyai suatu pedoman penataan fisik kegiatan PKL yang mengatur semua aspek fisik dari kegiatan PKL, mulai dari pola penyebaran, sarana fisik aktivitas yang digunakan dan aspek fisik lainnya yang dikaitkan dengan dimana PKL beraktivitas.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku

- Anonim. 1997. *Kamus Tata Ruang*. Jakarta: Direktorat Jenderal cipta karya Departemen Pekerjaan Umum.
- ARG, Isaac. 1986. *Approach to Architecture Design*. Terjemahan. Bandung: Intermatra.
- Ashihara, Yoshinobu. 1983. *The Aesthetic Town Scape*. London: The Architectural Press.
- Bintarto,R. 1986. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiharjo, Eko dan Sutarjo, Djoko. 1998. *Kota Yang Berkelanjutan*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi, Depdikbud.
- Car, Sthephen. 1995. *Public Space*. Australia.: Cambridge University Press.
- C. Branch. 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasan*. Penerjemah Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP, MSc. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Darmawan, Edy. 2003. *Teori dan Implementasi Perancangan Kota*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Eckbo, Garret. 1964. *Urban Landscape Design*. Mc. Graw Hill Book Company.
- Effendi, Tadjuddin Noer. 1995. *Sumber Daya Manusia, Peluang kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Herlianto, M. 1986. *Urbanisasi dan Pembangunan Kota*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hidayat. 1978. *Peran sektor Informal dalam Struktur Perekonomian D.I Jogjakarta*. Bandung: PPE-SDM Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.
- J. Catanese, Anthony. 1986. *Introduction to Town and Country Planning*. Terjemahan Susongko. Jakarta: Erlangga.
- J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kulaitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Jakarta : Mandar Karya.
- Kostof, Spiro. 1991. *The City Shape, Urban Pattern And Meanings Through History*.

- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mc. Gee, TG and Y.M. Yeung. 1977. *Hawkers In Southeast Asian Cities Planning For The Bazaar Economy*. Ottawa: International Development Research Centre.
- Nasir M. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metodologi Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rachbini, Didik J dan Abdul Hamid. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan, Gejala Involusi Gelombang Kedua*. Jakarta: LP3S.
- Ramli, Rusli. 1992. *Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Ind-Hill. Co.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3S.
- Sethuraman, S.V. 1981. *The Urban Informal Sector In Development Countries, Employment, Poverty and Environment*. Geneva: International Labour Office.
- Shirvani, Hamid. 1985. *The Urban design Process*. Melbourne: Van Nostrand Reinhold Company.
- Siagian, Sugiarto Dergibson, Lasmono Tri Sunaryanto dan Deny S. Oetomo. 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suhartono, Irawan. 2000. *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sujarto, Djoko. 1981. *Suatu Tinjauan Tentang Aspek Urban Design Dengan Sorotan ke Beberapa Keadaan Perkembangan Kota di Indonesia*. Bandung: Departemen Planologi ITB.
- Tika, Moh. Pabundu. 1997. *Metode penelitian Geografi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Todaro, Michael P. 1999. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Umar, Husein. 2001. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Zahnd, Markus. 1999. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Semarang: Soegijapranata University Press.

Kelompok Penelitian

- Firadusy, Carunia Mulaya (ed). 1995. *Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Dewan Riset Nasional, Jakarta.
- Hidayat. 1983. *Perkembangan Sektor Informal Dalam Pembangunan Nasional: Masalah dan Prospek*. Pusat Penelitian Ekonomi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Pemerintah Kota Semarang dengan Lembaga Penelitian Unika Soegijapranata. Tahun 1999. *Studi Identifikasi Penataan ruang Publik di Semarang Bagi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, studi Kasus kawasan Simpang Lima*.
- Soetomo, Sugiono. 2000. *Urbanisasi dan Keberagaman Ruang Kota*. Program Pasca Sarjana, Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.

Kelompok Makalah/Jurnal/Majalah/Surat Kabar/Terbitan Berkala.

- Diby H, Harastoeti. 1990. *Menyimak Perubahan Karakter Lingkungan Akibat Pengembangan Kota*. Tatanan No. 05
- Evers, Hans Dieter. 1991. *Ekonomi Bayangan, Produksi Subsistem dan Sektor Informal*. Prisma No. 5.
- Hendropranoto, 1991. *Konsep Tata Ruang yang Dinamis sebagai salah satu Alternatif Pola Pikir Baru untuk Menghasilkan Perencanaan yang Implementable dalam Konteks Manajemen Perkotaan yang Terpadu*. " Prosiding, Planologi ITB Bandung.
- Sastrawan, Alexander. 1990. *Sektor Informal dan Arsitektur Kota*. Tatanan No. 05.
- Sujarto, Djoko. 1992. *Fungsi dan Keefektifan Perancangan Kota*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Implementasi Perancangan Kota, Masalah dan Tantangan, Bandung.
- Sujarto, Djoko. 1991. *Perencanaan Tata Ruang*. Jurusan Teknik Planologi ITB. Bandung.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1989. *Sektor Informal Perkotaan dan Masalah Lapangan Kerja*. Prisma No. 5.
- Wirahadikusumah, Miftah. 1991. *Sektor Informal sebagai "Bumper" pada Masyarakat Kapitalis*. Prisma No. 5.

Kelompok Skripsi / Tesis

- Hany A, Sri. 2002. Kajian Ruang Aktivitas Pedagang kaki Lima di Kota Salatiga. Pratesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro, Semarang.
- Julianingsih S, Dewy. 2002, *Keberadaan Aktivitas pedagang kaki lima pada ruang publik jalan thambrin Semarang*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro Semarang.
- Pariani M, Dewi. 2002. *Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pengendalian PKL Kota Pekanbaru*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana, Magister Pembangunan Kota dan Daerah Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Sudewa, 2002. Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kualitas Lingkungan Kawasan Monumen Perjuangan 45 Surakarta. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widjayanti, Retno. 2000. *Penataan fisisk Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpang Lima Semarang)*. Tesis tidak diterbitkan. Bidang Khusus Perencanaan Kota. Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Institut Teknologi Bandung.

Kelompok Buku Data/Laporan dan Peraturan Daerah

- Keputusan Walikota Pekanbaru No. 220 Tahun 2001. tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2001. Kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
- Pekanbaru Jelang Status Kota Metropolitan. 2000. Hunas Kota Pekanbaru.
- Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru 1994-2004. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru., 1994.
- Rencana Strategis Kota Pekanbaru. 2001-2005. Pemerintah Kota Pekanbaru, 2001.